



UNIVERSITAS INDONESIA

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN PENDIDIKAN
DI SDN CIBEUSI DAN SDN JATINANGOR**

TESIS

**DIANA SUFA RAHMAWATI
0806441056**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN PENDIDIKAN
DI SDN CIBEUSI DAN SDN JATINANGOR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam
bidang administrasi (M.A.)**

**DIANA SUFA RAHMAWATI
0806441056**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JAKARTA
JULI 2011**

i

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujukan
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Diana Sufa Rahmawati

NPM : 0806441056

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juli 2011

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
KEKHUSUSAN ADMINSTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : Diana Sufa Rahmawati
NPM : 0806441056
JUDUL TESIS : Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan
Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor

Telah Disetujui
Pembimbing



(Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Diana Sufa Rahmawati
NPM : 0806441056
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul Tesis : Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar M.A. (Magister Administrasi) pada Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Walujo Imam Isworo, M.Ec (PA) 

Pembimbing : Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA 

Penguji : Dr. Amy S. Rahayu, M.Si 

Sekretaris : Dra. Lina Miftahul Jannah, M.Si 

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-NYA, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya, mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, selaku Dekan FISIP Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA, yang telah membuka wawasan penulis dengan penuh perhatian memberikan bimbingan hingga selesainya penyusunan tesis ini.
3. Seluruh dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan tambahan ilmu dan wawasan.
4. Dr. Walujo Imam Isworo, M.Ec (PA), Dr. Dr. Amy S. Rahayu, M. Si, dan Dra. Lina Miftahul Janah, M.Si, selaku Tim Penguji tesis yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji tesis ini.
5. Kepala Sekolah SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor, Ketua Komite SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor, serta guru-guru dan orang tua siswa di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor yang telah memberikan waktu berharganya demi penyelesaian tesis ini.
6. Sekretariat Ditjen Manajemen Dikdasmen yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengenyam pendidikan S2.
7. Keluarga di Yogyakarta (Bapak, Ibu, Saudaraku) yang telah memberikan banyak doa dan dukungan.
8. Suamiku Abdul Basyir dan anak-anakku, Dzaky dan Zahraa yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.
9. Rekan-rekan di Bagian Perencanaan yang telah memberikan dukungannya.
10. Rekan-rekan di kelas Pendidikan angkatan I.

11. Rekan-rekan sesama bimbingan seputar tesis yang selalu saling mendukung.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mensupport penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan tesis ini. Semoga tesis yang sederhana ini membawa manfaat bagi yang memerlukannya.

Jakarta, 12 Juli 2011

Penulis



(Diana Sufa Rahmawati)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Sufa Rahmawati
NPM : 0806441056
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama ini tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Juli 2011
Yang menyatakan



(Diana Sufa Rahmawati)

ABSTRAK

Nama : Diana Sufa Rahmawati
 Program Studi : Ilmu Administrasi
 Judul Tesis : Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor

Tesis ini membahas tentang gambaran partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor serta upaya sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah dan analisa pengukuran partisipasi masyarakat dengan menggunakan teori kerangka kerja partisipasi masyarakat oleh Sarah White (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism dengan pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian diskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi dalam penyusunan dan pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan pendidikan berupa dana dan tenaga, sedangkan di SDN Jatinangor berupa tenaga. Tingkat partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi berada pada level yang tinggi sedangkan SDN Jatinangor berada pada level yang lebih rendah.

Kata kunci; Partisipasi masyarakat, komite sekolah, pelayanan pendidikan di sekolah.

ABSTRACT

Name : Diana Sufa Rahmawati
 Study Program : Administration Science
 Title : Community Participation in Educational Services in SDN Cibeusi and SDN Jatinangor

This thesis studies description of community participation in educational services in SDN Cibeusi and SDN Jatinangor and schools' effort in giving chances to community to participate in school educational services, and measurement analysis on community participation using Sarah White's (1996) community participation's framework theory. This research uses positivism approach with qualitative data collection and descriptive research type. The result concludes that there is community participation in SDN Cibeusi in planning and making decisions, implementation and control on educational services in form of budget (nominal) and physical help. However, in SDN Jatinangor is only physical help. Community participation in SDN Cibeusi is on high level whereas, in SDN Jatinangor it is on lower level.

Key word; community participation, school committee, educational services in school.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Masalah	12
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat	14
2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	14
2.1.2 Peranan Sekolah Dalam Partisipasi Masyarakat.....	22
2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat	26
2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	35
2.2 Pelayanan Pendidikan di Sekolah	38
2.2.1 Pengertian Pelayanan Pendidikan	38
2.2.2 Sekolah Sebagai Institusi Pelayanan Pendidikan.....	41
2.2.3 Mutu Pendidikan	43
2.2.4 Kemitraan Komite Sekolah dan Sekolah untuk Memberikan Mutu Layanan Pendidikan	46
2.3 Penelitian Terdahulu	48
2.3.1 Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 236 Kotamadya Jakarta Timur.....	48
2.3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah.....	48
2.3.3 Kontribusi Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah. (Studi Deskriptif Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumedang)	49
2.3.4 Kajian Keberadaan Dewan Sekolah Di Kota Bandung	50
2.4 Kerangka Konsep.....	54

BAB 3 METODE PENELITIAN.....	60
3.1 Pendekatan Penelitian	60
3.2 Jenis Penelitian	60
3.3 Jenis Data.....	61
3.4 Sumber Data	61
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	62
BAB 4 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, PELAYANAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH	65
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
4.1.1 Keadaan Geografis dan Demografis	65
4.1.2 Pembangunan	67
4.2 Gambaran Pelayanan Pendidikan	69
4.2.1 Pelayanan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibeusi	70
4.2.2 Pelayanan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jatinangor.....	72
4.3 Gambaran Komite Sekolah.....	75
4.3.1 Kebijakan Komite Sekolah	75
4.3.2 Komite Sekolah SDN Cibeusi.....	80
4.3.3 Komite Sekolah SDN Jatinangor	83
BAB 5 PEMBAHASAN	85
5.1 Partisipasi Masyarakat	85
5.1.1 Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di sekolah	86
5.1.2 Gambaran Usaha Sekolah Dalam Partisipasi Masyarakat	90
5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan.....	95
5.2.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat (<i>Form</i>)	96
5.2.2 Partisipasi Masyarakat Menurut Sekolah (<i>Top Down</i>)	99
5.2.3 Partisipasi Masyarakat Menurut Masyarakat	104
5.2.4 Fungsi Partisipasi Masyarakat	108
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	110
6.1 Kesimpulan	110
6.2 Saran	111
DAFTAR REFERENSI	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : <i>Advantages of Citizen Participation In Government Decision Making</i>	20
Tabel 2 : <i>Disadvantages of Citizen Participation In Government Decision Making</i> .	22
Tabel 3 : <i>Framework for Community Participation</i>	28
Tabel 4 : Ringkasan Penelitian Terdahulu Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan.....	52
Tabel 5 : Operasionalisasi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan di Sekolah.....	56
Tabel 6 : Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan di Kecamatan Jatinangor	67
Tabel 7 : Hasil USBN tahun 2010.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Proses Analisis Data..... 59



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 70-an, yang disebut sebagai era “oil boom”, Indonesia memiliki cukup anggaran dari hasil minyaknya. Pada waktu itu Pemerintah telah membangun banyak gedung sekolah dasar dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar sekolah dasar dengan strategi pemerataan dan konsep “top down”. Meskipun program ini telah berhasil secara gemilang dalam peningkatan angka partisipasi sekolah dasar, namun ternyata telah berdampak negatif terhadap penurunan *kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan*. (Ace Suryadi, 2009). Pada era itu, peran pendidikan telah diambil alih pemerintah secara penuh dimana pemerintah telah mengambil alih “kepemilikan” sekolah yang sebelumnya milik masyarakat menjadi milik pemerintah dan dikelola sepenuhnya secara birokratis bahkan sentralistik, sehingga masyarakat menjadi kurang memperoleh kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Lebih dari itu, masyarakat beranggapan bahwa pendidikan sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah dan lembaga pendidikan sekolah adalah milik pemerintah. Memasuki era milenium ketiga, kondisinya telah berubah. Pemerintah sudah tidak sekuat dulu. Apalagi setelah terjadi krisis multidimensi yang tak kunjung usai pada saat itu..

Sejalan dengan itu, sistem pendidikan nasional menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar dan mendasar, terutama dalam konteks pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada era reformasi ini, tantangan itu dirasakan sehubungan dengan keadaan dan permasalahan di berbagai bidang kehidupan yang secara langsung memiliki kaitan dengan sistem pendidikan nasional. Terdapat pandangan kuat yang menyatakan bahwa rendahnya mutu pendidikan dewasa ini merupakan penyebab utama keterpurukan bangsa.

Mutu pendidikan di Indonesia dalam forum *assessment* internasional selalu berada di peringkat bawah. Hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh *The Third Internatonal Mathematics and Science Study* (TIMSS) terhadap 38 peserta pada tahu 2000 menunjukkan negara Indoensia hanya mampu meraih rangking 34

untuk mata pelajaran IPA dan rangking 32 untuk mata pelajaran matematika. Peringkat ini berada di bawah Malaysia (16 dan 21) dan Thailand (27 dan 24). Hasil *assessment Program for International Student Assessment (PISA)* pada tahun 2003 untuk *literacy* membaca, matematik dan IPA terhadap 41 negara peserta menunjukkan negara Indonesia hanya mampu meraih rangking kr 39 pada *literacy* membaca dan matematika sedangkan *literacy* IPA mendapat rangking 38. peringkat ini berada di bawah Thailand yang mendapat peringkat 32, (Balitbang Depdiknas: 2007:3).

Komisi Pendidikan Nasional lebih lanjut melaporkan bahwa indikator mutu juga diukur secara kuantitatif berdasarkan prestasi akademis. Berdasarkan laporan Bank Dunia tentang hasil tes membaca murid dari kelas IV Sekolah Dasar menunjukkan bahwa, Indonesia berada pada peringkat terendah di Asia Timur. Berdasarkan rerata hasil tes membaca di beberapa negara menunjukkan hasil yaitu: Hongkong 75,5%, Singapura 74%, Thailand 65,1%, Filipina 52, 6% dan Indonesia 51,7%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa Indonesia tersebut hanya mampu memahami 30% dari materi bacaan, dan mengalami kesulitan menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan penalaran, sehingga berada pada peringkat paling bawah. Dalam studi ini diketahui rata-rata kemampuan sisa kelas 4 SD hanya mampu mengerjakan 34% soal, sedangkan anak SLTP hanya mengerjakan 2% soal, (World Bank: 1995).

Hasil analisis dari berbagai studi menunjukkan bahwa ada tiga factor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi pada keluaran pendidikan (output) terlalu memusat (input) dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik yang menyebabkan tingginya ketergantungan kepada birokrasi dan seringkali kebijakan pusat terlalu umum dan kurang menyentuh atau kurang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah setempat. Segala sesuatu yang terlalu diatur menyebabkan penyelenggaraan sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan kreativitas. Hal ini menyebabkan usaha dan daya untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu layanan dan keluaran terutama orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini hanya terbatas pada dukungan

Universitas Indonesia

dana.padaahal partisipasi mereka sangat penting di dalam proses pendidikan antara lain pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi dan akuntabilitas (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Perubahan paradigma pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, termasuk urusan pendidikan. Pendidikan tidak hanya menjadi urusan pemerintah saja, namun juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi orangtua dan masyarakat dengan pemerintah diharapkan menjadi kerjasama sinergis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut pada hakikatnya dapat disebut sebagai otonomi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional, pemerintah harus memperhatikan pembangunan pendidikan yang ada di daerah, sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 bahwa tujuan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun antara lain adalah (1) memantapkan perwujudan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efisien serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat, (2) meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan, pengembangan permukiman serta pengelolaan penataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan dan sekaigus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah; (3) meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, dan meningkatkan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Paradigma pemerintahan secara bertahap telah bergeser dari yang semua dikelola secara sentralistis secara bertahap telah dikelola secara desentralistis, termasuk dalam desentralisasi pendidikan. Pergeseran paradigma sistem pendidikan nasional sebagai pengejawantahan dari semangat

otonomi daerah, membawa konsekuensi terhadap perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan publik (public services) yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Menurut Tjokroamidjoyo (dalam Jalal dan Supriyadi, 2001), salah satu tujuan desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan dukungannya dalam kegiatan pembangunan pendidikan, serta melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya, bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan harus senantiasa ditumbuhkan dengan membuka kesempatan partisipasi seluas-luasnya. Kemampuan berpartisipasi terkait dengan kepemilikan sumber daya yang diperlukan untuk dipartisipasikan, baik menyangkut kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti dana, tenaga, dan lain-lain. Masyarakat ikut berperan dalam membangun pendidikan, yang secara kodrati memang memiliki tanggung jawab bersama dengan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 pasal 8 disebutkan bahwa “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan” Bahkan, dalam pasal 9 disebutkan bahwa “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dapat diketahui bahwa pola dan pelaksanaan manajemen harus demokrasi, pemberdayaan masyarakat harus menjadi tujuan utama, peran serta masyarakat bukan hanya pada stakeholders namun menjadi bagian dari sistem pengelolaan, pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, dan keanekaragaman aspirasi, nilai, dan norma lokal harus dihargai dalam rangka memperkuat sistem pendidikan nasional (Siskandar, 2008, p.667). Konsep desentralisasi pendidikan menganggap masyarakat sebagai pihak yang paling menentukan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya sistem pendidikan dasar dan menengah di setiap daerah. Masyarakat adalah pemangku kepentingan dari sistem pendidikan dasar dan menengah, atau pihak yang paling menentukan terhadap sistem dan proses pendidikan di daerah sehingga cukup sulit menentukan masyarakat mana yang berperan sebagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. UNESCO (1999)

Universitas Indonesia

yang dikutip oleh Agung (2009) menyatakan bahwa masyarakat merupakan masukan lingkungan (*environment in put*) yang akan mempengaruhi proses pendidikan, dan membawa pada keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pendidikan dalam jangka panjang.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, pemanfaatan hasilnya, dan evaluasi kegiatan (Cohen dan Uphoff. 1980). Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam program dan kegiatan pendidikan, baik dalam bentuk kesediaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, antara lain dalam memberikan masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya (Sahidu, 1998). Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi kegiatan masyarakat untuk kepentingan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Secara ideal, partisipasi masyarakat harus dimulai dari proses perumusan kebijakan dan rencana sampai dengan pelaksanaan pengawasan dari masyarakat. Dengan demikian, anggota masyarakat tidak hanya menjadi obyek dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, tetapi lebih sebagai subyeknya, sebagai agen atau pelaku utamanya.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, baik bersifat spontan atau terorganisasi, secara sesaat atau berkelanjutan, serta dengan strategi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang dapat mendorong maupun faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet, 1992). Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang

dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan keluarga/warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Sebaliknya juga pihak penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan perlu memberikan ruang dan/atau kesempatan dalam hal lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif mana, dan dengan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan. Ada tidaknya kemauan keluarga/warga atau kelompok masyarakat dalam pengembangan pendidikan di Indonesia terkait dengan adanya perubahan paradigma pembangunan.

Pemerintah mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pendidikan dengan membentuk wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi serta dukungan mereka dalam menunjang pendidikan yaitu dengan membentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang dipertegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Ayat 2 menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hirarkis. Ayat 3 Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat

Universitas Indonesia

satuan pendidikan. Dipertegas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Bab XIV peran serta masyarakat. Pemerintah memberikan wadah bagi masyarakat untuk berperanserta dan menyalurkan aspirasinya dalam menunjang pendidikan melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten dan Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan (sekolah). Tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah mewujudkan pendidikan yang bermutu diharapkan akan lebih baik dan meningkat untuk mewujudkan *community-based education* dengan adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Pembentukan Komite Sekolah, yang merupakan badan mandiri sebagai mitra sekolah, merupakan satu bentuk upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Dalam Permendiknas nomor: 44/U/2002 disebutkan bahwa pembentukan Komite Sekolah bertujuan yaitu: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan; (b) meningkatkan tanggung jawab dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite Sekolah telah terbentuk pada hampir semua satuan pendidikan. Temuan di lapangan ada indikasi bahwa pembentukan komite sekolah hanya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan *block grant* dari pemerintah. Sehingga proses pembentukannya pun dilakukan secara instan. Seperti penunjukan oleh kepala sekolah. Akibatnya sampai saat ini Komite Sekolah dianggap seperti BP3 ataupun BP3 ataupun POMG. Hal inilah yang kita kenal sebagai Komite Sekolah “stempel”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW tahun 2005 tentang anggaran dan mutu pelayanan sekolah menunjukkan bahwa komite sekolah belum berfungsi dengan baik karena komite sekolah hanya menjadi kepanjangan tangan sekaligus legitimator kebijakan-kebijakan yang dibuat

oleh kepala sekolah. Selain itu hasil riset yang dilakukan ICW juga menggambarkan bahwa pada tingkat mikro (pengelola pada tingkat satuan pendidikan), terdapat kecenderungan peningkatan anggaran namun tidak banyak pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pelayanan. Persepsi orang tua yang masih menganggap buruk gedung dan ruang tempat belajar mengajar. Pelayanan dalam memberikan informasi bidang akademis peserta didik maupun pengelolaan keuangan transparan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim LPPM-IPB tahun 2009 tentang survey kepuasan orang tua terhadap pelayanan pendidikan dasar yang disediakan oleh sistem desentralisasi sekolah bahwa secara umum tingkat kepuasan orang tua terhadap kualitas pendidikan dasar berada pada tingkat kurang puas dan puas. Namun untuk ketersediaan biaya sekolah orang tua merasa kurang puas. Hal ini terjadi karena biaya operasional ini telah mempengaruhi ketersediaan dan kualitas pelayanan pendidikan dasar, khususnya ketersediaan infrastruktur fisik, media pembelajaran, perpustakaan dan sumberdaya manajemen sekolah. Hal ini dikemukakan oleh kepala sekolah, dan komite sekolah melaporkan bahwa biaya merupakan kendala bagi pengeluaran operasional/ managerial seluruh sekolah. Alasan utama ketidakpuasan dengan Biaya Operasional Sekolah (BOS), seperti dilaporkan oleh kepala sekolah, adalah berkaitan dengan ketidakcukupan biaya untuk membiayai seluruh pelayanan pendidikan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan oleh adanya Peraturan Pemerintah yang melarang sekolah untuk memungut biaya dari orangtua setelah menerima dana BOS dari pemerintah pusat. Kepala sekolah swasta juga menekankan adanya kendala dana BOS yang keluar setiap tiga bulan sekali yang menyebabkan kendala operasional sekolah.

Sekolah memberikan pelayanan pendidikan untuk masyarakat. Masyarakat merupakan stakeholder dari sekolah dimana orang tua, dan siswa adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal menentukan kualitas jasa yang disampaikan kepada mereka. Kerjasama antara sekolah dan masyarakat perlu dilakukan untuk memperoleh kepuasan pelanggan dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Jadi partisipasi dalam pelayanan pendidikan dipandang penting untuk keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi

Universitas Indonesia

masyarakat akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet, 1992). Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari sekolah.

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di Sekolah Dasar maka penelitian ini membandingkan partisipasi masyarakat pada dua Sekolah Dasar yaitu SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor. Pemilihan Lokasi penelitian dengan alasan, Komite Sekolah SDN Cibeusi termasuk salah satu Komite Sekolah peraih subsidi hibah bersaing dari Departemen Pendidikan Nasional, dimana terdapat penilaian untuk program kegiatan yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Selain itu SDN Cibeusi telah memiliki berbagai prestasi. Prestasi yang dicapai antara lain merebut gelar terhormat tingkat Kabupaten Sumedang untuk juara sekolah sehat program UKS, Tahun 2007. Merebut gelar terhormat tingkat Kabupaten Sumedang untuk juara Sekolah Berbudaya Lingkungan, Tahun 2007. Merebut gelar terhormat tingkat Kabupaten Sumedang untuk Kepala Sekolah berprestasi, Tahun 2007. Merebut gelar terhormat tingkat Kabupaten Sumedang untuk Komite Sekolah berprestasi, Tahun 2007. Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Sekolah Dasar Negeri yang terbanyak memiliki lagu-lagu sendiri tentang sekolahnya, Tahun 2008. Prestasi yang diukir oleh SDN Cibeusi ini merupakan kerjasama antara sekolah, komite sekolah dan masyarakat. Dari prestasi ini, komite sekolah dengan mudah menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha antara lain PLN Jawa Barat. Sumbangan yang diberikan PLN digunakan untuk mendirikan kelas baru. Di samping prestasi tersebut, Sekolah Dasar Negeri I, Cibeusi Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat mendapat perhatian khusus dan kunjungan dari beberapa pejabat diantaranya: Gubernur Jawa Barat, Bupati Sumedang, Ketua Dewan Pendidikan Jawa Barat, Rektor IPDN, Jenderal Purnawirawan Wiranto dan beberapa dari Perguruan Tinggi dalam rangka partisipasi masyarakat. Komite Sekolah SDN Cibeusi Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan

Universitas Indonesia

sekolah. SDN Cibeusi merupakan salah satu sekolah yang mampu memberdayakan komite sekolah.

Komite Sekolah SDN Jatinangor, berdasarkan informasi awal, diperoleh bahwa komite sekolah tidak memiliki rencana program kerja dan dokumen tentang komite sekolah tidak tersimpan di arsip kepala sekolah. Komite Sekolah tidak memiliki prestasi dalam memajukan sekolah. Ada orang tua siswa yang tidak mengetahui keberadaan komite sekolah. Siswa yang terdaftar di sekolah tersebut adalah 125 siswa yang merupakan sekolah dengan siswa paling sedikit diantara sekolah lain di kecamatan Jatinangor. Sekolah hanya mengandalkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk seluruh kegiatan pelayanan pendidikan di sekolah. SDN Jatinangor belum pernah memperoleh bantuan berupa materi selama digulirkannya program BOS. Hal ini mengindikasikan bahwa komite sekolah yang diharapkan mampu membantu meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah tidak terlibat aktif dalam memajukan sekolah dan kemungkinan kualitas pelayanan sekolah yang kurang baik sehingga kurang ada peminatnya orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, terdapat banyak aspek yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah. Penulis akan memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi komite sekolah dan orang tua siswa dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor?
2. Bagaimana usaha sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SD Cibeusi dan SDN Jatinangor?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini, secara umum bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan mendalami bagaimana peranserta masyarakat dalam pelayanan sekolah. Wadah partisipasi masyarakat dalam pelayanan masyarakat diasumsikan adalah komite sekolah SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding atau tolok ukur bagi peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan sekolah, khususnya peranserta masyarakat dalam pelayanan sekolah sebagai indikator peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus ditujukan untuk mendapatkan gambaran secara terperinci tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Partisipasi komite sekolah dan orang tua siswa dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor
2. Usaha sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SD Cibeusi dan SDN Jatinangor
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor

1.4 Manfaat Penelitian

Informasi yang diperoleh mengenai dampak partisipasi masyarakat dalam wadah komite sekolah diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teoretis maupun dari segi pelaksanaan di lapangan.

1. Dari segi teoretis, penelitian ini akan menyumbangkan pemikiran untuk memperkaya konsep-konsep kebijakan pendidikan.
2. Dari segi pelaksanaan, penelitian ini diharapkan akan dapat memberi masukan bagi para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan baik di pusat maupun di daerah untuk menyempurnakan kebijakan dan implementasi program peningkatan mutu dan pengelolaan pendidikan.
3. Bagi para pelaksana di lapangan, penelitian ini akan sangat berharga untuk memperoleh balikan (*feedback*) atas keberhasilan maupun kegagalan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan.

1.5 Batasan Masalah

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan masyarakat diasumsikan adalah komite sekolah dan orang tua siswa. Dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan lain-lainnya maka penelitian ini berfokus pada gambaran partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor, usaha sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah dan tingkat partisipasi yang dilakukan oleh komite sekolah sebagai elemen masyarakat dan orang tua siswa dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor.

1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan keterbatasan penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan tentang teori yang memberikan landasan bagi penulis dalam mengolah dan menganalisis data serta konsep-konsep dan pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini diuraikan metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data

Bab IV Gambaran Umum SDN Cibeusi dan SD Jatinangor serta Komite Sekolah SDN Cibeusi dan SD Jatinangor. Dalam bab ini diuraikan profil SDN Cibeusi dan SD Jatinangor serta Komite Sekolah SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor.

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang gambaran partisipasi masyarakat dalam pelayanan sekolah, sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah dan tingkat partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor.

Bab VI Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang dipandang perlu yang mungkin dapat dilaksanakan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 membahas beberapa hal penting, tentang: (1) konsep partisipasi masyarakat, (2) pelayanan pendidikan di sekolah, (3) tinjauan terhadap penelitian yang terdahulu yang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan.

2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah suatu bentuk intervensi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Masyarakat yang dimaksud adalah sebuah lembaga non pemerintah yang turut berperan dalam penetapan kebijakan sekolah. Namun secara umum akan di bahas terlebih dahulu tentang pengertian partisipasi masyarakat secara konseptual.

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat secara umum merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang secara perseorangan atau kelompok dalam suatu kegiatan (Silviana Murni, 2006). Pendapat senada dikemukakan oleh Prasojo (2005, p.132) bahwa:

“Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan saran dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif”.

Conyer (1984) yang dikutip oleh Silviana mengemukakan bahwa pendekatan dalam partisipasi adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan. Agar pembangunan dapat berlangsung secara optimal, maka partisipasi tersebut membutuhkan pendekatan yang dapat mensinergikan semua potensi masyarakat (Mikkelsen:1999). Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Jalal & Supriadi (2001, p.201-202), mengartikan masyarakat secara sederhana sebagai sebuah kelompok yang hidup dalam daerah khusus. Setiap kelompok mempunyai beberapa ciri: pertama, sebuah jaringan untuk saling berbagi perhatian dan keinginan, walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam status social, peranan, dan tanggung jawab. Kedua, symbol bersama atau tempat bersama seperti tempat pertemuan, desa, bagian kota, atau wilayah yang dilayani sekolah. Ketiga, perluasan dari keluarga inti yang memungkinkan setiap orang berkaitan keluarga dan menggunakan peran-peran seperti dalam keluarga, misalnya kebersamaan, kekuasaan, kewenangan, dan sebagainya. Keempat, anggota masyarakat ditentukan terutama melalui kelahiran dan perkawinan serta rasa kepemilikan bersama. Kelima, sesuatu yang membedakan dirinya dari masyarakat lain.

Pengertian “partisipasi masyarakat” dalam bidang pendidikan pada khususnya, atau dalam bidang pembangunan pada umumnya, menunjuk kepada pengertian tentang keikutsertaan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi program dan kegiatan (*United Nation, 1975*). Partisipasi masyarakat menurut World Bank (2005) adalah proses pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi manajemen, mulai dari proses penyusunan rencana prioritas, pembuatan kebijakan, penyusunan alokasi sumber daya, sampai dengan proses pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting karena dapat membentuk rasa kepemilikan, keterbukaan, tanggung jawab, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan.

Berkaitan dengan sekolah, Grant (1979: vii), menyebutkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat dan lembaga sosial yang mempengaruhi sekolah sehingga menjadi mitra bagi sekolah dalam pembuatan kebijakan sekolah, seperti dalam hal pembiayaan, perencanaan kurikulum, pemilihan pegawai sekolah, hingga perencanaan dalam masalah integrasi antarwarganya yang beraneka ragam.

Community participation is that in which citizens and social agencies affected by school are partners in making important school policy

decisions in areas such as budget, curriculum planning, selection for school personnel, and plan for racial integration (Hapsari, 2001)

Partisipasi masyarakat untuk sekolah menurut Agung (2009, p.304) adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya saling keterkaitan antara sekolah, masyarakat dan orangtua sebagai pemangku kepentingan pendidikan. Partisipasi masyarakat terhadap sekolah merupakan proses pelibatan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan dengan proses pembelajaran.

Sekolah merupakan satu organisasi yang menganut sistem terbuka (Depdiknas, 2007). Sebagai organisasi terbuka maka terjadi kontak hubungan dengan lingkungannya. Kontak hubungan ini perlu dijaga agar lembaga dan sistem operasionalnya tidak mudah punah. Sekolah yang mengisolasi dirinya dengan tidak melakukan kontak dengan lingkungannya perlahan-lahan akan mati secara alamiah, tidak akan dapat eksis, karena organisasi hanya akan tumbuh dan berkembang jika didukung dan dibutuhkan oleh lingkungannya. Kelangsungan lembaga pendidikan akan sangat tergantung dan ditentukan oleh usaha sekolah itu sendiri, dalam arti sejauhmana sekolah mampu menjaga dan memelihara komunikasinya dengan masyarakat luas dengan menjadi organisasi terbuka. Satuan pendidikan sekolah dapat berkembang jika mendapat dukungan dari masyarakat, dan salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Hal ini dipertegas oleh Cook dan Macaulay (1997) dalam Mulyasa (2003) yang memberikan definisi pemberdayaan masyarakat sebagai “alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks MBS dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Oleh karena itu, selain pemberdayaan semua warga sekolah, perlu ditempuh juga upaya-upaya pemberdayaan orang tua dan masyarakatnya.

Masyarakat adalah pemangku kepentingan pendidikan yang memiliki kepentingan akan berhasilnya pendidikan di sekolah, karena masyarakat adalah pembayar sumber dana pendidikan melalui uang sekolah maupun pajak. Oleh karena itu, sekolah seharusnya bertanggungjawab terhadap masyarakat sebagai

Universitas Indonesia

pembayar sumber dana pendidikan tersebut (Ace Suryadi, 2009). Secara entitas masyarakat itu sangat kompleks dan tak terbatas sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan sekolah sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki lembaga representasi agar sekolah dapat mudah melakukan hubungan dengan masyarakat. Selain itu masyarakat juga merupakan sumber *raw input* peserta didik bagi sekolah yang akan menjalani proses pendidikan di sekolah, yang kemudian akan menjadi keluaran (*out put*) dan hasil pendidikan (*outcomes*). UNESCO (1999) yang dikutip oleh Agung (2009) menyatakan bahwa masyarakat merupakan masukan lingkungan (*environment input*) yang akan mempengaruhi proses pendidikan, dan membawa pada keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pendidikan dalam jangka panjang.

Masyarakat perlu mempunyai lembaga representasi dengan membentuk Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan sekolah. Untuk ini, Komite Sekolah harus mampu merepresentasikan keragaman yang ada dalam masyarakat agar lembaga ini benar-benar dapat mewakili masyarakat. Interaksi antara masyarakat dan sekolah dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan Komite Sekolah. Dalam teori konsumerisme, prinsip keterwakilan (*representation*) mengandung pengertian bahwa konsumen seharusnya cukup terwakili dalam sistem pengambilan keputusan yang dibuat dengan mempertimbangkan keterwakilan semua lapisan masyarakat (Supriyono, 2001 p.22). Komite Sekolah merupakan wakil dari keluarga dan masyarakat yang dapat menjadi jalan masuk yang tepat agar masyarakat dapat berpartisipasi dan rasa ikut memiliki sistem pendidikan yang berlangsung di satuan pendidikan sekolah yang ada di lingkungan masing-masing (Ace Suryadi, 2009). Anggota Komite Sekolah berasal dari perwakilan orangtua siswa, perwakilan sekolah, dan perwakilan masyarakat yang dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Bukti tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi Komite Sekolah, yaitu: (1) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, (2) pendukung, baik dalam bentuk finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, dan (3) pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Di samping itu, Komite Sekolah juga menjadi mediator antara sekolah dengan masyarakat yang diwakilinya.

Menurut Esmont dalam Syaiful Sagala (2006:167), Komite Sekolah biasanya memiliki kewenangan memformulasikan peran dan aturan untuk mengontrol dan mengatur sekolah yang berada di bawah hukum mereka, seperti hubungan keberadaan aturan daerah yang memiliki kesamaan kekuatan dan pengaruh kekuatan. Melaporkan kemajuan komite sekolah kepada masyarakat, seperti administrasi kantor, orang yang dipekerjakan, kegiatan kelompok dan individu dan sebagainya atas dasar kebijakan dan keputusan dari masyarakat. Selain itu memberikan pengertian dan penekanan pada kekuatan dan kebutuhan dari masyarakat sekolah. Evaluasi terhadap pemerintah harus dilakukan secara kontinue untuk mendukung kegiatan sekolah serta mengatasi permasalahan yang berdampak kepada kemajuan mutu pendidikan.

Keterlibatan masyarakat menurut Epstein (1989) dalam melibatkan masyarakat kurang diperhatikan hal-hal berikut: a) beragamnya latar belakang keluarga, b) sekolah yang sama dapat berbeda dalam praktik pelibatan orangtua, c) hubungan sekolah dan keluarga harus terus dikembangkan, d) keterlibatan orangtua memerlukan pengembangan dan kepemimpinan yang spesifik, e) permintaan keterlibatan keluarga akan selalu ada. Epstein (1994) membagi keterlibatan orangtua terhadap sekolah menjadi lima jenis keterlibatan orangtua, yaitu:

Five types of parent involvement:

Type 1. Basic Obligations of Parents

1. *Provide for children's health and safety*
2. *Prepare children for schools*
3. *teach family life for schools*
4. *Build positive home conditions that support school learning and behavior*

Type 2. Basic Obligations of Schools

- 1) *communicate with parents about school programs and children's progress*
- 2) *Vary the form and frequency of communications such as memos, notices, report cards, and conferences to improve all parents' understanding of school programs and children's progress*

Universitas Indonesia

Type 3. Parent Involvement at Schools:

- 1) *Volunteers assist teachers, administrators, and children in the classroom or in other areas of the school*
- 2) *Parents attend student performances, sport, or other events, or attend workshops or other programs for their own education and training*

Type 4. Parent Involvement in Learning Activities at Home

- 1) *Parents initiate activities or children initiate request for help*
- 2) *Teachers share ideas and instructions with parents for monitoring or assisting their children at home in learning activities.*

Type 5. Parent Involvement Government and Advocacy

1. *Parents have decision making roles in the advisory council, or other committees or groups at the school, district, or state level.*
2. *activits in independent advocacy groups monitor the aschools and work for schools improvement.*

Epstein (1994) membagi jenis keterlibatan orangtua menjadi 5 tipe. Tipe 1 kewajiban dasar orang tua yaitu memberikan kesehatan dan keamanan bagi anak, menyiapkan anak untuk sekolah, mengajarkan keterampilan hidup keluarga selama bersekolah, membangun kondisi rumah yang positif yang mendukung pembelajaran dan perilaku sekolah. Tipe 2 kewajiban dasar sekolah yaitu berkomunikasi dengan orangtua mengenai program sekolah dan kemajuan siswa; variasikan bentuk dan frekuensi komunikasi seperti catatan, pemberitahuan, kartu laporan, dan konferensi untuk meningkatkan pemahaman semua orangtua mengenai program sekolah dan kemajuan siswa. Tipe 3 keterlibatan orangtua di sekolah yaitu relawan asisten guru, administrator, dan anak di kelas atau di area lain di sekolah; orangtua menghadiri pertunjukan siswa, olahraga, atau kegiatan lain, atau menghadiri lokakarya atau program lain bagi pendidikan dan pelatihan mereka sendiri. Tipe 4: keterlibatan orangtua dalam kegiatan pembelajaran di rumah yaitu orangtua mengawasi kegiatan atau anak memulai untuk meminta bantuan; guru berbagi ide dan perintah dengan orangtua untuk memonitor dan membantu anak di rumah dalam kegiatan pembelajaran. Tipe 5: keterlibatan orangtua dalam pemerintahan dan advokasi yaitu orangtua mempunyai peran dalam pembuatan keputusan di dewan advokasi, atau komite lain atau grup di

level sekolah, wilayah, atau nasional; aktivis dalam grup advokasi independen untuk memonitor sekolah dan bekerja bagi peningkatan mutu sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dimulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, pemanfaatan hasilnya, dan evaluasi kegiatan (Cohen dan Uphoff. 1980). Secara lebih rinci, partisipasi dalam pembangunan berarti mengambil bagian atau peran dalam program dan kegiatan pendidikan, baik dalam bentuk kesediaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pendidikan, antara lain dalam memberikan masukan berupa pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dana atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasilnya (Sahidu, 1998). Selama ini, penyelenggaraan partisipasi masyarakat di Indonesia dalam kenyataannya masih terbatas pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan saja. Kegiatan partisipasi masyarakat lebih dipahami sebagai upaya mobilisasi kegiatan masyarakat untuk kepentingan pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Secara ideal, partisipasi masyarakat harus dimulai dari proses perumusan kebijakan dan rencana sampai dengan pelaksanaan pengawasan dari masyarakat, sehingga anggota masyarakat tidak hanya menjadi obyek dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, tetapi lebih sebagai subyeknya, sebagai agen atau pelaku utamanya.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, keterlibatan warga masyarakat (*citizen participation*) dalam pengambilan keputusan kebijakan publik sangat penting dan bermanfaat. Secara garis besar, manfaat *citizen participation* dalam pengambilan keputusan (*decision making*) meliputi dua hal yaitu proses (*process*) and hasil (*outcomes*), baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Manfaat partisipasi masyarakat tersebut dapat digambarkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 : *Advantages of Citizen Participation In Government Decision Making*

	<i>Advantages to citizen participants</i>	<i>Advantages to government</i>
<i>Decision process</i>	<i>Education (learn from and inform government)</i>	<i>Education (learn from and inform citizens)</i>

	<i>Advantages to citizen participants</i>	<i>Advantages to government</i>
<i>Outcomes</i>	<i>representatives)</i> <i>Persuade and enlighten government</i> <i>Gain skills for activist citizenship</i>	<i>Persuade citizens; build trust and allay anxiety or hostility.</i> <i>Build strategic alliances</i> <i>Gain legitimacy of decisions</i>
	<i>Break gridlock; achieve outcomes</i> <i>Gain some control over policy process.</i> <i>Better policy and implementation decisions</i>	<i>Break gridlock; achieve outcomes</i> <i>Avoid litigation costs</i> <i>Better policy and implementation decisions</i>

Sumber: Irvin dan Stansbury (2004,p.56)

Merujuk pada tabel di atas, menunjukkan adanya manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan/peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan, antara lain: (1) sebagai proses ‘pendidikan’ bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan mengkomunikasikan aspirasinya kepada pemerintah, dan juga memperoleh kesempatan belajar dari pemerintah, (2) memberi peluang kepada masyarakat untuk meyakinkan (*persuade and enlighten*) pemerintah, dan (3) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi. Di samping keuntungan bagi masyarakat, *citizens participation* juga memberikan dampak positif bagi pemerintah, antara lain (1) sebagai proses ‘pendidikan’ dan sekaligus memberikan kesempatan bagi pemerintah dalam mengkomunikasikan aspirasi atau kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat, dan juga belajar atau menyerap aspirasi dari masyarakat, (2) memberikan peluang kepada pemerintah untuk meyakinkan, membangun rasa saling percaya, dan mengurangi kerisauan atau keresahan masyarakat, (3) membangun kerjasama dengan masyarakat, dan (4) sebagai wahana untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat atas keputusan yang ditetapkan pemerintah.

Selain manfaat positif yang diperoleh dari citizen participation dalam pengambilan keputusan, juga terdapat beberapa hal negatif (kelemahan) yang

mungkin timbul karena keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Secara garis besar, beberapa kerugian dapat dilihat pada *Tabel 2* berikut ini.

Tabel 2 : Disadvantages of Citizen Participation In Government Decision Making

	<i>Disadvantages to citizen participants</i>	<i>Disadvantages to government</i>
<i>Decision process</i>	<i>Time consuming (even dull)</i> <i>Pointless if decision is ignored</i>	<i>Time consuming</i> <i>Costly</i> <i>May backfire, creating more hostility toward government</i>
<i>Outcomes</i>	<i>Worse policy decision if heavily influenced by opposing interest groups</i>	<i>Loss of decision-making control</i> <i>Possibility of bad decision that is politically impossible to ignore</i> <i>Less budget for implementation of actual projects</i>

Sumber: : Irvin dan Stansbury (2004,p.58)

Berdasarkan *Tabel 2.2* tersebut dapat diidentifikasi beberapa kelemahan keterlibatan/peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan, antara lain (1) pada umumnya memerlukan waktu yang lebih lama dan seringkali terkesan membuang-buang energi, (2) membutuhkan biaya yang relatif lebih banyak, (3) kemungkinan terjadi lepas kendali dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat atau kurang sesuai terutama yang berkaitan dengan keputusan-keputusan politis.

2.1.2 Peranan Sekolah Dalam Partisipasi Masyarakat.

Menurut Anne Wescott Dodd dan Jean L. Konzal (2002) dalam bukunya *'How Communities Build Stronger Schools'*, bahwa kerjasama orang tua dan guru secara bersama mempunyai tujuan yang penting yaitu membantu anak-anak menjadi sukses baik di sekolah maupun dalam kehidupannya. Mempertegas pendapat tersebut, berikut ini akan digambarkan beberapa kondisi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pendidikan atau sekolah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik, terutama di Amerika, telah berlangsung sejak tahun 1950-an. Alasan mendasar perlunya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah *“if citizens become actively involved as participants in their democracy, the government that emerges from this process will be more democratic and more effective”* (Dye, T.R, 2000, p.3).

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak hanya terjadi dalam budaya politik Amerika Serikat (*US political culture*) saja, melainkan juga terjadi di berbagai negara di penjuru dunia. Buchy dan Race (2004) menyatakan bahwa *“The enthusiasm for incorporating citizens into democratic decision making is not limited to the Limited States: Many other countries have extensive initiatives in place that involved citizens in the governing process”*(p. 56). Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang lebih berorientasi kepada publik (*more public – reference decision making*) dan apresiasi masyarakat yang lebih luas (*a better appreciation of the larger community*) (Box, Richard C, 1998). Lebih lanjut Irvin dan Stansbury (2004) memberikan argumen sebagai berikut:

With citizen participation, formulated policies might be more realistically grounded in citizen preferences, the public might be more sympathetic evaluators of the tough decisions that government administrators have to make, and the improved support from the public might create a less divisive, combative populace to govern and regulate.(p. 55)

King dan Stivers (1998) yang mengamati program peningkatan partisipasi masyarakat kota Oklahoma tahun 1995, menyarankan bahwa, “peranserta masyarakat dalam pengambilan keputusan perlu terus dikembangkan karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap pemerintah/negara” (p.18). Konisky dan Beierle (2001) bahkan menyatakan bahwa, “...yang menjadi pembicaraan bukan lagi masalah kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, tetapi lebih pada bagaimanakah bentuk terbaik proses partisipasi masyarakat” (p.5-26). Pembicaraan tentang partisipasi masyarakat mulai mengarah pada proses partisipasi sebagai *“a transformative tool for social change”* dan untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik (*produce better*

decisions), sehingga lebih efisien dan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Keterlibatan semua unsur termasuk masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, untuk menghasilkan suatu keputusan yang komprehensif, aspiratif dan representatif, serta memperoleh legitimasi serta dukungan dari seluruh komponen, terutama masyarakat yang sekaligus juga sebagai pengguna kebijakan publik.

Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dapat menyelenggarakan layanan kemitraan pembelajaran sebagai sarana bagi siswa untuk membantu masyarakat atau organisasi masyarakat untuk membantu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengalaman lapangan yang diadakan dapat berupa pelayanan terhadap anak-anak cacat fisik atau mental, menanami taman masyarakat, atau membantu perawatan anak di rumah sakit setempat. Tujuan hal ini adalah membangun masyarakat dan lingkungan yang lebih kuat, menciptakan masyarakat yang lebih aktif dan terlibat, dan “pengembangan kelas tradisional” (Halsted & Schine, 1991, p. 251). (p. 19)

Jika hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat berjalan baik, maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin kerjasama dengan masyarakat, maka sekolah dapat memberitahukan masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan (Mulyasa, 2003, p. 50-51)

Kepala sekolah merupakan salah satu kunci untuk menciptakan hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua tentang sekolah

Peran penting kepala sekolah secara langsung ataupun tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa, komitmen dan efektivitas guru, dan partisipasi dan keterlibatan keluarga dan masyarakat. Kepala sekolah yang secara tulus terbuka

terhadap guru dan staf sekolah akan terbuka juga kepada orangtua dan masyarakat untuk melibatkan mereka. Kepala sekolah juga berperan membangun dialog dan komunikasi diantara staf sekolah, keluarga, masyarakat, dan siswa; dan hal itu menciptakan budaya sekolah sehingga terjadi kolaborasi antara masyarakat dan sekolah. Kepala sekolah yang berwawasan luas karena bergaul dengan kepala sekolah dari daerah lain akan menguntungkan bagi masyarakat. (*the moral imperative of school leadership*, Michael Fullan, p. 59).

Kepala sekolah tidak harus menjadi anggota tiap kemitraan yang ada namun mendelegasikannya kepada staf yang dianggap cakap, ahli, dan berpengalaman untuk memimpin tim. Kepala sekolah selalu memperhatikan dan mendukung usaha yang dilakukan tim kemitraan, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, menghadiri acara kemitraan dengan masyarakat, dan menghargai dan mendukung usaha dan kesuksesan kemitraan. Dengan demikian, kepala sekolah memfasilitasi pengembangan kemitraan dengan masyarakat. Kepala sekolah menjadi pemimpin fasilitatif. (*building school-community partnership*, p. 34)

Kepala Sekolah menghargai dan melihat konteks yang lebih besar terhadap sekolah yang dipimpinnya. Kepala Sekolah yang dekat dengan para guru dan masyarakat akan mudah mempengaruhi mereka. Kebijakannya akan mudah didengar dan dilaksanakan. (Michael Fullan, p. 60). Tanpa dukungan aktif kepala sekolah, para guru merasa tidak didukung dan tidak dihargai. (Mavis G. Sanders, p. 36)

Manfaat hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat menurut E. Mulyasa (2003, p.51) adalah (1) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja; (2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing; (3) kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Tujuan hubungan antara sekolah dan masyarakat menurut E. Mulyasa (2003, p. 148) dapat ditinjau dari dua dimensi, yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kepentingan sekolah yaitu (1) memelihara kelangsungan hidup; (2) meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; (3)

memperlancar kegiatan belajar-mengajar; (4) memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program-program sekolah. Berdasarkan dimensi kebutuhan masyarakat yaitu: (1) memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat; (3) menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat; (4) memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang terampil dan makin meningkat kemampuannya.

Komite sekolah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pembentukan komite sekolah ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan terutama pendidikan anak di sekolah dan membantu sekolah. Hubungan sekolah dan komite sekolah merupakan mitra, sekolah diharapkan dapat terbantu dengan adanya komite sekolah.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Berbagai bentuk ideal atas partisipasi masyarakat dalam menunjang pendidikan telah dikemukakan oleh para ahli dalam bidang ini. Scheerens (2000), partisipasi masyarakat terhadap sekolah berhubungan yang erat terhadap proses pendidikan di sekolah. Bentuk partisipasi masyarakat yang dapat diwujudkan oleh masyarakat kepada sekolah yakni: 1) partisipasi pasif atau manipulatif. Partisipasi ini merupakan bentuk paling bawah, dimana karakter masyarakat dan orangtua hanya menerima pemberian tanpa ada keterlibatan mereka, serta mereka tidak mengetahui secara dalam tujuan dan sasaran partisipasi; (2) partisipasi informatif, masyarakat dan orang tua dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan sekolah dengan menjawab pertanyaan terkait dengan kebutuhan sekolah, namun tidak dilibatkan dalam proses dan pelaksanaannya; (3) partisipasi konsultatif, masyarakat dan orangtua berpartisipasi dengan cara berkonsultasi dengan pihak sekolah mengenai kebutuhan yang dihadapi sekolah; (4) partisipasi insentif, masyarakat dan orangtua memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, meskipun tidak terlibat dalam proses kegiatan sekolah; (5) partisipasi fungsional, masyarakat dan orangtua terlibat dalam kegiatan sekolah sesuai dengan fungsi yang diharapkan; (6) partisipasi interaktif, masyarakat dan orangtua berperan

Universitas Indonesia

dalam analisis perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan sekolah.

Bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Midgley (1986, p.39-44), yakni: “...empat model ideal atas hubungan partisipasi masyarakat dengan sekolah, di mana ada beberapa variasi pada masing-masing model ini.” Empat model yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) Model anti-partisipasi (*the anti-participatory mode*), Model ini dilandasi oleh teori elit dan marxisme yang beranggapan bahwa sekolah tidak membutuhkan masyarakat miskin sehingga mereka tidak menghendaki adanya peranserta dan kontrol masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolahnya. Bahkan segala kebijakan yang dilakukan oleh sekolah hanyalah mengatasnamakan kelas elit, sebagai kepanjangan tangan atas kepentingan dan dominasi kekuasaan yang mereka lakukan. partisipasi secara luas akan dilihat sekolah sebagai ancaman atas kebijakan yang mereka lakukan. (2) Model manipulatif (*the manipulative mode*), dalam model yang kedua ini, sekolah mendukung adanya partisipasi dari masyarakat tetapi mereka mempunyai motif tersembunyi di balik itu. Di antara motif tersebut adalah keinginan menggunakan partisipasi masyarakat untuk tujuan politis (peranserta masyarakat sebagai persyaratan dalam implementasi kebijakan yang digariskan oleh otoritas yang lebih tinggi) maupun untuk tujuan kontrol sosial yaitu masyarakat dapat difungsikan sebagai penyumbang dana untuk mengurangi biaya pengembangan pendidikan. (3) Model inkremental (*the incremental mode*), model inkremental ditandai dengan adanya dukungan kedinasan dari sekolah atas adanya partisipasi masyarakat, di antaranya dengan menyertakan wakil sekolah dalam badan yang terbentuk dalam bentuk partisipasi masyarakat tersebut, tetapi pola pendekatan kerjasama yang dilakukan masih bersifat ambivalensi. Pendekatan yang diterapkan dalam implementasi partisipasi masyarakat biasanya gagal untuk dapat menempatkan badan yang terbentuk dalam posisi yang seharusnya, artinya tidak adanya keseimbangan kekuasaan (*balancing of power*) atau pembagian kekuasaan (*power share*) antara sekolah dengan badan tersebut sehingga mereka tidak dapat berfungsi secara optimal. (4) Model partisipasi (*the participatory mode*), dalam model ini, sekolah mendukung sepenuhnya adanya partisipasi masyarakat karena mereka percaya bahwa adanya

partisipasi masyarakat akan memberikan berbagai keuntungan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan bersama. Dukungan tersebut dilakukan dengan menciptakan mekanisme-mekanisme yang diperlukan untuk keterlibatan masyarakat yang efektif dalam semua aspek pengembangan. Sekolah juga mensponsori kegiatan partisipasi tersebut dengan menyelenggarakan pelatihan dan training yang diperlukan, terutama kepada orang tua dan badan yang terbentuk.

Teori partisipasi masyarakat yang ketiga dikemukakan oleh Sarah White (1996). Dalam merefleksikan partisipasi masyarakat, Sarah White menjelaskan bahwa partisipasi dapat berupa luasnya kepentingan. Tidak cukup untuk menilai secara kritis konten proyek partisipasi dengan mengukur partisipasi melalui inklusi dua faktor yaitu “siapa yang berpartisipasi” dan “pada level apa”. Menurut White (1996) klarifikasi lebih jauh untuk mengukur partisipasi diperlukan dalam bentuk (*form*), fungsi (*function*) dan kepentingan (*interests*). Untuk lebih jelasnya teori partisipasi masyarakat tersebut dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3 : *Framework for Community Participation*

<i>Form</i>	<i>Top-Down</i>	<i>Bottom-UP</i>	<i>Function</i>
<i>Nominal</i>	<i>Legitimation</i>	<i>Inclusion</i>	<i>Display</i>
<i>Instrumental</i>	<i>Efficiency</i>	<i>Cost</i>	<i>Means</i>
<i>Representative</i>	<i>Sustainability</i>	<i>Leverage</i>	<i>Voice</i>
<i>Transformative</i>	<i>Empowerment</i>	<i>Empowered</i>	<i>Means/end</i>

Sumber : “*Depoliticising development: The uses and abuses of participation*” by S. White. 1996, *Development in Practice*, 6(1), p. 7. Copyright 1996 by Francis and Taylor. Reprinted with permission; Ternieden, 2009, p. 26

Dalam Tabel 3, Sarah White (1996) menyajikan tiga kriteria dalam memahami partisipasi masyarakat. Pertama, bentuk (*form*) dalam kolom pertama dengan empat jenis partisipasi. Kedua, kolom ke dua yaitu dari atas ke bawah (*top-down*) menunjukkan kepentingan sekolah dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, dari bawah ke atas (*bottom-up*) menunjukkan masyarakat dan bagaimana masyarakat memandang partisipasi. Kolom terakhir fungsi (*function*) menjelaskan seluruh fungsi bentuk partisipasi.

Kriteria pertama adalah bentuk (*form*) mengacu pada jenis partisipasi dan sifat masing-masing. Bentuk partisipasi terdiri dari (1) *Nominal*, (2) *Instrumental*, (3) *Representative*, dan (4) *Transformative*, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) *Nominal Participation* adalah bentuk minimal dari partisipasi masyarakat dan digunakan untuk taktik legitimasi oleh sekolah. Contohnya anggota masyarakat sekolah hadir dalam pertemuan di sekolah. *“The community’s participation is minimal. For example, community members attend meetings only in a functional sense.”*
- 2) *Instrumental Participation* adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung program. Contohnya adanya kontribusi masyarakat dalam bentuk tenaga, material, dan uang. *“Instrumental participation is when the community supports the project by giving labor, local materials, or cash). For example, The community uses tools such as labor or cash as instruments to participate in the project.”*
- 3) *Representative Participation* adalah bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam program. Contohnya keterlibatan aktif masyarakat dalam membuat perencanaan program. *Representative participation includes the community as an active participant in the project. For example, the community is asked to contribute by forming their own groups and creating plans for the project. Through this process community members increase their level for participation in the project by becoming more active participants.*
- 4) *Transformative Participation* adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengatur, membuat keputusan, dan

menjalankan suatu kegiatan. Dalam proses ini masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan yang penuh terhadap sekolah. *The community is empowered to manage, to make decisions, and to implement the project. The school acts as a facilitator not an initiator for the activity, and the community takes ownership for the project and determines goals and priorities. Through this process, community members experience a sense for ownership as full-fledged participants in subsequent decision making. (White, 1996; Ternieden, 2009, p. 27-28).*

Kriteria bentuk di atas, merupakan gambaran bentuk dari tingkatan partisipasi masyarakat, mulai dari Nominal, yaitu bentuk yang terendah, hingga Transformative, bentuk partisipasi masyarakat yang tertinggi. Bentuk partisipasi masyarakat dikatakan rendah ketika masyarakat hanya hadir di sekolah tanpa kontribusi lainnya, sementara dikatakan tinggi ketika masyarakat terlibat dalam mengatur, membuat keputusan, dan menjalankan suatu kegiatan. Setiap jenis partisipasi menggambarkan peningkatan level partisipasi aktif oleh masyarakat. *Each type for participation illustrates an increasing level for active participation by the community. (Ternieden, 2009, p. 28)*

Kriteria kedua adalah partisipasi masyarakat menurut sekolah (top-down) Kriteria ini memiliki empat karakteristik yaitu: *Legitimation, Efficiency, Sustainability, dan Empowerment*. Tingkat partisipasi masyarakat meningkat dengan tiap karakteristik, dari nominal ke partisipasi masyarakat yang sepenuhnya diberdayakan.

- 1) *Legitimation*. Menurut sekolah, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program cukup pada legitimasi. Legitimasi ini terbatas pada pajangan, tanpa mengharap adanya input dari masyarakat. *“A development project that has nominally created a women’s group without seeking community input or direction legitimizes the community participation project. The community’s participation is marginal”*.
- 2) *Efficiency*, sekolah menganggap penting partisipasi masyarakat dalam bentuk sesuatu seperti uang, tenaga, material. *“The NGO*

encourages the community to participate more fully in the project by contributing in kind labor or cash.”

- 3) *Sustainability*, pihak sekolah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan program, dan sekolah merespon suara masyarakat tersebut. *“The community participates more broadly in the plans for the project.”*
- 4) *Empowerment*, pihak sekolah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam mengelola, membuat keputusan, dan mengimplementasikan program. *“The community requires ownership for the project and its participation is more comprehensive”*.(White, 1996; Ternieden, 2009, p. 27)

Kriteria di atas, merupakan gambaran tingkat partisipasi masyarakat menurut sekolah, dimulai dari tingkat terendah yaitu *legitimacy* hingga tertinggi yaitu *empowerment*. Partisipasi masyarakat dikatakan rendah ketika sekolah hanya melegitimasi secara formal keterlibatan masyarakat, dikatakan tinggi jika sekolah tidak hanya melegitimasi keterlibatan masyarakat tersebut, namun mendorong dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola, membuat keputusan, dan mengimplementasikan program.

Kriteria partisipasi masyarakat yang ketiga adalah partisipasi masyarakat menurut masyarakat (*bottom-up*). Kriteria ini menjelaskan bagaimana masyarakat memandang partisipasi dengan empat karakteristik meliputi: Inklusi (*Inclusion*), Biaya (*Cost*), Pengaruh (*Leverage*), dan Pemberdayaan (*Empowerment*). Tingkat partisipasi meningkat dengan tiap karakteristik, dimana inklusi merupakan tingkat partisipasi terendah dan pemberdayaan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi.

- 1) Inklusi (*Inclusion*) adalah masyarakat memandang kontribusi mereka cukup dengan hadir dalam pertemuan. Contohnya masyarakat hadir dalam suatu pertemuan disekolah, namun mereka tidak berkontribusi dalam penyusunan program. *“Inclusion is the equivalent for going to a group meeting”*
- 2) Biaya (*Cost*) adalah masyarakat memandang kontribusi mereka dalam program adalah tenaga, material, dan waktu. *When communities are expected to contribute in kind labor or materials,*

Universitas Indonesia

time, and participation represent a cost to the the community. From the community's perspective a contribution for time and materials is a cost. Although not insignificant, the community's participation in the project is low.

- 3) Pengaruh (*Leverage*) adalah masyarakat memahami bahwa partisipasi mereka merupakan kekuatan keberhasilan program. Contohnya masyarakat tidak hanya hadir dalam rapat, namun juga aktif terlibat dalam diskusi tentang apa bentuk partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam program. *“The community understands that active participation ensures leverage to influence the project. The community might not only attend a meeting but also contribute to the discussion for how the community might participate in the project”*.
- 4) Pemberdayaan (*Empowered*) adalah jika agenda dan aksi datang secara langsung dari masyarakat, maka masyarakat akan merasa memiliki program tersebut. *The community is empowered when the agenda and action come directly from the community . From the community's viewpoint, it has become empowered to take ownership for the project and determine project priorities. Their participation is more comprehensive than the characteristic for leverage* (White, 1996; Ternieden, 2009, p. 28-29).

Kriteria di atas, menunjukkan gambaran tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan sudut pandang masyarakat dari tingkat yang terendah hingga tertinggi. Dikatakan rendah jika masyarakat menganggap partisipasi masyarakat cukup dengan hadir saja, dikatakan tinggi jika masyarakat menganggap penting untuk terlibat dalam pengelolaan program sehingga agenda dan aksi datang dari masyarakat.

Masing-masing kriteria terdiri atas empat tingkatan partisipasi masyarakat. Tingkat pertama, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pajangan (*display*). Tingkat kedua, partisipasi masyarakat meningkat dari bersifat pajangan kearah bentuk sesuatu, misalnya uang, material, dan tenaga. Tingkat ketiga, partisipasi

masyarakat meningkat ke arah keterlibatan dalam perencanaan program, artinya adanya keterlibatan aktif masyarakat menyumbangkan suaranya (*voice*) dalam perencanaan program. Sementara tingkat keempat berarti masyarakat lebih aktif berpartisipasi, karena masyarakat berperan sebagai pengelola program.

Dodd dan Konzal (2002) menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut bentuk partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, mereka menyebut tiga istilah untuk menggambarkannya, yaitu: "paradigma lama (*the old paradigm*), fase peralihan (*the transitional phase*) dan model sinergis (*the synergistic model*).

Paradigma lama (*the old paradigm*). Orang tua dalam keluarga, warga sekolah, dan warga masyarakat memiliki hubungan sesuai dengan kepentingan masing-masing dalam urusan pendidikan. Dalam paradigma lama ini, hubungan tripusat pendidikan berlangsung sebagai satuan pranata social yang berdiri sendiri dan berada dalam posisi terpisah. Paradigma lama ini pada umumnya masih mempertanyakan " apa yang orangtua, warga masyarakat, dan organisasi masyarakat dapat lakukan untuk sekolah".Paradigma ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Menitik beratkan pada kecakapan akademik dan pengetahuan
- 2) Hubungan sekolah terkontrol, komunikasi satu arah
- 3) Birokrasi, impersonal, dan terjadi komunikasi satu arah
- 4) Saling melindungi diri, defensive
- 5) Hirarkis, tidak semua orang dipandang sama
- 6) Perbedaan cultural dan social tidak mendapatkan perhatian secara wajar
- 7) Beberapa keluarga dan siswa termajinalisasi
- 8) Orangtua dipandang sebagai sumber masalah dan kritik
- 9) Masyarakat dipandang sebagai orang lain, kecuali diperlukan

Fase peralihan (*the transitional phase*). Hubungan antara sekolah dan orang tua telah berkembang sebagai hubungan kerja sama yang sudah interaktif. Paradigma transisional ini pada umumnya mempertanyakan " bagaimana orangtua, warga, masyarakat, organisasi sosial dapat membantu sekolah untuk melaksanakan tugas secara lebih baik". Pola hubungan dalam paradigma

transisional ini memiliki beberapa karakteristik yang agak berbeda dengan karakteristik paradigma lama, antara lain:

- 1) Menitik beratkan pada penguasaan akademik dan perkembangan individual siswa,
- 2) Hubungan sekolah diarahkan,
- 3) Kurang birokratis, lebih manusiawi, dan telah terjadi hubungan dua arah,
- 4) Proaktif,
- 5) Lebih inklusif
- 6) Perbedaan cultural dan social sudah memperoleh perhatian
- 7) Kerjasama dengan orang tua sudah terbentuk secara terbatas
- 8) Menjalin hubungan dengan masyarakat jika bermanfaat kepada sekolah
- 9) Guru mulai mengadakan penelitian tentang kegiatan belajar mengajar tetapi belum melibatkan orang keseluruhan, baik aspek akademis maupun orang tua dalam proses ini.

Paradigma Baru. Dalam paradigma baru telah memandang lembaga pendidikan sebagai milik bersama. dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan tanggungjawab bersama. Hubungan tripusat pendidikan dalam paradigma baru mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Menitikberatkan perhatian pada siswa secara keseluruhan, baik aspek akademis maupun perkembangan individual
- 2) Tidak ada batasan hubungan antara keluarga, sekolah dan masyarakat
- 3) Terjadi budaya menemukan, belajar, melindungi, dan membimbing; guru dan orang tua melaksanakan penelitian tindakan bersama-sama
- 4) Keikutsertaan secara personal
- 5) Tidak hirarkis, sepenuhnya inklusif, setiap orang merasa dirangkul
- 6) Berbeda budaya dan social dihargai dan dipelihara dengan baik
- 7) Terdapat kerjasama antara orangtua dan masyarakat
- 8) Orangtua dan warga sebagai patner

- 9) Menemukan manfaat bersama sebagai tujuan
- 10) Pilihan banyak dan cara untuk mencapainya juga banyak

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, baik bersifat spontan atau terorganisasi, secara sesaat atau berkelanjutan, serta dengan strategi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang dapat mendorong maupun faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet, 1992). Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Menurut Sanapiah Faisal dkk (2007) terdapat dua belas titik kunci untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah yaitu: pertama, school ownership, dimana semua warga masyarakat merasa memiliki sekolah sebagai kekayaan budaya dan simbol kemajuan peradaban yang bernilai tinggi. Kedua, persandaran pada nilai-nilai agama, partisipasi dipandang sebagai wujud amal sholeh yang dianjurkan agama; ketiga figur yang tepat dan dihormati, faktor ketokohan memiliki posisi startegis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Figur tokoh yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi di masyarakat, memiliki manajerial yang memadai, dan cukup paham persoalan pendidikan, merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk

Universitas Indonesia

terlibat dan turut bertanggung jawab terhadap kemajuan sekolah. Keempat ruang yang terbuka dan bebas, dalam arti masyarakat merasa memiliki tempat yang representatif untuk memberikan partisipasi secara bebas, dalam berbagai wujud. Kelima dukungan kebijakan, Dukungan kebijakan yang memadai terhadap pendidikan dapat merangsang keberfungsinya komite sekolah maupun dewan pendidikan. Dalam konteks ini, pemerintah tampil sebagai kekuatan yang memiliki kewenangan resmi untuk memberikan fasilitas, rangsangan, serta menunjukkan komitmen. Penyelenggaraan pendidikan secara spesifik serta manajemen sekolah merupakan domain manajemen sekolah dan masyarakat. Pemerintah tidak perlu ikut terlibat dan melakukan intervensi ke dalamnya. Keenam, pemaknaan masyarakat terhadap sekolah, pemaknaan sekolah dalam pikiran masyarakat menentukan corak, warna bentuk, dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Ketika masyarakat memandang, mendefinisikan, dan memaknai sekolah sebagai sebuah lembaga yang penting bagi kehidupan mereka dan masa depan anak-anak mereka, maka sekolah memiliki nilai yang tinggi; ketujuh budaya sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan terikat akan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai (Nawawi (1982) dalam Sagala (2006)). Ketika masyarakat memandang sekolah sebagai agen transformasi pengetahuan dan nilai-nilai, maka masyarakat memberikan makna positif terhadap sekolah. Sehingga masyarakat turut serta dalam memajukan institusi pendidikan melalui sekolah. Hal ini merupakan kondisi terciptanya budaya sekolah dalam masyarakat. Kedelapan, antara process dan input oriented, Input oriented mendapat perhatian yang lebih besar, sehingga lembaga sekolah mengabaikan proses. Hal ini terjadi karena kuat kecenderungan untuk membagnun citra sekolah dengan menjual prestasi siswa seperti nilai UN yang tinggi, siswa yang melanjutkan ke jenjang sekolah favorit. Kesembilan, kedermawanan dan kesukarelaan. Kesepuluh, pemahaman ide-ide dasar partisipasi, ide-ide dasar partisipasi terhadap sekolah perlu dipahami oleh masyarakat, pejabat pemerintah, sekolah dan komite sekolah, sehingga menginternalisasi hingga menjadi norma dan etos, maka akan mendorong mereka untuk berpartisipasi, kesebelas, sekolah dan masyarakat therapeutic, adanya pola hubungan sosial yang sangat terspesialisasikan dalam wujud klien-klien yang

begitu spesifik dalam kehidupan masyarakat modern, sehingga mereka cenderung mengabaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Keduabelas, komunikasi yang terinstitusionalisasi, terbangunnya hubungan yang komunikatif antara sekolah dengan seluruh komponen sosial di masyarakat.

Ternieden (2009) menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Faktor itu adalah fleksibilitas non pemerintah (NGO) yang melakukan pendampingan program pendidikan, keterlibatan pemerintah, harapan masyarakat atas manfaat dari program, keadaan budaya sosial dan ekonomi masyarakat, dan kepercayaan yang saling menguntungkan antara para pemangku kepentingan.

Hamijoyo (1993) menyatakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat antara lain: 1) masyarakat belum dapat menghayati atau merasakan masalah atau kepentingannya. Bisa juga masalah atau kepentingan terlalu dipaksakan dari atas atau dari luar, masyarakat mungkin merasakan adanya masalah atau kepentingan namun tidak ada tokoh atau pemerakarsa yang mampu mengangkatnya menjadi masalah atau kepentingan umum; 2) masyarakat atau tokoh terpercaya belum sanggup atau kurang berani mengajukan bentuk atau cara pemecahan masalah yang diterima secara luas atau yang secara teknis dan keuangan mungkin dapat dilaksanakan; 3) tujuan partisipasi masyarakat kurang jelas, mungkin karena manfaat atau tujuan pembangunan kurang jelas bagi masyarakat; 4) tidak ada organisasi dan pimpinan yang cukup handal untuk mengelola partisipasi masyarakat sehingga aspirasi dan potensi warga kurang tersalur secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, menunjukkan terdapat variasi tingkat partisipasi masyarakat, serta terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat kepada sekolah. Dari berbagai pendapat di atas, nantinya akan menjadi referensi pembanding terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan, sehingga sekolah akan mendapatkan masukan yang cukup banyak untuk merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap sekolah khususnya dalam pelayanan pendidikan.

2.2 Pelayanan Pendidikan di Sekolah

Kegiatan inti sekolah adalah mengelola sumber daya manusia dengan memberikan pelayanan pendidikan serta meningkatkan derajat kehidupan social masyarakat. berikut ini penjelasan mengenai pelayanan pendidikan di sekolah secara konseptual.

2.2.1 Pengertian Pelayanan Pendidikan

Pelayanan merupakan salah satu kegiatan dalam kehidupan manusia. Pelayanan memiliki banyak pengertian, mulai dari pelayanan sebagai personal maupun sebagai produk. Daviddow dan Uttal dalam Sugiyanto (2001,4) mengemukakan:

Pelayanan merupakan kegiatan/keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen/customer (yang dilayani), yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pengertian yang luas, pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan (*whatever enchanges customer satisfaction*).

Konsumen dalam pelayanan adalah masyarakat yang mendapatkan manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh organisasi.

Moenir (1988, p.17) mengemukakan bahwa pelayanan merupakan “proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung”. Hal ini dipertegas oleh Lukman (1999, p.6), pelayanan adalah “ suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Senada dengan Boediono (1999, p.60) bahwa “pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan”. Pelayanan (*service*) adalah memberikan kepada konsumen suatu nilai tambah (*value added*) dari produk barang/jasa (Buddy Ibrahim,2000, p.1). Pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan apa yang diperlukan oleh orang lain (Soetopo, 1999, p.4). Berdasarkan uraian di atas pelayanan dapat dikatakan sebagai proses pemenuhan kebetuhan kepada orang lain dalam interaksi langsung

dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Bagi pemberi pelayanan, sangatlah penting untuk memerhatikan tingkat kepuasan pelanggannya. Dalam tingkat kepuasan pelanggan hal-hal yang dapat dirasakan oleh pelanggan adalah: (1) Apabila kinerja atau hasil yang dirasakan di bawah harapan maka pelanggan akan merasa kecewa (2) Apabila hasil yang dirasakan sesuai dengan harapan maka pelanggan akan merasa puas (3) Apabila hasil yang dirasakan melebihi dari harapan, maka pelanggan akan merasa sangat puas. Agar pelayanan dapat memuaskan pelanggan, maka karyawan yang melayani harus dapat memenuhi empat persyaratan pokok, yakni: tingkah laku yang sopan, cara penyampaian, waktu penyampaian yang tepat, keramahan (Moenir, 2001, p. 197), maka pemberi pelayanan harus membangun suatu budaya organisasi, sehingga semua karyawan yang terlibat dalam memberikan pelayanan mempunyai tujuan yang sama yaitu memuaskan pelanggan.

Menurut Gasperz (1994) yang dikutip oleh Kurniawan (2005) pelayanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang, walaupun dalam konsep ekonomi pelayanan merupakan salah satu alat pemenuh kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Gasperz mengemukakan bahwa karakteristik pelayanan adalah outputnya yang tidak berbentuk (*intangible output*), tidak standar, serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi pada saat produksi. Produk akhir dari pelayanan tidak memiliki karakteristik fisik seperti barang, namun sangat tergantung dari proses interaksi yang terjadi antara layanan dengan konsumen.

Senada dengan Gasperz, Normann (1984) dalam Sugiyanto (2001,4) menjelaskan karakteristik pelayanan sebagai berikut:

- a. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- b. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tidak sosial.
- c. Produk dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.

Sedarmayanti (1999, p.195), mengemukakan bahwa setiap pelayanan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan, berbelit-belit (*time consuming*).
- b. Pelayanan diberikan secara jelas dan pasti, sehingga ada suatu kejelasan dan kepastian bagi pelanggannya dalam menerima pelayanan tersebut.
- c. Pemberian pelayanan senantiasa diusahakan agar pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- d. Memberikan pelayanan senantiasa memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang sudah ditentukan.
- e. Pelanggan setiap saat dapat dengan mudah memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pelayanan secara terbuka
- f. Dalam berbagai kegiatan pelayanan, baik teknis maupun administrasi, pelanggan selalu diperlakukan dengan motto "*customer is king and is always right*."

Berdasarkan penjelasan karakter pelayanan tersebut di atas, maka pelayanan merupakan sesuatu yang tidak berwujud namun dapat dirasakan. Karakter tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan pelayanan yang baik. Dan pelayanan yang baik adalah pelayanan yang memuaskan pelanggan. Boediono (1999, p.37) mengemukakan bahwa pelayanan yang baik adalah sebagai berikut:

Pelayanan yang dapat memberikan kepuasan yang optimal dan terus menerus bagi pelanggan yang mencakup 9 (sembilan) aspek yang menjadi keinginan dan harapan pelanggan. Keinginan dan harapan pelanggan tersebut adalah:

- a. Bebas membuat keputusan;
- b. Memperoleh hasil sesuai keinginan;
- c. Mempertahankan harga diri;
- d. Diperlukan secara adil;
- e. Diterima dan disambut secara baik;
- f. Diberitahu segala sesuatu yang terjadi;
- g. Merasa aman dan dilindungi haknya;
- h. Didudukan sebagai orang penting;
- i. Menuntun keadilan.

Pendidikan merupakan proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupan sosialnya dan membantu kebiasaan-kebiasaan dan kebudayaan serta kelembagaan social dari generasi ke generasi (Crow dan Crow yang dikutip oleh P.Ratnawati, 2001), sedangkan Drijarkara, (Sihombing 2002,p.10) mengatakan bahwa pendidikan adalah memanusiaakan manusia muda. Pengangkatan manusia muda ketaraf insani. Hal inilah yang merupakan perbuatan mendidik. Mendidikan adalah memintarkan dan juga menanam nilai-nilai moral pada peserta didik. Berdasarkan urai di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses social dalam memanusiaakan manusia melalui pembelajaran yang dilakukan dengan sadar, baik secara terencana maupun tidak. Proses pendidikan terdiri dari transfer of knowledge, transefer of value, transfer of skill, dan juga keseluruhan kegiatan yang dapat memanusiaakan manusia sehingga menjadi individu yang mampu mengembangkan dirinya dalam menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupannya. Pendidikan dapat juga dikatakan menjadi manusia yang memiliki ketrampilan hidup, yang meliputi keterampilan social (modal sosial), keterampilan ekonomi, keterampilan politik, keterampilan budaya (Sihombing, 2002)

Berdasarkan uraian di atas, maka pelayanan pendidikan merupakan proses pemenuhan kebutuhan dalam memanusiaakan manusia melalui pembelajaran yang terdiri dari *transfer of knowledge, transfer of value, transfer of skill* beserta aktivitas penunjangnya dalam interaksi langsung dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inpersonal untuk menciptakan kepuasan dan keberhasilan.

2.2.2 Sekolah Sebagai Institusi Pelayanan Pendidikan

Sekolah merupakan penyelenggaran pendidikan. Sekolah tidak hanya berupa ruang kelas atau gedung, namun memiliki peran yang lebih luas dalam konteks sekolah sebagai institusi. Menurut Nawawi (1982) dalam Sagala (2006) Sekolah merupakan lembaga pendidikan terikat akan norma dan budaya yang mendukungnya sebagai suatu sistem nilai. Reimer yang dikutip oleh Sagala (2006) mengemukakan bahwa sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok umur tertentu dalam ruang kelas yang dipimpin oleh

Universitas Indonesia

guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat. Menurut Gorton ((1976) yang dikutip oleh Sagala (2006) sekolah merupakan suatu sistem organisasi yang di dalamnya terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sekolah yang dikenal sebagai tujuan intruksional. Berdasrkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan kerjasama sejumlah orang dalam suatu lembaga yang terikat norma dan budaya untuk melayani kelompok umur tertentu dalam ruang kelas dimana pelaksanaannya dibimbing oleh guru melalui kurikulum yang bertingkat untuk mencapai tujuan instruksional.

Kegiatan inti sekolah adalah mengelola sumber daya manusia dengan memberikan pelayanan pendidikan serta meningkatkan derajat kehidupan social masyarakat. Kegiatan sekolah menekankan pada pembentukan kepribadian sebagai proses interaksi yang dinamis dalam masyarakat sekolah. Dalam mengelola interaksi sebagai proses dalam penyelenggaraan pendidikan, maka kepala sekolah sebagai manajer bertanggungjawab atas keseluruhan sistem sekolah dan selalu berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan maupun mutu hasil belajar (Sagala, 2006, p. 57)

Pelayanan pendidikan di sekolah merupakan proses pemenuhan kebutuhan akan pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada stakeholdernya dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan hubungan inpersonal untuk menciptakan kepuasan dan keberhasilan. Stakeholder sekolah adalah pelajar sebagai pelanggan atau klien eksternal utama, orangtua/kepala daerah/sponsor merupakan pelanggan eksternal kedua, pemerintah/masyarakat/bursa kerja adalah pelanggan eksternal ketiga, sedangkan guru/staf merupakan pelanggan internal (Salis, Edward, 2008). Pelanggan internal maupun eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas tenaga kerja, proses dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. Kerjasama antara sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan masyarakat perlu dilakukan untuk memperoleh kepuasan pelanggan dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan pendidikan yang dapat memuaskan pelanggan eksternal seperti tersebut di atas, maka kepala sekolah terlebih dahulu harus

memuaskan pelanggan internalnya, yaitu para guru, pustakawan, laboran, tenaga administrasi, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan. Para personil yang merupakan pelanggan internal inilah merupakan pihak penentu dalam mewujudkan sekolah yang bermutu. Guru adalah pelaksana kegiatan inti (core business) sekolah yaitu proses pembelajaran yang akan menentukan kualitas lulusannya. Pustakawan adalah SDM/personil yang memberikan layanan sumber pembelajaran tekstual untuk mendukung kegiatan akademik/pembelajaran. Laboran adalah personil/SDM yang mendukung kegiatan akademik/pembelajaran siswa pada skala laboratorium sebagai kelanjutan atau membuktikan berbagai teori yang telah dipelajari melalui pembelajaran literatur. Tenaga administrasi adalah kegiatan pendukung, agar kegiatan akademik/pembelajaran di sekolah, baik administrasi akademik maupun administrasi non akademik dapat berjalan dengan baik. Tenaga kebersihan sebagai personil/SDM sekolah yang mendukung agar suasana sekolah tetap asri dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dan tenaga keamanan bertanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah agar tetap aman dan terkendali.

Kepuasan pelanggan internal sekolah pada dasarnya adalah jika mereka dapat bekerja atau menjalankan tugas dengan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, mendapatkan kompensasi yang layak atas kinerja yang telah diberikan, baik dalam bentuk finansial, material maupun non material serta kesejahteraan secara luas. Sebagai wujud atau bukti adanya kepuasan pelanggan internal sekolah adalah para guru, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, tenaga kebersihan dan keamanan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai sistem, prosedur dan tata kerja yang telah ditentukan. Kepuasan pelanggan internal ini diharapkan mereka dapat mewujudkan kepuasan terhadap pelanggan eksternal sekolah.

2.2.3 Mutu Pendidikan

Menurut Wohlstetter and Briggs (1994) yang dikutip Patta Bundu (2009) sekolah yang bermutu bukanlah untuk sekolah, melainkan untuk anak didik dan masyarakat. Danim (2006) mengemukakan bahwa esensi sekolah harus memiliki standar mutu layanan minimal, terutama berhubungan dengan kinerja kepala

Universitas Indonesia

sekolah, guru, tata usaha, partisipasi masyarakat, etos belajar dan prestasi belajar siswa. Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh sejumlah aspek, mulai dari kondisi awal, masukan (input), aktivitas (process), manfaat (outcome), keluaran (output) hingga pada dampak (impact), pendapat Danim (2006: 53) tentang aspek-aspek yang mempengaruhi mutu pendidikan berikut:

“Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran, dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumberdaya manusia, seperti kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, sarana prasarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, dan deskripsi kerja. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan dan cita-cita. Mutu proses pembelajaran mengandung makna bahwa kemampuan sumberdaya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Hasil pendidikan dikatakan bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu”

Sekolah secara umum diharapkan dapat meningkatkan kualitas peserta didik. Terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya siswa menurut Djoyonegara yang dikutip oleh Mulyasa (2006, p.3) yaitu (1) sarana gedung; (2) buku berkualitas; dan (3) guru serta tenaga kependidikan yang profesional.

Senada dengan Aoer (2005,p.xlii-xliii) bahwa kadar ketangguhan lembaga pendidikan ditentukan oleh mutu sarana dan prasarana, mutu proses pembelajaran dan mutu tenaga pendidikan dan keguruan.

Mutu adalah kadar ketangguhan lembaga pendidikan untuk menghasilkan tamatan sesuai dengan harapan. Kadar ketangguhan ini ditentukan oleh (1) mutu sarana dan prasarana yang harus memenuhi kriteria penunjang upaya pendidikan, seperti gedung, buku pelajaran, alat peraga, perpustakaan, laboratorium, komputer dan alat interkasi modern harus tersedia, dan dapat

Universitas Indonesia

diandalkan, (ii) mutu proses pembelajaran, yang ditentukan oleh tiga hal, yaitu kurikulum, metode mengajar dan belajar, dan guru yang memanfaatkan kurikulum dan metode dalam berinteraksi dengan peserta didik, dan (iii) mutu tenaga pendidikan dan keguruan.

Sallis mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan, diantaranya adalah sarana dan prasarana, SDM, teknologi dan kepemimpinan.

“ada banyak sumber mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif”.

Menurut (Suryadi, 2009, p.207-208) terdapat empat tahap perkembangan satuan pendidikan dalam pemberian pelayanan pendidikan yang bermutu dimana oleh Suryadi tahapan perkembangan ini merupakan tahapan dalam pelaksanaan capacity building. Capacity building bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap satuan pendidikan secara berkelanjutan baik melaksanakan peran-peran manajemen pendidikan maupun peran-peran pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Empat tahap perkembangan pada setiap satuan pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap Pra-formal, satuan pendidikan yang belum memenuhi standar sumber daya pendidikan (guru dan tenaga kependidikan, sarana-prasarana, biaya) yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan secara minimal.

Tahap Formal; satuan pendidikan yang sudah memiliki sumber-sumber pendidikan yang memadai secara minimal. satuan pendidikan ini sudah mencapai standar secara minimal, seperti dalam jumlah kualifikasi guru, jumlah dan kualitas ruang kelas, jumlah dan kualitas buku pelajaran, jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan lainnya, dan Penyelenggaraan pendidikan dengan manajemen mutu terpadu adalah menyelenggarakan pendidikan dan biaya operasional pembelajaran yang dibutuhkan.

Tahap Transisional; satuan pendidikan yang sudah mampu memberikan pelayanan minimal pendidikan yang bermutu, seperti kemampuan

mendayagunakan sumber-sumber pendidikan secara optimal, meningkatnya kreativitas guru, pendayagunaan perpustakaan sekolah secara optimal, kemampuan untuk menambah anggaran dan dukungan fasilitas pendidikan dari sumber masyarakat, dan kemampuan lainnya yang mendukung best practices pelayanan pendidikan pada setiap satuan pendidikan.

Tahap Otonomi; satuan pendidikan sudah mampu memberikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan rata-rata kompetensi siswa sesuai dengan standar kemampuan lulusan dan akan senantiasa bertanggung jawab terhadap klien dan stakeholder pendidikan lainnya sebagai suatu satuan pendidikan yang benar-benar otonom.

2.2.4 Kemitraan Komite Sekolah dan Sekolah untuk Memberikan Mutu Layanan Pendidikan

Pendidikan sebagai sistem di suatu sekolah merupakan suatu keseluruhan yang utuh yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai sistem di suatu sekolah/lembaga pendidikan sub-sub sistemnya adalah kurikulum dan pembelajaran, organisasi dan kelembagaan, manajemen dan administrasi, keteganaan, peserta didik, pembiayaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat dan iklim/budaya sekolah. Kesembilan komponen atau subsistem dalam lembaga pendidikan tersebut tidak dapat dipisahkan, kesemuanya saling terkait, saling tergantung dan saling mempengaruhi. Tercapainya kurikulum dan suksesnya proses pembelajaran sangat terkait, tergantung dan dipengaruhi oleh 8 unsur/komponen/subsistem yang lainnya. Organisasi/lembaga sekolah akan dapat berdiri tegak jika, kurikulum dan pembelajaran, manajemen dan administrasi, ketenagaan, peserta didik, pembiayaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat dan iklim/budaya sekolah semuanya ada dan berjalan dengan baik. Manajemen dan administrasi pendidikan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh 8 unsur pendidikan lainnya. Ketenagaan akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, jika didukung oleh 8 unsur pendidikan lainnya. Peserta didik akan dapat belajar dengan baik, jika 8 unsur pendidikan itu ada dan berfungsi dengan baik. Demikian

Universitas Indonesia

pula pembiayaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat dan pembentukan budaya dan iklim sekolah yang mendukung semua mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 8 unsur lainnya.

Keterlibatan total semua warga sekolah berarti sekolah dalam hal ini kepala sekolah menyusun organisasi, menganalisis jabatan dan pekerjaan, menyusun uraian tugas, menempatkan orang sesuai latar belakang pendidikan dan keahliannya serta sesuai dengan beban tugas dan pekerjaannya secara merata. Semua warga sekolah diberikan tugas dan fungsi sesuai keahliannya, sesuai bakat dan minatnya. Sebesar atau sekecil apapun, semua warga sekolah harus dilibatkan, diberikan tugas, peran dan fungsi dalam peningkatan mutu sekolah, mulai dari kepala sekolah itu sendiri, komite sekolah, para guru, staf tata usaha, pustakawan, laboran, siswa dan orang tua. Pelibatan semua warga sekolah itu harus berlangsung mulai dari *planning, organizing, staffing, directing, commanding, coordinating, communicating, budgeting, leading, motivating, compensating* dan sampai kepada *controlling*. Dengan pelibatan tersebut, maka mereka akan menjalankan tugas, peran dan fungsi serta pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh komitmen. Pelibatan semua warga sekolah merupakan bentuk pemberian kepuasan kepada pelanggan internal agar mereka mau dan mampu memberikan layanan pendidikan yang memuaskan bagi pelanggan eksternalnya. Pelibatan warga sekolah itu dalam seluruh proses atau kegiatan.

Mutu pelayanan pendidikan dapat maksimal, jika pihak sekolah dan komite sekolah dapat bersinergi untuk bersama-sama merancang, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program-program yang telah dijalankan oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan kepuasan pelanggan yaitu siswa dan orang tua siswa. Kerjasama, koordinasi dan komunikasi stakeholder internal sekolah meliputi kepala sekolah, guru, dan komite sekolah harus selalu dalam koordinasi, komunikasi, dan soliditas yang tangguh sehingga tercipta kerjasama tim yang baik untuk mencapai tujuan sekolah.

Perbaikan berkelanjutan, baik produk lulusannya, penyelenggaraan atau layanannya, sumber daya manusia (SDM) yang memberikan layanan, yaitu kepala sekolah, para guru dan staf, proses layanan pembelajarannya dan lingkungannya. Salah satu tujuan TQM adalah mengubah institusi yang mengoperasikan

pendidikan menjadi tim yang ikhlas, tanpa konflik dan kompetisi internal, untuk meraih sebuah tujuan tunggal yaitu memuaskan pelanggan. (Salis, Edward, 2008).

2.3 Penelitian Terdahulu

2.3.1 Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 236 Kotamadya Jakarta Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh Nurdin pada tahun 2006 di SMPN 236 Kotamadya Jakarta tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam rangka peningkatan pelayanan di sekolah. Metode yang digunakan adalah metode deskripsi dengan teknik pengumpulna data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumntasi. Data penelitian diperoleh dari Kepala Sekolah dan Guru sebagai unit analisis data selanjutnya akan dibandingkan dengan teori yang relevan untuk mendapatkan gambaran yang dapat ditafsirkan sebagai temuan penelitian untuk mendapatkan hasil, temuan, dan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pelayanan di SMPN 236 Jakarta Timur dengan ditandai oleh bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan sikap dan bakat siswa yang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program kegiatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila manajemen berbasis sekolah dilakaksanakan dengan baik, maka pelayanan dapat meningkat. Disamping itu SMPN 236 dapat memberdayakan potensi masyarakat dalam bentuk keterlibatan penyusunan program kegiatan sekolah melalui pengambilan keputusan partisipasi. Bentuk keterlibatan lainnya adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah berupa bantuan moril, material, dan finansial sebagai upaya membantu pihak sekolah dalam meningkatkan pelayanan.

2.3.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah

Penelitian yang dilakukan oleh Patta Bundu telah diterbitkan oleh jurnal pendidikan dan kebudayaan tahun 2009 ini berupa penelitian kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Universitas Indonesia

dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode survei dan riset pengembangan yang dilaksanakan pada sebelas kabupaten/kota sebagai sampel penelitian. Metode survei dilakukan menggunakan instrumen kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperoleh baseline data yang diperlukan untuk mengembangkan model partisipasi masyarakat dengan sumber data dari sekolah (SD, SMP, dan SMA) dan masyarakat (orang tua siswa, masyarakat lokal, profesional, dunia usaha, dan tokoh masyarakat). Hasil penelitian yang dilakukan Patta Bundu menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, transparansi dan akuntabilitas program. Model yang dihasilkan disebut “model kemitraan bersinergi” yang bertumpuan pada partisipasi saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat dapat memiliki sekolah dengan mutu pendidikan yang baik dan pengelola sekolah akan bekerja optimal dengan dukungan semua unsur dalam masyarakat. Disamping itu, model ini dapat dijadikan acuan bagi pengambilan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar dan menengah.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia (SDM) yang dapat memacu daya saing bangsa pada era globalisasi. Pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan merupakan investasi produktif untuk meningkatkan daya saing bangsa dan produktivitas bangsa dalam berbagai sektor pembangunan.

2.3.3 Kontribusi Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah. (Studi Deskriptif Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumedang)

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Ecep Idris tahun 2009 adalah bagaimana kontribusi kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Peningkatan mutu pembelajaran di sekolah merupakan ujung tombak pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan pendidikan. Dalam hal ini sangat penting dipahami bersama bahwa kinerja komite sekolah yang baik akan sangat ditentukan oleh seberapa harmonis dalam

Universitas Indonesia

melakukan kerjasama kemitraan dengan kepala sekolah sebagai pelaksana pendidikan, yang secara langsung mengelola pendidikan di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui gambaran nyata tentang kinerja komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah dasar negeri di kabupaten Sumedang; (2) mengetahui gambaran nyata tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah; (3) mengetahui besarnya kontribusi kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap peningkatan mutu pembelajaran pada sekolah dasar negeri di kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian adalah guru SD negeri di kabupaten Sumedang sebanyak 7.471 responden, yang diambil sampel sebanyak 100 responden. Sampel diambil dari empat kecamatan di kabupaten Sumedang. Data di jaring melalui instrumen berupa kuesioner penelitian yang dibagikan kepada guru SDN di empat kecamatan tadi. Sampel acak diambil dengan cara membagikan kuesioner pada kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) di masing-masing kecamatan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa, (1) kinerja komite sekolah berkorelasi dengan r sebesar 0,53%, dan memberikan kontribusi dengan nilai koefisien determinasi sebesar 28,10%; (2) kepemimpinan kepala sekolah berkorelasi dengan r sebesar 0,626, dan nilai koefisien determinasi sebesar 39,20%; (3) kinerja komite sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah memiliki korelasi sebesar 0,676. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi perubahan variabel Y dengan persamaan $Y=4,550+0,051X_1+0,395X_2$.

Rekomendasi yang diberikan adalah; (1) kerjasama yang harmonis antara komite sekolah dan kepala sekolah mutlak diperlukan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah; (2) kepala sekolah perlu memiliki kompetensi kepemimpinan yang memadai sebagai bekal untuk melaksanakan upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

2.3.4 Kajian Keberadaan Dewan Sekolah Di Kota Bandung

Kajian ini dilakukan kerjasama antara kantor Litbang dengan PT. Mitra Kawasa Konsulindo pada tahun 2005. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui

Universitas Indonesia

sejauh mana keberhasilan Komite Sekolah di Kota Bandung dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kajian ini disusun berdasarkan analisis terhadap beberapa hal yang teridentifikasi dari data sekunder dan data primer yang didapat dari hasil survey lapangan dan survey instansional dengan pertimbangan data dan kondisi eksisting, tinjauan pustaka serta issue-isue yang berkembang seperti harapan dan keluhan masyarakat dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan tingkat dasar dan menengah, serta masukan dari narasumber dan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan studi.

Menurut kajian ini keberadaan komite sekolah di kota Bandung masih sangat dibutuhkan, meskipun hingga saat ini kinerja komite sekolah belum sesuai harapan, karena masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja, efektivitas organisasi, maupun peran dan fungsi komite sekolah yang timbul dari lingkungan eksternal maupun internal. Kebijakan optimalisasi peran dan fungsi komite sekolah sebagai langkah strategis untuk mencapai hasil yang diharapkan tentunya sangat dibutuhkan. Kebijakan ini merupakan langkah kebijakan yang memiliki peranan dan implikasi penting dalam memenuhi kebutuhan terwujudnya program pendidikan di sekolah yang sesuai dengan konsep MBS.

Pada kajian ini diketahui bahwa dari empat peran komite sekolah, peran pertimbangan, dan peran pengendalian dianggap telah berhasil dilaksanakan, sedangkan peran pendukung dan peran penghubung kurang berhasil. Komite sekolah ditingkat sekolah dasar lebih kecil keberhasilannya dibanding dengan tingkat sekolah menengah. Pemahaman komite sekolah terhadap regulasi yang diterapkan pemerintah sudah cukup memadai, namun dalam realisasi pelaksanaan kegiatan kurang efektif karena adanya: perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang diterbitkan; rentang waktu yang cukup lama antara penerbitan regulasi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya; kurangnya sosialisasi program dan regulasi kepada seluruh komite sekolah.

Rekomendasi hasil kajian antara lain: perlu dilakukan kajian ulang terhadap regulasi yang berkaitan dengan dasar hukum komite sekolah; perlu diprioritaskan kegiatan sosialisasi terhadap regulasi dan petunjuk pelaksanaan teknis komite sekolah; perlu dilakukan studi penataan kelembagaan komite sekolah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi, serta struktur

organisasi pemerintah kota; perlu adanya evaluasi kinerja komite sekolah; pelatihan dan workshop bagi anggota komite sekolah; dibentuk wadah organisasi formal sebagai sarana fasilitasi dan mediasi bagi pengembangan program komite sekolah; serta perlu penyusunan sistem informasi manajemen Sekolah Berbasis Kinerja.

Berikut disajikan ringkasan hasil penelitian terdahulu ini dalam bentuk table sehingga lebih mempermudah pemahaman terhadapnya.

Tabel 4 : Ringkasan Penelitian Terdahulu Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan

Sumber, Penerbit, Tahun	Penulis dan Judul	Fokus Kajian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Universitas Negeri Jakarta, 2006	Moh Nurdin, Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 236 Kotamadya Jakarta Timur	Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dalam rangka peningkatan pelayanan di sekolah	Metode deskripsi dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi	Terdapat peningkatan pelayanan di SMPN 236 Jakarta Timur dengan ditandai oleh bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan sikap dan bakat siswa yang didukung oleh pendanaan yang bersumber dari pemerintah dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program kegiatan sekolah.
Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2009	Patta Bundu, Partisipasi Masyarakat dalam	mengembangkan model partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar	Metode survei dilakukan menggunakan	partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh factor sosialisasi, transparansi dan akuntabilitas program.. Model yang dihasilkan

Universitas Indonesia

Sumber, Penerbit, Tahun	Penulis dan Judul	Fokus Kajian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Pendidikan Dasar dan Menengah	dan menengah di Indonesia	instrumen kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD)	disebut “model kemitraan bersinergi” yang bertumpuan pada partisipasi saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat. Masyarakat dapat memiliki sekolah dengan mutu pendidikan yang baik dan pengelola sekolah akan bekerja optimal dengan dukungan semua unsur dalam masyarakat.
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2009	Ecep Idris, Kontribusi Kinerja Komite Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah	Kontribusi Kinerja Komite Sekolah Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah. (Studi Deskriptif Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumedang)	Metode adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	(1) kerjasama yang harmonis antara komite sekolah dan kepala sekolah mutlak diperlukan dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah; (2) kepala sekolah perlu memiliki kompetensi kepemimpinan yang memadai sebagai bekal untuk melaksanakan upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
Litbang Kota Bandung, 2005	Litbang Kota Bandung dengan PT. Mitra Kawasa	Mengetahui sejauh mana keberhasilan Komite Sekolah di Kota Bandung dalam	Survey	Keberadaan komite sekolah di kota Bandung masih sangat dibutuhkan, meskipun hingga saat ini kinerja komite sekolah belum sesuai harapan,

Universitas Indonesia

Sumber, Penerbit, Tahun	Penulis dan Judul	Fokus Kajian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Keberadaan Dewan Sekolah Di Kota Bandung Konsulindo,	menjalankan peran dan fungsinya.		karena masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi kinerja, efektivitas organisasi, maupun peran dan fungsi komite sekolah yang timbul dari lingkungan eksternal maupun internal.

Dari berbagai hasil penelitian yang telah disajikan dalam bentuk tabel di atas dapat di peroleh beberapa hal penting. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, menunjukkan berbagai bentuk partisipasi masyarakat dan variasi tingkat partisipasi masyarakat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi di sekolah. Hasil penelitian di atas, nantinya akan menjadi referensi pembandingan terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Sehingga sekolah akan mendapatkan masukan yang cukup banyak untuk merancang strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pendidikan lainnya.

2.4 Kerangka Konsep

Pada penelitian ini, berdasarkan pendapat beberapa ahli yang telah dipaparkan maka partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan merupakan proses pelibatan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial (perencanaan dan pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan) yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Partisipasi masyarakat dilihat dari keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam penyusunan dan keputusan kegiatan. keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam pelaksanaan pelayanan, dan keterlibatan komite sekolah dan orang tua siswa dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah. Partisipasi akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1)

Universitas Indonesia

adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet, 1992). Sekolah sebagai pemberi kesempatan untuk berpartisipasi dilihat dari usaha sekolah memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Usaha sekolah adalah kemampuan sekolah untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dengan berkomunikasi dengan masyarakat mengenai program sekolah dan kemajuan siswa, melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pembuatan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan serta merespon masukan, kritik, dan keluhan dari masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat diukur menggunakan teori Sarah White, karena dapat melihat partisipasi masyarakat dari kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat. Sekolah merasa berkepentingan dengan partisipasi masyarakat sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Masyarakat berkepentingan berpartisipasi karena ada yang dibutuhkan dari sekolah yaitu pelayanan pendidikan untuk anak-anak mereka, sehingga masyarakat ada kemauan dan kemampuan untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dapat menyelenggarakan layanan kemitraan pembelajaran sebagai sarana bagi siswa untuk membantu masyarakat atau organisasi masyarakat untuk membantu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut beberapa aspek yang digunakan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah.

Tabel 5 : Operasionalisasi Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan di Sekolah

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Sumber Data		Ukuran Partisipasi Masyarakat	Referensi
					Informan	Dokumen		
Partisipasi Masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah	Keterlibatan dalam penyusunan perencanaan dan pembuatan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Hadir dalam pertemuan penyusunan RAPBS • Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS • Komite sekolah ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah • Memberikan usulan kegiatan kepada sekolah 	Primer dan sekunder	Wawancara mendalam dan studi dokumentasi	Komite sekolah, kepala sekolah	RAPBS	Teori partisipasi masyarakat Sarah White (1996) Pertama bentuk partisipasi (<i>form</i>), kedua, proses partisipasi dari atas ke bawah (<i>top-down</i>), ketiga, proses partisipasi dari bawah ke atas (<i>bottom-up</i>). Keempat,	World Bank (2005); Sarah White (1996); Epstein (1994)
		<ul style="list-style-type: none"> • Hadir dalam pertemuan penyusunan RAPBS • Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah secara langsung atau melalui komite sekolah. 	Primer dan sekunder	Wawancara mendalam dan studi dokumentasi	Orang tua	Daftar hadir pertemuan		
	Keterlibatan dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan dalam proses pembelajaran 	Primer	Wawancara	Komite	Profil		World

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Sumber Data		Ukuran Partisipasi Masyarakat	Referensi
					Informan	Dokumen		
	pelaksanaan pelayanan di sekolah	kepada guru <ul style="list-style-type: none"> • Komite sekolah mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah • Memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah • Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah 	dan sekunder	mendalam dan studi dokumentasi	sekolah, kepala sekolah	sekolah, RAPBS,	partisipasi ditinjau dari aspek fungsinya	Bank (2005); Sarah White (1996); Epstein (1994)
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan dalam proses pembelajaran kepada guru • Memberikan sumbangan dana untuk sarana prasarana, dan kegiatan sekolah. • Memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan belajar mengajar • Menyiapkan anak untuk 	Primer dan sekunder	Wawancara mendalam dan studi dokumentasi	Orang tua	RAPBS		

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Sumber Data		Ukuran Partisipasi Masyarakat	Referensi
					Informan	Dokumen		
		sekolah						
	Keterlibatan dalam mengontrol pelaksanaan pelayanan di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah • Memantau pelaksanaan program sekolah • Memantau hasil pendidikan (UN, angka partisipasi sekolah, angka mengulang sekolah) 	Primer dan sekunder	Wawancara mendalam dan studi dokumentasi	Komite sekolah, kepala sekolah	Profil sekolah, laporan kegiatan		
		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan, dan kritikan tentang pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah 	Primer	Wawancara mendalam	Orang tua			
Partisipasi masyarakat menurut sekolah		<ul style="list-style-type: none"> • Merespon masukan, kritik dan keluhan dari komite sekolah dan orang tua siswa • Kepala sekolah bersama Komite sekolah mengesahkan RAPBS • Melakukan komunikasi 	Primer dan sekunder	Wawancara mendalam dan studi dokumentasi	Kepala sekolah dan Guru, komite sekolah	Dokumen rencana pengembangan sekolah		Sarah White (1996); Epstein (1994)

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Sumber Data		Ukuran Partisipasi Masyarakat	Referensi
					Informan	Dokumen		
		<p>dengan komite sekolah dan orang tua siswa mengenai program sekolah dan kemajuan siswa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guru dan orang tua berbagi untuk membantu anak dalam kegiatan pembelajaran • Menyampaikan hasil belajar siswa 						

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pembahasan mengenai metodologi penelitian ini mencakup beberapa hal penting seperti: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, tahap – tahap penelitian, sumber data, jenis dan prosedur pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data dan analisis data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan positivism dengan metode pengumpulan data kualitatif. Melalui pendekatan ini karena penelitian berangkat dari teori, sedangkan metode pengumpulan data kualitatif karena data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir dan pandangan subjek penelitian sehingga memperoleh gambaran yang mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah dan usaha sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang menyajikan gambaran partisipasi masyarakat dengan melihat latar belakang sosial dan hubungan antara sekolah, komite sekolah dan masyarakat secara terperinci. Pemilihan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara mendalam partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dengan kata lain tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah.

3.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut ini akan dijelaskan mengenai data primer dan data sekunder beserta metode pengumpulan datanya:

Data primer diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara. Wawancara mendalam digunakan untuk melihat realitas dari sudut pandang komite sekolah, orang tua siswa, kepala sekolah dan guru yang menjadi informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi khusus secara langsung dari para informan agar mendapatkan informasi yang lebih bermakna. Wawancara dilakukan dengan secara terbuka dengan menggunakan petunjuk umum wawancara. Wawancara dibantu dengan menggunakan tape recorder. Informan adalah

Data sekunder tidak didapatkan langsung dari obyek penelitian. Peneliti memperoleh data sekunder dengan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku tentang Komite Sekolah (petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis), arsip komite sekolah, dokumen RAPBS, profil sekolah, peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan yaitu Undang-undang Otonomi Daerah No.22 Tahun 1999, Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Studi kepustakaan ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan kerangka teori yang sesuai dengan topik penelitian agar terarah dan sistematis.

3.4 Sumber Data

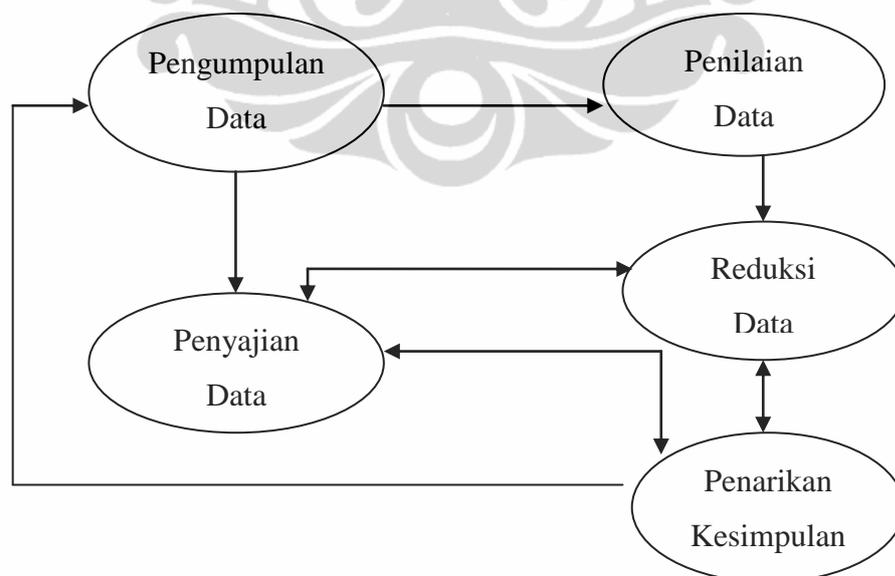
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu; (1) Informan yaitu Ketua Komite Sekolah SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor, 2 orang tua siswa SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor, Kepala Sekolah SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor, dan 2 orang Guru SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor; (2) Dokumen, yaitu informasitertulis yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dokumen

Universitas Indonesia

berupa buku-buku tentang Komite Sekolah (petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis), arsip komite sekolah, dokumen RAPBS, profil sekolah, peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan yaitu Undang-undang Otonomi Daerah No.22 Tahun 1999, Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Proses analisis pada penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data yaitu dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilakukan yang dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilustrasi partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui berbagai sumber yang layak dan sesuai (signifikan) kemudian diolah secara sistematis. Data yang dianalisis diperoleh dari hasil wawancara, mengedit, mengkasifikasikan, menilai, mereduksi dan selanjutnya menyajikan data serta menyimpulkan data. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.



Gambar 1: Teknik Analisis Data

Sumber: Miles B.B dan A. M. Huberman (1997:18)

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melalui proses reduksi data, yaitu mengkategorikan dan mengelompokkan data yang lebih penting dari hasil wawancara, studi pustaka maupun dokumen. Dari lokasi penelitian, data dan laporan lapangan keudian direduksi, dirangkum dan dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting, lalu dicari tema atau polanya. Reduksi data dilakukan secara bertahap dengan cara menyusun ringkasan data menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang diperoleh di *cross check* melalui komentar informan yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara lanjutan. Misalnya keterangan yang diterima dari kepala sekolah akan dibandingkan dengan keterangan yang didapat dari orangtua siswa. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar diberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.
2. Penyajian data, yaitu penyajian data setelah direduksi agar mudah dipahami baik dalam bentuk gambar maupun tabel. Penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi dari responden menjadi pernyataan. Penyajian data juga dimaksudkan untuk lebih mempermudah bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau data-data tertentu dari penelitian. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori sejenis, misalnya data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang antara lain terkait dengan partisipasi masyarakat, dan ruang lingkupnya sesuai dengan yang dibutuhkan, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada saat data direduksi.
3. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang disajikan disesuaikan dengan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan akan

bertolak dari hal-hal yang khusus sampai kepada rumusan kesimpulan yang sifatnya umum.



BAB 4

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, PELAYANAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DAN KOMITE SEKOLAH

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah, dengan fokus penelitian partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor di Kecamatan Jatinangor, dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian sebagai berikut.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah SD Cibeusi dan SDN Jatinangor di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pada Gambaran umum membahas keadaan geografis, demografis, pembangunan serta pendidikan di kecamatan Jatinangor.

4.1.1 Keadaan Geografis dan Demografis

SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor berada di Kecamatan Jatinangor. Kecamatan Jatinangor adalah sebuah kawasan yang terletak di sebelah timur Kota Bandung, merupakan satu dari 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Jatinangor sebelumnya bernama Kecamatan Cikeruh. Sejak tahun 2000 nama itu diganti menjadi Kecamatan Jatinangor dengan alasan nama tersebut terasa lebih familiar dan lebih populer dikenal khalayak ramai serta warga masyarakat.

Jatinangor sendiri adalah nama blok perkebunan di kaki Gunung Manglayang yang kemudian dijadikan kompleks kampus sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Padjadjaran. Dari Topografische Kaart Bland L.XXV tahun 1908 dan Bland H.XXV tahun 1909 yang diterbitkan oleh Topografische Dienst van Nederlands Oost Indie, telah dijumpai nama Jatinangor di tempat yang sekarang juga bernama Jatinangor. Ketika itu, daerah Jatinangor termasuk ke dalam Afdeeling Soemedang, District Tandjoengsari. Nama Cikeruh sendiri diambil dari sungai (Ci Keruh) yang melintasi kecamatan tersebut. Pada Peta

Universitas Indonesia

Rupabumi Digital Indonesia Nomor 1209-301 Edisi I tahun 2001 Lembar Cicalengka yang diterbitkan oleh Bakosurtanal masih dijumpai nama Kecamatan Cikeruh untuk daerah yang saat ini dikenal sebagai Kecamatan Jatinangor. Pada beberapa dokumen resmi dan setengah resmi saat ini, masih digunakan nama Kecamatan Cikeruh.

Adapun letak geografis dari Kecamatan Jatinangor ini adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukasari.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cimanggung dan Kabupaten Bandung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sari.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung

Kecamatan Jatinangor ini terletak pada koordinat $107^{\circ} 45' 8,5''$ - $107^{\circ} 48' 11,0''$ BT dan $6^{\circ} 53' 43,3''$ - $6^{\circ} 57' 41,0''$ LS. Wilayah Jatinangor memiliki luas $\pm 26,20$ Km² dengan karakteristik wilayah perkotaan hampir 80% dari keseluruhan 12 desa, meliputi 4 desa kawasan agraris (Cileles, Cilayung, Jatiroke, Jatimukti), 4 desa kawasan pendidikan (Hegarmanah, Cikeruh, Sayang, Cibeusi) dan 4 desa kawasan industri (Cisempur, Cintamulya, Cipacing, Mekargalih). SDN Cibeusi berada di Desa Cibeusi dan SDN Jatinangor berada di Desa Sayang yang merupakan kawasan pendidikan.

Sebagaimana daerah lain di kawasan Cekungan Bandung iklim di Jatinangor adalah iklim tropis pegunungan. Titik terendah di kecamatan ini terletak di daerah Desa Cintamulya setinggi 675 m di atas permukaan laut, sedangkan titik tertingginya terletak di puncak Gunung Geulis setinggi 1.281 m di atas permukaan laut. Sungai-sungai penting di Jatinangor meliputi Ci Keruh, Ci Beusi, Ci Caringin, Ci Leles, dan Ci Keuyeup.

Kecamatan Jatinangor merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak untuk kabupaten Sumedang yaitu banyak 92.741 jiwa. Kecamatan Jatinangor juga merupakan wilayah terpadat yaitu sebesar 3.540 jiwa per km².

4.1.2 Pembangunan

Pembangunan di Kecamatan Jatinangor mengacu kepada tujuan pembangunan regional Jawa Barat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang tangguh, cerdas, terampil dan mandiri, produktif, kreatif, inovatif serta berorientasi ke masa depan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Termasuk dalam proses pembangunan ini adalah usaha masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, tidak saja berupa kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian dan perumahan tetapi juga kebutuhan non fisik seperti pendidikan, status sosial dan kesempatan kerja.

Pencapaian kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat sementara ini dilakukan melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan indikator utamanya adalah Indeks Pengetahuan/Pendidikan, Indeks Peluang Hidup (Kesehatan) dan Indeks Paritas Daya Beli. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi pokok pembangunan manusia yang dilakukan pada suatu wilayah dengan mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Ketiga kemampuan dasar penduduk tersebut adalah berpengetahuan dan berketerampilan; berumur panjang dan sehat, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan di kecamatan Jatinangor.

Tabel 6 : Indeks Pembangunan Manusia Bidang Pendidikan di Kecamatan Jatinangor

PARAMETER	2009	
Jumlah Anak Dalam Kelompok 0 -3 Tahun yang terlayani dalam kegiatan PAUD	7.757 / 612	7,89%
Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun yang mengikuti Program TK/RA	4.505 / 1.350	30%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI,SDLB dan Paket A	7.705 /	125,6%

Universitas Indonesia

PARAMETER	2009	
		9.684
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/SMPLB dan Paket B		108%
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMALB dan Paket C		48%
Angka Melanjutkan Lulusan SD/MI, SDLB dan Paket A		79%
Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTS, SMPLB dan Paket B		87%
Angka Melanjutkan Lulusan SMA/SMK/SMALB dan Paket C		39%
Angka Putus Sekolah (APS) untuk murid SD-MI pada Tahun 2009	0 / 9.337	100%
Angka Putus Sekolah (APS) untuk murid SMP-MTs pada Tahun 2009		
Angka Putus Sekolah (APS) untuk murid SMA-SMK pada Tahun 2009		0,21%
Rata-rata rasio jumlah guru SD-MI dengan murid SD-MI	405 / 9.684	23,91% / 1:24
Rata-rata rasio jumlah guru SMP-MTs dengan murid SMP-MTs		
Jumlah penduduk buta aksara dalam kelompok usia 15-44 Tahun	637 / 660	96,97%
Jumlah Penduduk Buta Aksara Diatas 44 Tahun	10 / 15	66,66

Sumber : <http://jatinangor-bersinar.com/>

Kecamatan Jatinangor merupakan wilayah Kabupaten Sumedang bagian barat. Kecamatan Jatinangor terdapat Kawasan Pendidikan Tinggi dan telah berdiri berbagai perguruan tinggi yang berskala nasional, seperti STPDN, UNPAD, IKOPIN dan UNWIM. Dalam kerangka kebijakan Provinsi Jawa Barat maupun kebijakan nasional wilayah ini telah dijadikan kawasan perguruan tinggi yang merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan bagi pemanfaatan sumber daya alam dan kapasitas masyarakat lokal untuk bisa bersaing pada era globalisasi dan perdagangan bebas. Keberadaan kawasan Perguruan Tinggi tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, baik terhadap kondisi ekonomi maupun sosial

Universitas Indonesia

budaya, terutama pada bidang pendidikan itu sendiri. Dilihat dari perspektif pembangunan pendidikan, posisi kewilayahan yang strategis sebagaimana tersebut akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi pencapaian masyarakat berpendidikan yang cerdas.

4.2 Gambaran Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor. Pada Gambaran pelayanan pendidikan membahas kondisi sekolah, profil sekolah, sarana dan prasarana sekolah, bahan ajar, kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan, kurikulum, dan prestasi siswa.

Pelayanan Pendidikan di SDN Cibeusi secara umum cukup baik dimana kurikulumnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan, kualitas maupun kompetensi SDM yang cukup baik, sarana dan prasarana yang memadai, Lingkungan sekolah aman dan tertib, serta prestasi akademik maupun non akademik yang dapat dikatakan tinggi . Sedangkan Pelayanan Pendidikan di SDN Jatinangor secara umum cukup baik meskipun masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurikulumnya yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Lingkungan sekolah aman dan tertib. Akan tetapi kualitas maupun kompetensi SDM masih kurang memadai dimana Tenaga TU merangkap guru. Penatausahaan dilakukan dengan manual belum memakai computer. Kemudian, sarana dan prasarana yang kurang memadai dimana SDN Jatinangor tidak memiliki perpustakaan. Prasarana dan sarana tidak lengkap dan memadai, belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Lingkungan sekolah tertib tetapi belum cukup aman, karena pagar sekolah hanya ditanami tanaman, jalan masuk ke sekolah hanya berupa jalan setapak dan agak masuk ke perkebunan. Selain itu baik peserta prestasi akademik maupun non akademik yang belum dapat dikatakan tinggi. Berikut akan dibahas gambaran pelayanan masing-masing sekolah.

4.2.1 Pelayanan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibeusi

SDN Cibeusi terletak di kawasan pendidikan Jatinangor Kabupaten Sumedang. SDN Cibeusi merupakan satu-satunya SD di desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor yang berpredikat sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN). Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 2427 m². Semula SDN Cibeusi merupakan dua sekolah di lokasi dan bangunan yang sama, yakni SDN Cibeusi dan SDN Sadangsari dengan jumlah murid 220 siswa untuk dua sekolah. Kemudian berdasarkan usulan stakeholder, pada 30 Oktober 2002 Bupati Sumedang menggabungkan SDN Sadangsari dengan SDN Cibeusi menjadi satu nama yakni SDN Cibeusi, sehingga pada tanggal 30 Oktober dijadikan hari jadi SDN Cibeusi. Sekolah ini memiliki visi unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) berlandaskan iman dan takwa (IMTAK). Misi sekolah ini adalah: (1) pengelolaan pendidikan dengan pendekatan MBS dengan mengoptimalkan tugas, peran, dan fungsi komite sekolah (DSCS), (2) meningkatkan profesional guru (3) peningkatan disiplin kerja, (4) mengedepankan keteladanan/panutan (5) pengelolaan pendidikan aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan inovatif (PAKEMI), (6) menciptakan sekolah sehat dan berbudaya lingkungan (7) melengkapi sarana prasarana pendidikan dan (8) mengkorelasikan pendidikan budi pekerti akhlakulkarimah (agama) ke dalam setiap mata pelajaran.

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sekolah memiliki berbagai sarana prasarana. Fasilitas yang dimiliki oleh SD Cibeusi adalah 12 ruang kelas, 2 ruangan guru, 1 ruangan Tata Usaha dan Karyawan, dan 1 ruangan Kepala Sekolah serta Wakil Kepala Sekolah. Setiap ruangan tersedia bangku dan meja yang bersih dan lengkap. Selain itu fasilitas lainnya adalah tersedianya ruang bagi siswa untuk berkreasi dibidang seni yaitu seperangka alat kesenian degung/salendro, kecapi, seperangkat alat nasyid, seperangkat alat kesenian modern berupa Keyboard, serta seperangkat marching band. Alat-alat ini untuk mendukung kegiatan ekstra kurikuler yaitu karawitan degung dan tari tradisional yang merupakan seni budaya lokal serta marching band, selain itu ekstra kurikuler pramuka, pencak silat, karate, bahasa inggris dan computer. Untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran sekolah menyediakan pula 11 unit

computer, laptop serta seperangkat infocus dan CD pembelajaran interaktif. Sarana dan prasarana (fasilitas) lengkap dan memadai dapat dikatakan telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Bahan dan sumber belajar berupa buku, beragam macamnya terdiri dari buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya dalam kondisi cukup baik di perpustakaan. Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada beberapa mata pelajaran. Media pembelajaran bervariasi, terdiri dari media pembelajaran yang konvensional yaitu papan tulis sampai yang modern seperti OHP, infocus sampai peralatan lain seperti komputer. Lingkungan sekolah aman dan tertib serta memiliki media informasi elektronik (website) yang dapat diakses setiap saat.

Jumlah siswa untuk saat ini adalah 375 siswa dengan keseluruhan 12 rombongan belajar. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa sebagian besar orang tua siswa yang dikategorikan ekonomi menengah ke bawah, dan hanya sebagian kecil berada pada kategori menengah/sejahtera dan kategori menengah ke atas.

Pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di sekolah adalah sebagai berikut:

- Guru 94% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, 2% berpendidikan S1 dengan latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan tetapi telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sisanya 4% berpendidikan belum S1 dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan ada yang sedang melanjutkan pendidikan S1;
- Kepala Sekolah berpendidikan S2
- Administrasi dilakukan oleh guru dan tenaga khusus administrasi dibawah pengawasan kepala sekolah. Mereka telah mampu mengoperasikan komputer
- Tenaga pengajar ekstrakurikuler berasal dari orang tua siswa yang memiliki ketrampilan khusus dan alumni STSI.

Universitas Indonesia

- Pustakawan, laboran dan teknisi komputer sekitar 96% sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Kurikulum SDN Cibeusi memenuhi standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 100% guru telah menyusun program tahunan, kalender pendidikan serta silabus mata pelajaran serta guru telah menyusun RPP. Program remedial dan pengayaan telah dilakukan oleh guru sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan. Tata tertib sekolah telah dilaksanakan dengan konsekuen

Prestasi yang dimiliki oleh SDN Cibeusi adalah sebagai berikut:

- Prestasi Lomba – lomba akademik sekolah (sebagian besar prestasi pada tingkat kabupaten namun ada juga yang sudah mencapai prestasi sampai tingkat Propinsi);
- Prestasi non akademik sekolah dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai juara pertama atau kedua mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat Propinsi).
- Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 9,82 dan 100% lulus.
- Tidak ada siswa drop out.

Kelanjutan siswa yang lulus dapat diterima di SMP disekitar SD Cibeusi. Sekolah membantu siswa untuk mendapatkan sekolah lanjutan.

4.2.2 Pelayanan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Jatinangor

SDN Jatinangor terletak di Jalan Caringan desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 2170 m². Visi sekolah adalah mewujudkan siswa yang berakhlak, mulia berilmu, kreatif, serta mampu hidup mandiri. Sedangkan misi sekolah ini adalah: (1) mengembangkan sikap taat beragama dan sopan santun (2) mengembangkan pembelajaran yang aktif dan kreatif (3) mengembangkan perilaku sopan dalam kehidupan sehari-hari melalui pengembangan diri.

Dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sekolah memiliki berbagai sarana prasarana. Fasilitas yang dimiliki SDN Jatinangor terdiri

6 ruang kelas untuk proses kegiatan belajar mengajar dan 1 ruang untuk ruang kepala sekolah, guru dan administrasi sekolah. Ruang kelas memadai dengan bangku dan meja sesuai dengan jumlah siswa. Fasilitas lainnya adalah tersedianya lapangan untuk berolahraga. Tidak memiliki perpustakaan. Prasarana dan sarana (fasilitas) tidak lengkap dan memadai, belum dapat dikatakan memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Sekolah belum memiliki komputer untuk kegiatan tata usaha dan administrasi. Lingkungan sekolah tertib tetapi belum cukup aman, karena pagar sekolah hanya ditanami tanaman, jalan masuk ke sekolah hanya berupa jalan setapak dan agak masuk ke perkebunan.

Bahan dan sumber belajar yang digunakan untuk proses belajar mengajar berupa buku dan media pembelajaran. Buku beragam macamnya, buku cerita, buku pengetahuan, buku pelajaran, majalah, kamus, ensiklopedia dan lain lain dalam kondisi banyak yang rusak. Perbandingan jumlah buku pelajaran dan jumlah siswa belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Media pembelajaran bervariasi, terdiri dari media pembelajaran yang konvensional yaitu papan tulis. sekolah belum memiliki komputer dan belum memiliki jaringan komunikasi akademik (website).

Jumlah siswa untuk saat ini adalah 125 siswa dengan keseluruhan 6 rombongan belajar. Siswa terdiri dari berbagai macam kalangan dengan status ekonomi yang juga beragam. Dilihat dari tingkat kesejahteraan orang tua siswa rata-rata orang tua siswa yang dikategorikan ekonomi menengah ke bawah.

Pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Guru yang mengajar di SD jatinangor berjumlah 10 orang. Guru berpendidikan S1 hanya 2 orang. Selebihnya berpendidikan D3, D2, SPG, dan PGA, sayangnya belum ada yang melanjutkan pendidikan S1. Hanya sebagian guru yang telah mengikuti penataran-penataran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Semua guru belum memiliki prestasi baik di tingkat kotamadya maupun propinsi;
2. Kepala sekolah berpendidikan D3;
3. Tenaga TU merangkap guru. Penata usahaan dilakukan dengan manual belum memakai computer. Tidak memiliki tenaga administrasi sarana prasarana,

selama ini kepala sekolah dengan wakil yang memiliki peran sebagai tenaga administrasi sarana prasarana;

Kurikulum SDN Jatinangor telah memenuhi standar Nasional Pendidikan, yaitu dengan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 100% guru telah menyusun program tahunan, dan silabus mata pelajaran, untuk kalender pendidikan sekolah hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 100% guru telah menyusun RPP. Terdapat program remedial dan pengayaan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan kurikulum atau Standar Nasional Pendidikan.

Prestasi yang telah dicapai oleh SDN Jatinangor adalah sebagai berikut:

1. Prestasi Lomba – lomba akademik sekolah (rata-rata belum mencapai prestasi);
2. Prestasi non akademik sekolah belum dapat dikatakan tinggi (rata-rata mencapai kejuaraan tingkat kecamatan).
3. Prestasi akademik lulusan sudah lulus memenuhi Standar Nasional Pendidikan yaitu 7,13 dan 100% lulus;
4. Tidak ada siswa yang drop out.

Tabel 7 : Hasil USBN tahun 2010

	Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	Jumlah
Rata USBN	6,11	7,82	7,52	21,45
Terendah	3,8	6	6,75	19,30
Tertinggi	8	9	8,25	25,25
Standar deviasi	1,6	0,57	0,44	1,36

Sumber : SDN Jatinangor

Data profil dua SDN di atas menunjukkan bahwa sekolah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga dianggap memiliki perbedaan yang signifikan untuk dilakukan Penelitian analisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di kedua SDN tersebut.

Universitas Indonesia

4.3 Gambaran Komite Sekolah

Gambaran partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor dapat dilihat dari mekanisme partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat diidentifikasi dari berbagai aktivitas partisipasi masyarakat yang telah melembaga dan diakui oleh stakeholder sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Mekanisme partisipasi merupakan saluran yang mewadahi berbagai cara penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat. Komite Sekolah merupakan salah satu mekanisme partisipasi yang telah diakui oleh stakeholder sekolah.

4.3.1 Kebijakan Komite Sekolah

Pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 pasal 8 disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan pasal 9 disebutkan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan wujud dari kesadaran masyarakat akan keberadaan institusi pendidikan. Yang kemudian mendorong menjadi rasa tanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XV pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Ayat 2 menjelaskan bahwa Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hirarkis. Ayat 3 Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan

Universitas Indonesia

dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional, telah membentuk wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi serta dukungan mereka dalam menunjang pendidikan. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Bab XIV, pemerintah memberikan wadah bagi masyarakat untuk berperanserta dan menyalurkan aspirasinya dalam menunjang pendidikan melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten dan Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan (sekolah). Dengan adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah mewujudkan pendidikan yang bermutu diharapkan akan lebih baik dan meningkat untuk mewujudkan *community-based education*.

Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan; meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluuh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; menciptakan dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran yang dimiliki oleh komite sekolah untuk mencapai tujuan adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Komite sekolah memiliki fungsi untuk menjalankan perannya yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; melakukan kerjasama dengan

Universitas Indonesia

masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri yang bermutu; menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, criteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan terutama guru/tutor dan kepala satuan pendidikan, criteria fasilitas pendidikan, dan yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu komite sekolah juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Peran dan fungsi komite sekolah dapat dijabarkan secara lebih terinci ke dalam kegiatan operasional yang dapat dipilah dalam beberapa fungsi manajemen seperti fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembiayaan, sebagai berikut: Peran pertimbangan memiliki fungsi memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai antara lain mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS, dan kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria fasilitas pendidikan. Peran dan fungsi ini dapat dijabarkan dalam kegiatan operasional komite sekolah yaitu; mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat; menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada sekolah; menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan tembusan kepada dinas pendidikan dan dewan pendidikan; memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal; memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM); memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah.

Peran pendukung memiliki fungsi mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Penjabaran dalam kegiatan operasional komite sekolah meliputi mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan orang tua dan anggota masyarakat; mencari bantuan dana dari

dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu; menghimbau dan mengadakan pendekatan kepada orangtua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat menjadi narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik; memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak; memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam pemberantasan penyebarluasan narkoba di sekolah; memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Komite sekolah dalam perannya sebagai pendukung dengan fungsi menggali dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat dijabarkan dalam kegiatan operasional komite sekolah sebagai berikut: memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah; memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno komite sekolah; memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah; dan membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi. Fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dapat dijabarkan dalam kegiatan operasional komite sekolah sebagai berikut: melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa; mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, misalnya pengggung hiburan untuk sekolah dan masyarakat; membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat.

Peran Pengontrol Komite Sekolah memiliki fungsi melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Fungsi ini dapat dijabarkan dalam kegiatan operasional komite sekolah sebagai berikut: mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental dengan kepala sekolah dan dewan guru; sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, atau dengan dewan guru di sekolah, meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa; dan bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni.

Peran mediator komite sekolah memiliki fungsi melakukan kerjasama dengan masyarakat. Pada fungsi ini komite sekolah dapat melakukan kegiatan berupa membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dengan dunia usaha dan dunia industri; dan mengadakan peninjauan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah. Fungsi menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. pada fungsi ini kegiatan yang dapat dilakukan oleh komite sekolah adalah menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat; dan menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah.

Anggota Komite sekolah berasal dari berbagai unsur masyarakat. Mereka berasal dari perwakilan orang tua/wali peserta didik berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis; tokoh masyarakat (ketua RT/RW/RK, kepala dusun, ulama, budayawan, pemuka adat); anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau dijadikan figur dan mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan; pejabat pemerintah setempat (Kepala Desa/Lurah, Kepolisian, dan instansi lain); pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan; organisasi profesi tenaga pendidikan seperti PGRI dan ISPI; perwakilan perwakilan siswa bagi tingkat SLTP/SMU/SMK yang dipilih secara demokratis berdasarkan jenjang kelas; dan perwakilan forum alumni SD/SLTP/SMU/SMK yang telah dewasa dan mandiri. Anggota Komite Sekolah yang berasal dari unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa sebanyak-banyaknya berjumlah tiga orang. Anggota Komite Sekolah diharapkan mampu mewakili unsur masyarakat dimana Komite Sekolah merupakan wakil dari masyarakat dan keluarga yang dapat menjadi jalan masuk yang tepat agar masyarakat dapat berpartisipasi dan rasa ikut memiliki terhadap sistem pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah yang ada di lingkungan masing-masing (Ace Suryadi 2009). Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlah harus ganjil. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan Komite Sekolah ditetapkan di dalam AD/ART.

Pengurus Komite Sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan. Selain itu dapat pula diangkat petugas khusus yang menangani urusan administrasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Jabatan ketua Komite Sekolah tidak berasal dari kepala satuan pendidikan.

Pembentukan Komite sekolah dilakukan secara transparan yaitu pembentukan Komite Sekolah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penaymapain hasil pemilihan. Akuntabel, yaitu proses pembentukan Komite Sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demokratis, yaitu proses pemilihan anggota dan pengurusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara.

Berikut akan dibahas gambaran komite sekolah di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor

4.3.2 Komite Sekolah SDN Cibeusi

Komite Sekolah SD Cibeusi yang lebih dikenal dengan DSCS dibentuk pertama kali dalam rapat orang tua siswa pada 20 Juli 2002. DSCS semula meliputi dua sekolah di lokasi dan bangunan yang sama, yakni SDN Cibeusi dan Sadangsari, sehingga DSCS diartikan Dewan Sekolah SDN Cibeusi dan Sadangsari. Kemudian berdasarkan usulan stakeholder, pada 30 Oktober 2002 Bupati Sumedang menggabungkan SDN Sadangsari dengan SDN Cibeusi menjadi satu nama yakni SDN Cibeusi, sehingga DSCS diartikan Dewan Sekolah SDN Cibeusi Sumedang. DSCS sebagai organisasi ilegal terdaftar di kantor Notaris Popi Priati, S.H. No. 1 tanggal 25 Februari 2003 (No.5/P.DS/2003/PN.SMD) dan tanggal 25 Februari dijadikan hari jadi DSCS. Sejak pada tanggal 31 Mei 2007 DSCS dijadikan motto bagi komite sekolah SDN Cibeusi dengan diartikan Dinamis Sinergi Cerdas Selaras.

DSCS beraskan amal shaleh, kejujuran dan keikhlasan. Tujuan dibentuknya DSCS adalah untuk (1) mewartahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan, (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

DSCS memiliki peran (1) pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) pendukung penyelenggaraan pendidikan baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga; (3) mediator antara sekolah, pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk menjalankan peran yang dimiliki oleh komite sekolah maka DSCS mempunyai fungsi sebagai berikut (1) mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan swasta berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, ide, harapan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; (4) mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (5) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; (6) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada dewan guru mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja tenaga kependidikan, baik kepala sekolah, guru/tutor maupun penjaga sekolah, kriteria sarana dan fasilitas pendidikan, kriteria keluaran pendidikan, hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan; (7) melakukan evaluasi, kontrol dan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. DSCS memiliki sifat (1) mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarki dengan SDN Cibeusi maupun lembaga lainnya dan (2) otonom, nonpolitis serta menganut prinsip kebersamaan, berbagi kewenangan dan kemitraan ke arah peningkatan mutu pendidikan, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di SDN Cibeusi.

Keanggotaan DSCS terdiri dari (1) anggota tetap yaitu orang tua/wali siswa umumnya, diluar anggota khusus, (2) anggota khusus yaitu orang tua/wali yang berstatus sebagai dewan guru atau aparatur pemeritah desa Cibeusi, dan (3) anggota kehormatan yaitu pribadi yang tidak mempunyai ikatan perwalian siswa di SDN Cibeusi, dan memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu pendidikan. Anggota DSCS berjumlah 17 orang. Mereka berasal dari beberapa unsur masyarakat yaitu 8 orang berasal dari unsur orang tua siswa, 2 orang berasal dari guru, 2 orang merupakan pensiunan guru SDN Cibeusi, 3 orang merupakan tokoh masyarakat, 1 orang alumni SD Cibeusi dan 1 orang merupakan karyawan dunia usaha dan industri.

Kepengurusan DSCS saat ini merupakan periode yang ke 2 untuk masa bakti tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Kepengurusan terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno. Pengurus harian meliputi ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara. Pengurus pleno terdiri atas pengurus harian ditambah anggota pengurus atau beberapa bidang yang diangkat oleh ketua. DSCS pada periode ini terdapat beberapa bidang yaitu bidang Bidang organisasi (kontrol dan pengawasan) yang terdiri dari beberapa sub bidang yaitu Taswa (tabungan Abadi Siswa, Keuangan Sekolah dan BOS, Kinerja Dewan Guru, dan Lingkungan SDN Cibeusi; Bidang Peningkatan SDM yang terdiri dari beberapa sub bidang yaitu profesionalisme dewan guru, pemberdayaan orang tua/wali siswa, buletin PaNutan; bidang usah dan kerja sama yang terdiri dari beberapa sub bidang yaitu dana dan kewirausahaan, promosi dan alumni, hubungan antar lembaga, dan sarana dan prasarana.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) DSCS merupakan syarat dari pendirian komite sekolah sesuai dengan panduan umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Anggaran Dasar DSCS berisikan sebagai berikut: nama, waktu dan kedudukan; asas dan tujuan; sifat, fungsi dan peran; keanggotan; kepengurusan; permusyawaratan dan rapat; keuangan; tahun buku; lambang dan bendera, anggaran rumah tangga, perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, pembubaran; dan penutup. Sedangkan anggaran Rumah Tangga berisikan: nama dan kedudukan; keanggotaan; anggota kehormatan; kepengurusan; pengurusan periode pertam; fungsi pengawasan;

Universitas Indonesia

kongres, tata cara pemilihan pengurus; program umum; kongres luar biasa; konferensi kerja; rapat pengurus harian; rapat pengurus pleno; rapat kerja dengan dewan guru; rapat dewan penyantun; rapat lain-lain; kuorum; keputusan; keuangan; laporan keuangan; lambang dan bendera; perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga; landasan hukum; dan penutup.

DSCS dalam kiprahnya untuk memajukan SDN Cibeusi telah menghasilkan beberapa prestasi antara lain sebagai berikut:

- a. Akreditasi SDN Cibeusi dengan predikat B (baik) dimana komponen peranserta masyarakat memperoleh nilai 100 pada tahun 2005
- b. SDN Cibeusi berhasil meraih empat penghargaan terbaik tingkat Sumedang, yakni juara lomba sekolah sehat program UKS, sekolah berbudaya lingkungan, kepala sekolah program, dan DSCS sebagai komite sekolah berprestasi pada tahun 2007.
- c. Pada tahun 2008 SDN Cibeusi memperoleh rekor MURI untuk Sekolah Dasar Negeri yang terbanyak memiliki lagu-lagu sendiri tentang sekolahnya yang diprakarsai oleh DSCS. Selain itu DSCS memperoleh trophy Gubernur Jawa barat sebagai juara III komite sekolah berprestasi Jawa Barat.
- d. Pada tanggal 14 Agustus 2008 SDN Cibeusi ditetapkan sebagai Sekolah Standar Nasional.

4.3.3 Komite Sekolah SDN Jatinangor

Komite sekolah SDN Jatinangor pertama kali dibentuk pada tahun 2007. Sebelumnya masih BP3. Kepengurusan saat ini merupakan periode pertama. Pembentukan Komite sekolah melalui pemilihan langsung yang dihadiri oleh orang tua siswa, tokoh masyarakat dan pihak sekolah. Ketua komite sekolah terpilih merupakan tokoh masyarakat. Kepengurusan ditunjuk langsung oleh ketua komite dengan diketahui oleh Kepala Sekolah. Visi Komite Sekolah adalah mensukseskan mutu pendidikan yang berkualitas sedangkan misinya adalah mensukseskan pendidikan 9 tahun.

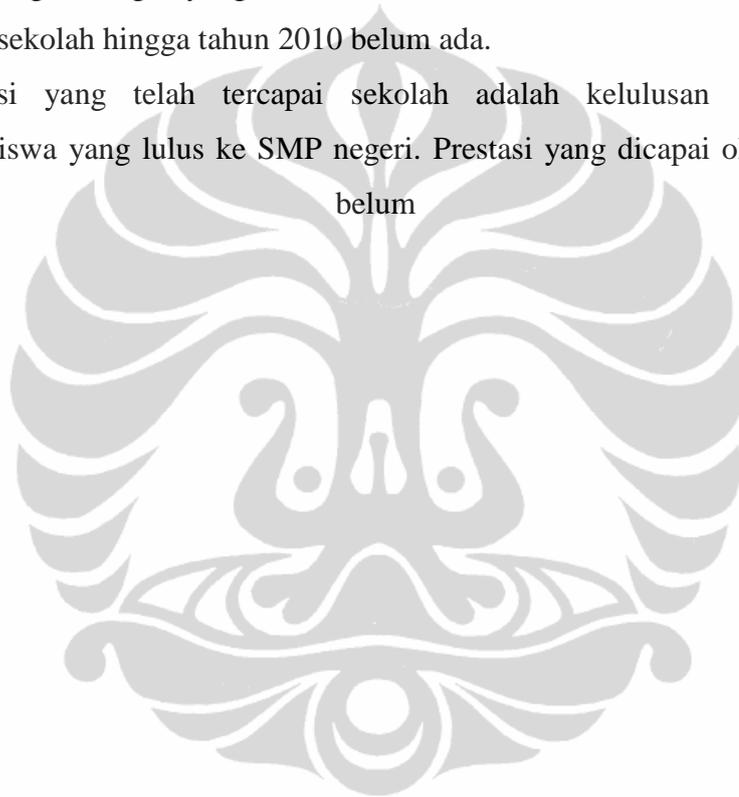
Struktur organisasi komite sekolah terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, hubungan masyarakat dan anggota. Anggota komite sekolah terdiri dari 5 orang yaitu Bapak Ade Suherman (tokoh masyarakat); sekretaris, Ibu Suharti (orang tua

Universitas Indonesia

siswa); Bendaraha, Ibu Atikah (guru); hubungan masyarakat, Bapak Nana (orang tua siswa); anggota, Bapak Dadan Ridwan (guru). Bapak Ade Suharman adalah seorang tokoh masyarakat

Program yang direncanakan oleh Komite Sekolah adalah rehab sekolah. Sekolah belum pernah memperoleh bantuan rehab sejak tahun 1994. Sekolah dibantu oleh Komite Sekolah berusaha untuk memperoleh bantuan dari dinas pendidikan dan direncanakan sekolah akan mendapat bantuan rehab gedung pada tahun 2011. Pengembangan yang dilakukan oleh Komite sekolah dalam pelayanan pendidikan disekolah hingga tahun 2010 belum ada.

Prestasi yang telah tercapai sekolah adalah kelulusan 100% dan diterimanya siswa yang lulus ke SMP negeri. Prestasi yang dicapai oleh Komite sekolah belum ada.



BAB 5

PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeuhi dan SDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Semua pertanyaan penelitian akan dibahas pada bab ini yaitu partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan, usaha sekolah dalam memberikan peluang kepada masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah.

5.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet, 1992). Kemauan dan kemampuan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tapi tidak ada kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, sungguhpun telah diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah. Perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan orang tu siswa atau warga sekitar sekolah atau kelompok masyarakat yang dipresentasikan oleh komite sekolah untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Sebaliknya juga pihak penyelenggara sekolah perlu memberikan ruang dan/atau kesempatan dalam hal lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif mana, dan dengan mekanisme bagaimana partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan.

Ada tidaknya kemauan keluarga/warga atau kelompok masyarakat dalam pengembangan pendidikan di sekolah terkait dengan adanya perubahan paradigma pembangunan di Indonesia. Dari paradigma pembangunan yang sentralistik yang dianut pemerintah sampai satu dekade yang lalu, telah menumbuhkan opini masyarakat bahwa tanggung jawab utama pembangunan (dalam bidang pendidikan) adalah terletak di tangan pemerintah. Warga dan kelompok masyarakat yang lebih ditempatkan sebagai “bukan pemain utama”, atau lebih sebagai obyek, yang bahkan telah merasa terpinggirkan. Perencanaan pembangunan yang demikian telah menempatkan masyarakat hanya sebagai suatu subsistem yang diasumsikan sebagai komponen yang bersifat pasif dari sistem pembangunan. Kesan tersebut telah melemahkan kemauan berpartisipasi warga dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Dengan perubahan paradigma sentralistik ke desentralisasi mempengaruhi juga dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Semua urusan penyelenggaraan sekolah terletak di sekolah itu sendiri yang lebih dikenal dengan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah menekankan pada partisipasi masyarakat dengan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat di sekolah muncul dari kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan penyusunan dan perencanaan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Kesempatan atau peluang yang diberikan sekolah kepada masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pelayanan pendidikan di sekolah dijelaskan pada sub bab berikut

5.1.1 Gambaran Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Pendidikan di sekolah

Partisipasi timbul karena adanya kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk berpartisipasi. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, baik bersifat spontan atau terorganisasi, secara sesaat atau berkelanjutan, serta dengan strategi tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Komite sekolah merupakan penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui “perwakilan” fungsi stakeholder. Komite Sekolah sedapat mungkin bisa merepresentasikan keragaman

Universitas Indonesia

yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat lebih di fokuskan pada keterlibatan komite sekolah dan orang tua pada penyusunan perencanaan dan pembuatan keputusan, pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah, dan mengontrol pelaksanaan pelayanan di sekolah. Berikut partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

- **SDN Cibeusi**

Komite Sekolah sedapat mungkin bisa merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Begitu juga anggota komite sekolah di SDN Cibeusi dari berbagai unsur yaitu orang tua siswa, tokoh masyarakat, alumni, karyawan DUDI, pemerhati pendidikan dan guru SDN Cibeusi dengan komposisi orang tua siswa paling banyak yaitu 7 orang, tokoh masyarakat 3 orang, pemerhati pendidikan 2 orang, alumni 1 orang, karyawan DUDI 1 orang dan guru 2 orang. Total anggota dan pengurus komite sekolah 17 orang.

Partisipasi merupakan proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat. Kemauan dan kemampuan komite sekolah dan orang tua siswa dilihat dari keterlibatan mereka dalam pelayanan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam penyusunan dan pembuatan keputusan, dukungan pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Salah satu bentuk partisipasi dalam pelayanan pendidikan adalah dengan kehadiran orang tua dan komite sekolah dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh sekolah. Pesta Saman pada akhir tahun pelajaran. Kegiatan ini dihadiri oleh semua pemangku kepentingan sekolah, meliputi anggota komite sekolah, tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan bapak dan ibu guru. Kegiatan ini benar-benar dianggap sebagai ajang silaturahmi kita semua (hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010). Dalam pesta Saman ini telah terjadi interaksi antara sekolah dan stakeholder pendidikan sekolah. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar hadir dalam kegiatan tersebut, melainkan ikut terlibat dalam penyelenggaraannya. Dana untuk membiayai acara ini merupakan

Universitas Indonesia

sumbangan dari orang tua siswa, berkat dukungan dan motivasi oleh komite sekolah.

Partisipasi Komite Sekolah dengan kehadirannya dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh sekolah. Komite sekolah tidak hanya diam tetapi juga memberikan masukan-masukan, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah “.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembuatan keputusan dapat dilihat dari keterlibatannya komite sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan ikut sharing dan memberikan masukan-masukan seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah SDN Cibeusi:

“keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RAPBSya tentu harus sharing ya, pertama itu kan yang lebih banyak tahu tentang kondisi kelas ya sekolah, kita sifatnya memberikan masukan-masukan, kalau perlu apa namanya, revisi jarang ya, lebih banyak masukan kira-kira mana yang harus dilaksanakan, di prioritaskan, mana yang tidak. Misalnya tahun ini prioritas karena siswa bertambah banyak kita perlu bangku perlu meja, itu melibatkan komite sekolah” (Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SDN Cibeusi)

RAPBS selain di tanda tangani oleh kepala sekolah juga di tanda tangani oleh komite sekolah. Pengesahan RAPBS oleh komite sekolah merupakan syarat pencairan dana BOS seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah SDN Cibeusi ‘ Hal ini untuk menegaskan bahwa komite sekolah dilibatkan dalam pembuatan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksana pelayanan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari masukan komite sekolah dan orang tua seperti mengusulkan card siswa dan pemakaian seragam. Selain itu untuk mendukung pelayanan pendidikan di sekolah komite sekolah ikut berpartisipasi dalam pemenuhan sarana prasarana di sekolah dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha seperti PLN, Telkom, FIF.

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah dapat di lihat dari evaluasi yang dilakukan oleh komite sekolah dengan membuat

angket untuk mengetahui kebutuhan dan kepuasan orang tua siswa dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Melalui angket ini komite sekolah dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh orang tua siswa dan dapat sebagai sarana orang tua siswa untuk mengutarakan keluhan dan kritikan atas pelayanan pendidikan yg diberikan sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh komite sekolah SDN Cibeusi “melalui angket ya angket jejak pendapat itu berapa kali kita adakan angket jejak pendapat dan sekarang sudah melembaga di sini”. Selain itu juga dengan memantau program kegiatan yang dilakukan oleh sekolah.

- **SDN Jatinangor**

Partisipasi masyarakat di SDN Jatinangor dilihat dari keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam penyusunan dan pembuatan keputusan, dukungan pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembuatan keputusan dapat dilihat dari keterlibatannya komite sekolah dalam penyusunan RAPBS dengan ikut menandatangani dokumen RAPBS bersama kepala sekolah, seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah SDN Jatinangor “Iya, sebelumnya dipelajari terlebih dahulu. Soalnya masing-masing guru mempunyai program tersendiri.”

Partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksana pelayanan pendidikan di sekolah dapat dilihat dari masukan komite sekolah dalam rapat dengan pihak sekolah. Intensitas pertemuan sering seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah,

“Sering, dalam satu minggu 1-2 kali.atau ketika ada masalah dan mau menghadapi UAN saya siapkan, memanggil kelas 6 dan membentuk taman belajar (les), dan biaya operasionalnya diambil dari dana bos. Setahun dua kali mengadakan pertemuan dengan kepek dan guru sekolah. terkadang ada kegiatan sekolah, cara mengatur jadwal kelas itu komite masuk disana, apa tujuan pada komite terhadap penderitaan. Biasanya diadakan setahun dua kali, tengah tahun dan ketika maumenghadapi UAN. Kira-kira dua bulan sebelum UAN orang tua murid kelas 6 dipanggil untuk memperingati bahwa anaknya mau menghadapi UAN ini rapat kepek

Universitas Indonesia

dengan dewan sekolah. kalo setelah penerimaan siswa mengadakan pertemuan, soalnya banyak yang bertanya berapa biayanya, disitu dijelaskan bahwa biaya sekolah gratis”.

Orang tua siswa jarang memberikan masukan karena mereka rata-rata berpendidikan rendah. Selain itu untuk mendukung pelayanan pendidikan di sekolah komite sekolah belum mampu memberikan dukungan dana untuk sarana parasarana yang dibutuhkan oleh sekolah, begitu juga dengan orang tua siswa yang rata-rata merupakan ekonomi lemah. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah dapat di lihat dari masukan dari orang tua siswa yang disampaikan melalui komite sekolah maupun langsung kepada sekolah. Komite sekolah

5.1.2 Gambaran Usaha Sekolah Dalam Partisipasi Masyarakat

Sekolah merupakan satu organisasi yang menganut sistem terbuka (Depdiknas, 2007). Sebagai organisasi terbuka maka terjadi kontak hubungan dengan lingkungannya. Kontak hubungan ini perlu dijaga agar lembaga dan sistem operasionalnya tidak mudah punah. Sekolah yang mengisolasi dirinya dengan tidak melakukan kontak dengan lingkungannya perlahan-lahan akan mati secara alamiah, tidak akan dapat eksis, karena organisasi hanya akan tumbuh dan berkembang jika didukung dan dibutuhkan oleh lingkungannya. Kelangsungan lembaga pendidikan akan sangat tergantung dan ditentukan oleh usaha sekolah itu sendiri, dalam arti sejauhmana sekolah mampu menjaga dan memelihara komunikasinya dengan masyarakat luas dengan menjadi organisasi terbuka. Satuan pendidikan sekolah dapat berkembang jika mendapat dukungan dari masyarakat, dan salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Hal ini dipertegas oleh Cook dan Macaulay (1997) dalam Mulyasa (2003) yang memberikan definisi pemberdayaan masyarakat sebagai “alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks MBS dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan efisien. Oleh karena itu, selain pemberdayaan semua warga sekolah, perlu ditempuh juga

Universitas Indonesia

upaya-upaya pemberdayaan orang tua dan masyarakatnya”. Hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat berjalan baik, maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi.

Pada dasarnya masyarakat baik yang mampu maupun yang tidak mampu, golongan atas, menengah maupun yang bawah, memiliki potensi yang sama dalam membantu sekolah yang memberikan pembelajaran bagi anak-anak mereka. Akan tetapi hal ini bergantung pada bagaimana cara sekolah mendekati masyarakat tersebut. Oleh karena itu, sekolah harus memahami cara mendorong peran serta masyarakat agar mereka mau membantu sekolah. Gambaran usaha sekolah dalam partisipasi masyarakat akan dijelaskan sebagai berikut:

- **SDN Cibeusi**

Kepala sekolah SDN Cibeusi pada awal menjabat telah berusaha untuk merangkul masyarakat sekitar dengan mengundang masyarakat untuk terlibat untuk kemajuan sekolah. Kepala sekolah sadar bahwa partisipasi masyarakat penting untuk kemajuan pendidikan, sehingga kepala sekolah membuka lebar partisipasi masyarakat. Salah satu yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah dengan meminta pendapat kepada masyarakat seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah sebagai berikut “sebelum saya kesini banyak yang sekolah keluar gak menyekolahkan ke Cibeusi ada yang ke Cibiru, Cileuni, ke Cipaci, ke Cikoko akibat dari tata tertibnya gak beres kedisiplinannya gak beres, contohnya waktu itu saya berangkat ke sini dari nol dari bangunan yang morat marit gak ada sarana prasarana yang menunjang saya yang pertama itu dikumpulkan orang tua rapatkan seluruh orang perusahaan di undang termasuk kepala desanya, rt, rw saya undang DKM juga saya undang mau dibawa kemana Cibeusi ini silahkan Ibu dan Bapak nulis kritik dan saran inginnya bagaimana kritiknya apa yang harus diwujudkan sekolah bagaimana solusinya apa”

Pembentukan komite sekolah tidak hanya untuk memenuhi syarat blockgrant melainkan untuk memajukan sekolah. Langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah sebagai berikut “pertama saya silaturahmi ke tokoh masyarakat di sini kira-kiranya siapa tokoh

masyarakat yang bisa memajukan ci beusi saya tulis dulu daftar nama kepala desa saya datengin pak siapa yang ditokohkan di sini langkah awal saya kumpulkan itu, kumpulkan tokoh mengumpulkan langkah selanjutnya memanggil orang tua semua dengan komite dan para komite waktu itu di klaim dewan sekolah yang pertama BP3 kemudian ada dewan sekolah sehingga kita dewan sekolah itu DSS gitukan dewan sekolah si beusi sumedang dulunya dewan sekolah Cibeusi Sadangsari". Langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah ini memperoleh hasil pengurus yang kompeten, dimana kerjasama antara komite sekolah dengan sekolah dapat memperoleh prestasi-prestasi seperti merebut gelar terhormat tingkat Kabupaten Sumedang untuk Komite Sekolah berprestasi tahun 2007, merebut gelar terhormat tingkat Kabupaten Sumedang untuk juara sekolah sehat program UKS tahun 2007, merebut gelar terhormat tingkat Kabupaten Sumedang untuk juara Sekolah Berbudaya Lingkungan tahun 2007, merebut gelar terhormat tingkat Kabupaten Sumedang untuk Kepala Sekolah berprestasi tahun 2007, dan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Sekolah Dasar Negeri yang terbanyak memiliki lagu-lagu sendiri tentang sekolahnya, tahun 2008.

Selain itu sekolah juga sering mengundang komite sekolah dan orang tua untuk membahas berbagai permasalahan yang di hadapi oleh sekolah, seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah "sering baru saja rapat dengan guru kelas enam, sebelum UAS BN kita sama komite mengumpulkan guru kelas enam semua guru pengurus komite semua orang tua kelas enam memberikan pengarahan bagaimana pendidikan di rumah gitukan, pendidikan di rumah tidak hanya pendidikan di sekolah sajakan untuk keberhasilan ini justru ada kerjasama dengan orang tua, kita bermusyawarah disana bagaimana untuk mendisiplinkan siswa bagaimana belajarnya di rumah orang tua ikut membimbing orang tua ikut menasehati gitukan itu seperti itu kita lakukan" (Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi). Dari wawancara ini juga diketahui bahwa sekolah menjalin kerjasama dengan orang tua siswa untuk berbagi tugas membantu anak dalam kegiatan belajar.

Usaha sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan salah satunya dengan meminta kritik dan saran dari masyarakat. Sekolah membuka lebar kritik dan saran dari masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah "saya

Universitas Indonesia

buka kritik dulu bagi orang tua mau apa silahkan bapak-bapak ibu-ibu tulis mau apa bapak dan ibu kritik sepahit apapun tulis gak usah ditulis nama dan macem-macam gitukan kritiknya ada guru gak boleh kesiangan kemudian guru jangan sering meninggalkan kelas banyak itukan kritikan-kritikan kemudian kita diskusikan lalu dibahas ada beberapa puluh kritikanlah termasuk pembelajarannya. Membuat tata tertib itu dari sana misalkan ada kritik dari orang tua seperti ini guru jangan sampai kesiangan coba tata tertib apa yang pantas dengan kritikan seperti ini kan timbul tata tertib guru lima menti sebelum jam tujuh harus sudah ada di sekolah seperti itukan bunyinya dan lain-lain gitukan jadi peraturan-peraturan ini saya buat bersama-sama guru bukan hanya saya yang bikin tapi bersama guru, bersama komite gitu.”(wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi)

Pesta Saman pada akhir tahun pelajaran. Kegiatan ini dihadiri oleh semua pemangku kepentingan sekolah, meliputi anggota komite sekolah, tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan bapak dan ibu guru. Kegiatan ini benar-benar dianggap sebagai ajang silaturahmi kita semua (hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010). Pada pesta saman dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan informasi tentang kondisi sekolah, program kegiatan yang telah dilaksanakan serta yang akan dilaksanakan juga menunjukkan prestasi yang telah dicapai oleh siswa. Selain itu pesta Saman menjadi ajang interaksi antara sekolah dan stakeholder pendidikan sekolah. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar hadir dalam kegiatan tersebut, melainkan ikut terlibat dalam penyelenggaraannya. Dana untuk membiayai acara ini merupakan sumbangan dari orang tua siswa, berkat dukungan dan motivasi oleh komite sekolah.

Mutu pelayanan pendidikan yang terjadi di SD Cibeusi merupakan hasil dari kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Masyarakat ada kemauan dan mampu untuk berpartisipasi serta sekolah yang tidak hanya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi namun Kepala Sekolah sebagai pengelola sekolah merasa penting dan butuh partisipasi masyarakat untuk memajukan pendidikan di sekolah terutama dalam pelayanan pendidikan.

Sekolah mampu menarik simpati masyarakat untuk berpartisipasi dengan banyaknya orang tua yang hadir dalam pesta saman. Sekolah menggunakan

kesempatan itu untuk menginformasikan kegiatan dan program yang dijalankan oleh sekolah, perkembangan siswa dan prestasi yang dicapai siswa, sehingga orang tua siswa mengetahui kondisi sekolah dengan baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua siswa tentang sekolah mempengaruhi rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat. Jika hubungan dan kerjasama antara sekolah dan masyarakat berjalan baik, maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga akan baik dan tinggi. Sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin kerjasama dengan masyarakat, maka sekolah dapat memberitahukan masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan (Mulyasa, 2003, p. 50-51)

- **SDN Jatinangor**

Kepala Sekolah SDN Jatinangor berusaha menjalin hubungan dengan masyarakat terutama dengan orang tua siswa dengan pendekatan kekeluargaan, seperti yang diungkapkan oleh Kepala sekolah sebagai berikut “dengan cara-cara itulah saya berkunjung yang terutama perhatian-perhatian apa yang kira-kira dia senangi, pekerjaan dia apa, dia tukang layangan, ngobrol, berapa harga layangan, bagaimana itu, tidak langsung pada focus permasalahan, tapi sambil itu tujuannya itu. Tapi Alhamdulillah tidak ada rasa keluhan apa-apa, setahu saya disini, selama saya satu tahun”. Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah untuk mengetahui permasalahan dan kondisi siswa selama di rumah. Selain pendekatan langsung, sekolah juga mengundang komite sekolah dan orang tua jika ada permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan dan perkembangan siswa.

Penyusunan RAPBS dilakukan oleh kepala sekolah dengan guru dan diketahui oleh komite sekolah. Pengesahan dilakukan oleh kepala sekolah dan komite sekolah. “Untuk RAPBS disusun secara berbarengan dengan komite sekolah dengan guru disesuaikan dengan pemberian uang yang ada dari pemerintah” (Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Jatinangor).

Universitas Indonesia

Kepala Sekolah merasa kesulitan untuk melibatkan orang tua siswa dalam pelayanan pendidikan terutama secara material, karena terganjal dengan slogan sekolah gratis, dan kemampuan orang tua siswa yang berada pada social ekonomi lemah. Komite sekolah juga belum pernah memberikan kontribusi berupa dana.

“untuk melibatkan masyarakat kan saya pusing, masyarakat itu tidak sama, kalau masyarakatnya punya, kalau masyarakatnya tidak punya, benturannya terhadap saya saya juga”

“nah secara sakral saja, saya satu tahun disini belum, terus terang saja belum, kalau pemberian langsung dari komite sekolah berupa materi tersebut, ini ada ini dari komite, saya selama satu tahun belum. Apalagi orang tua siswa, selama saya disini belum, dan untuk melibatkan masyarakat mengenai pendanaan-pendanaan disana didepan sudah dipampang ‘sekolah gratis’ dalam arti kata masyarakat sekolah gratis itu tidak bayar, apa saja yang diperlukan oleh sekolah itu tidak bayar, tidak ada pungutan, tidak ada biaya-biaya untuk sekolah”

“Sekolah gratis-sekolah gratis mana bisa mengharapkan dari masyarakat, masyarakat pada waktu sekarang ini kurang bukan kurang lagi hampir yang menjadi donatur-donatur itu bantuan-bantuan gak ada yaaa. Coba tolong-tolong saya juga membutuhkan ini. Kalau dulu donatur ada sebelum BOS sebelum digembuskan sekolah gratis. Waktu saya jadi guru sebelum di sini ada”. (Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Jatinangor)

Sekolah gratis menjadi kendala dalam partisipasi masyarakat terutama dalam pembiayaan. Kepala sekolah merasa tidak berdaya dengan hal itu.

5.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Pendidikan

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Sarah White (1996). Teori ini menjelaskan tentang empat kriteria dalam memahami partisipasi masyarakat. Pertama bentuk partisipasi (*form*), kedua, proses partisipasi dari atas ke bawah (*top-down*), ketiga, proses partisipasi dari bawah ke atas (*bottom-up*). Keempat, partisipasi ditinjau dari aspek fungsinya, yaitu *display*, *means*, *voice*, dan *means/end*.

Universitas Indonesia

Secara umum, hasil penelitian tingkat partisipasi masyarakat di dua sekolah tersebut menunjukkan adanya tingkat partisipasi yang berbeda. SDN Cibeusi memiliki tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan SDN Jatinangor. Jika tingkat partisipasi masyarakat di dua SDN tersebut diurutkan berdasarkan teori kerangka kerja partisipasi masyarakat, maka level partisipasi masyarakat SDN Jatinangor berada di level II, yaitu *instrumental* dan SDN Cibeusi berada di level IV, yaitu *transformatif*. Berdasarkan kriteria bentuk, proses partisipasi dari atas ke bawah, proses partisipasi dari bawah ke atas dan partisipasi ditinjau dari aspek fungsinya dalam memahami partisipasi masyarakat, maka Partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor dapat dijelaskan dalam subbab-subbag berikut.

5.2.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat (*Form*)

Menurut teori Sarah White, bentuk partisipasi (*form*), meliputi empat level partisipasi, yaitu (1) *nominal*, (2) *instrumental*, (3) *representatif*, dan (4) *transformatif*. Level terendah bentuk partisipasi masyarakat jika partisipasi itu baru dalam bentuk pemberian sumbangan dalam bentuk barang secara fisik. Level yang lebih tinggi, jika masyarakat telah terlibat sebagai bagian dari proses kegiatan partisipasi tersebut. Level yang lebih tinggi lagi adalah jika masyarakat telah merasa mewakili dari semua komponen yang terlibat dalam proses partisipasi dalam institusi tersebut. Level yang tertinggi adalah jika masyarakat telah menjadi aktor yang menentukan proses perubahan yang terjadi dalam institusi, dalam hal ini satuan pendidikan sekolah. Berikut dijelaskan bentuk partisipasi masyarakat di SD Cibeusi dan SDN Jatinangor.

- **SDN Cibeusi**

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk partisipasi masyarakat SDN Cibeusi pada level ke-4, yaitu partisipasi transformatif, dalam pengertian bahwa masyarakat tidak hanya sekedar telah ikut memberikan partisipasi nominal, yang semua warga masyarakat dapat membantu dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan sekolah, tetapi telah mampu merumuskan program dan kegiatan untuk

mengubah persepsi tentang sekolah, dan melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ketika dilakukan studi lapangan, warga masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah sedang menyelenggarakan acara Pesta Saman pada akhir tahun pelajaran. Kegiatan ini dihadiri oleh semua pemangku kepentingan sekolah, meliputi anggota komite sekolah, tokoh masyarakat, orang tua siswa, dan bapak dan ibu guru. Kegiatan ini benar-benar dianggap sebagai ajang silaturahmi kita semua (hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010)

Dalam pesta Saman ini telah terjadi interaksi antara sekolah dan stakeholder pendidikan sekolah. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekedar hadir dalam kegiatan tersebut, melainkan ikut terlibat dalam penyelenggaraannya. Dana untuk membiayai acara ini merupakan sumbangan dari orang tua siswa, berkat dukungan dan motivasi oleh komite sekolah.

Selain kegiatan Saman, Komite Sekolah ikut terlibat aktif dalam penyusunan RAPBS. Komite Sekolah memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh Kepala Sekolah, dan akhirnya ikut mengesahkan RAPBS tersebut dengan memberikan tanda tangan pada lembar pengesahan RAPBS. Hal ini menunjukkan bahwa komite sekolah ikut terlibat dalam mengatur, membuat keputusan dan menjalankan suatu kegiatan yaitu penyelenggaraan sekolah dalam melayani pendidikan.

Berkenaan dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RAPBS tersebut, Kepala Sekolah mengatakan: “ya tentu harus sharing ya, pertama itu kan yang lebih banyak tahu tentang kondisi kelas, ya sekolah. Kita sifatnya memberikan masukan-masukan, kalau perlu apa namanya, revisi jarang ya, lebih banyak masukan kira-kira mana yang harus dilaksanakan, diprioritaskan, mana yang tidak. Misalnya tahun ini prioritas karena siswa bertambah banyak kita perlu bangku, perlu meja, itu melibatkan komite sekolah” (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010).

Bentuk partisipasi ini merupakan keterlibatan komite sekolah dalam perannya sebagai pemberi dukungan kepada sekolah dalam hal pelayanan pendidikan di sekolah. Selain itu komite sekolah juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti PT PLN dan UPI (Universitas Pendidikan Indonesia).

Universitas Indonesia

Ini merupakan bentuk keterlibatan komite sekolah dalam menjalin hubungan antara sekolah dengan institusi terkait dan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, bentuk partisipasi masyarakat di SD Cibeusi telah mencapai pada level *transformative participation*, yaitu dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengatur, membuat keputusan, dan menjalankan kegiatan sekolah. Partisipasi ini merupakan bentuk partisipasi tertinggi.

- **SDN Jatinangor**

Partisipasi masyarakat di SDN Jatinangor berada pada level ke-2, yaitu partisipasi instrumental, dalam pengertian bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah dalam rangka pelayanan pendidikan berupa tenaga, material dan uang (*nominal*). Partisipasi yang dilakukan komite sekolah berupa tenaga yaitu berupa masukan dan pertimbangan serta ikut mengesahkan RAPBS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SDN Jatinangor tanggal 22 Juli 2010, komite sekolah terlibat dalam pengawasan, memberi dukungan, dan kadang-kadang dapat melakukan teguran, sebagaimana diatur dalam Kepmendiknas Nomor 044 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Misi Komite Sekolah SD Jatinangor adalah (1) pendidikan yang berkualitas, dan (2) mensukseskan pendidikan dasar sembilah tahun. Oleh karena itu, jika terjadi ada guru tidak disiplin (sehari masuk, dua hari bolos), maka para guru itu pasti akan memperoleh tegoran dari kepala sekolah. Kalau tidak, maka Komite Sekolah akan melakukan pengawasan, karena salah satu fungsi Komite Sekolah adalah melaksanakan pengawasan.

Partisipasi masyarakat berupa uang tidak terjadi di SD Jatinangor karena orang tua yang menyekolahkan anaknya di SD Jatinangor adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Bahkan kadang-kadang sekolah harus memberikan bantuan kepada anak didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu tersebut. Untuk ini, kepala sekolah memberikan saran agar Ibu Guru Kelas I dapat memberikan penjelasan tentang anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu itu. Dijelaskan lebih lanjut bahwa orangtua mereka tidak dimintai bantuan, tetapi justru harus diberikan bantuan (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Jatinangor, 24 Juni 2010).

Selain itu, tidak ada satupun perusahaan yang menjalin kerjasama dengan sekolah melalui komite sekolah. Oleh karena itu, Komite Sekolah SDN Jatinangor belum pernah melakukan kerjasama dengan lembaga lain, misalnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di SDN Jatinangor. Hal ini tidak sama dengan yang terjadi di SDN Cikerus 1 dan 2, juga SDN Ciawi, yang telah dibina oleh perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tersebut (wawancara dengan Komite Sekolah SDN Jatinangor, 22 Juli 2010).

Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai pendukung (*supporting agency*), telah terlibat aktif dalam penyusunan RAPBS. Komite Sekolah memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh Kepala Sekolah, dan akhirnya ikut mengesahkan RAPBS tersebut menjadi APBS dengan memberikan tanda tangan pada lembar pengesahan APBS. Berkenaan dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RAPBS tersebut, Ketua Komite Sekolah mengatakan: “ ... iya. kan sebelumnya dipelajari terlebih dahulu. Soalnya masing-masing guru mempunyai program tersendiri..” (wawancara dengan Komite Sekolah SDN Jatinangor, 22 Juli 2010). Hal ini merupakan salah satu dari kontribusi Komite Sekolah SDN Jatinangor yang diberikan untuk sekolah.

Komite sekolah dan sekolah sering berkumpul untuk membahas berbagai permasalahan. Komite sekolah memberikan berbagai saran untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SDN Jatinangor sebagai berikut: “.... kalau itu sering rapat bersama-sama, pertemuan, ngumpul bareng-bareng ada masukan-masukan dari beliau (komite sekolah)”

Berdasarkan analisis di atas, bentuk partisipasi masyarakat di SDN Jatinangor berada pada level *instrumental participation*, yaitu berada pada level ke-2, yaitu partisipasi *intrumental*, dalam pengertian bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah dalam rangka pelayanan pendidikan berupa tenaga, material dan uang (*nominal*).

5.2.2 Partisipasi Masyarakat Menurut Sekolah (*Top Down*)

Kriteria yang kedua dalam memahami partisipasi masyarakat menurut Sarah White (1996) adalah, proses partisipasi dari atas ke bawah (*top-down*).

Universitas Indonesia

Dalam proses ini, level partisipasi yang paling rendah disebut dengan level legitimasi, jika partisipasi itu masih hanya menunjukkan adanya legitimasi dari pihak birokrasi, dalam hal ini satuan pendidikan sekolah. Legitimasi tersebut dalam bentuk adanya aturan atau ketentuan. Level berikutnya disebut level efisiensi, jika partisipasi itu telah mempertimbangkan aspek efisiensi dalam penggunaannya. Level berikutnya dikenal dengan partisipasi keberlanjutan (*sustainability*), dalam pengertian bahwa partisipasi masyarakat telah mempertimbangkan kepentingan masa depan atau keberlanjutannya. Level yang tertinggi disebut level pemberdayaan (*empowerment*), dalam arti bahwa partisipasi tersebut telah melahirkan pemberdayaan pada masyarakat.

- **SDN Cibeusi**

Kriteria yang lain yaitu partisipasi menurut sekolah (*top down*). Partisipasi tidak hanya sebatas pajangan (*display*) yaitu hanya hadir dalam pertemuan tanpa ada input dari masyarakat. Sekolah mendorong partisipasi masyarakat dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk memperoleh masukan dan ide atau gagasan dari masyarakat untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu level partisipasi di SDN Cibeusi berdasarkan kriteria ini merupakan partisipasi yang tertinggi, yakni partisipasi empowerment.

Berkenaan dengan partisipasi masyarakat ini, Kepala Sekolah menyatakan bahwa: “waktu itu saya berangkat ke sini dari nol dari bangunan yang morat marit, tidak ada sarana prasarana yang menunjang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada saat itu, yang pertama dikumpulkan adalah orang tua siswa, seluruh orang perusahaan di undang termasuk kepala desanya, RT, dan RW. Saya juga mengundang DKM. Saya tegaskan mau dibawa kemana SDN Cibeusi ini silahkan ibu dan bapak menyampaikan kritik dan saran untuk memperbaiki sekolah ini. Kritik dan saran tersebut akan ditampung oleh Komite Sekolah, dan kemudian bersama dengan sekolah akan mewujudkannya sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah” (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 11 Juni 2010).

Hasil dari pertemuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala sekolah dengan membentuk komite sekolah secara demokratis sebagai wujud kemitraan

sekolah dengan orangtua siswa dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. “Inilah langkah awal saya membentuk Komite Sekolah” (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 11 Juni 2010). Selain itu, sekolah menganggap penting partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dan material, seperti pemenuhan kebutuhan operasional selain dari dana BOS karena dana BOS tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional sekolah sehingga sekolah mengharapkan dana dari masyarakat. Dalam hal dukungan dana dari masyarakat ini, kepala sekolah menjelaskan bahwa “... karena banyaknya kegiatan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, maka BOS itu tidak cukup untuk membiayai semua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, masih diperlukan dukungan dana dari orangtua siswa dalam bentuk sumbangan sukarela ...” (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010).

Sebagai wujud dukungan dari Komite Sekolah, maka Komite Sekolah melakukan fungsinya menggalang dana masyarakat dalam rangka penggalangan dana untuk pembiayaan sekolah. Adapun bantuan dana yang diperoleh adalah bantuan dari PT PLN Jabar-Banten seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah sebagai berikut: “... pada tahun 2009-2010 kita sudah membangun 4 (empat) ruang kelas baru, di sebelah sana, total biayanya Rp305 juta, gede, Rp305 juta ini. Yang pertama, ruang kelas bawah adalah merupakan kerjasama antara Komite Sekolah dengan sekolah dan PT PLN Jabar-Banten, kita dapat bantuan Rp75 juta. Untuk ruang kelas bawah itu, sumbangan dari PT PLN waktu itu, dari PT PLN menyumbang Rp75 juta dan dibuatkan bangunan baru untuk putra putri kita.” (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010)

Wujud dukungan komite sekolah kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah dilaksanakan oleh Komite Sekolah dengan mencarikan sponsor untuk melaksanakan kegiatan sekolah dan memberikan penghargaan berupa piagam untuk siswa yang berprestasi. Berkenaan dukungan sponsor dalam membantu pelaksanaan kegiatan sekolah tersebut, kepala sekolah telah memberikan penjelasan sebagai berikut: “... men-support kegiatan, hampir setiap tahun kita memberi piagam penghargaan kepada siswa berprestasi, kemudian juga untuk waktu-waktu tertentu misalnya ada momen-momen besar kita ada panutan award, penghargaan panutan kepada ada 4 (empat) kategori yang

kita berikan, pertama siswa yang berprestasi minimal tingkat kabupaten Sumedang, kedua siswa SD lain yang berprestasi minimal di tingkat kabupaten Sumedang, kenapa siswa SD lain yang diberikan penghargaan, untuk menunjukkan kita punya perhatian kepada mereka, yang kedua agar siswa kita juga termotivasi agar berprestasi seperti siswa SD lain, sehingga berpikir begini siswa SD lain diberi penghargaan masa kita yang berprestasi tidak diberikan penghargaan. Kemudian kita juga sering mengantar kalau ada event-event, ada kegiatan kita terlibat, baik dari sarana prasarananya, men-support dari belakang, termasuk latihan-latihannya” (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010).

Sekolah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, misalnya dalam membuat keputusan dan menerapkan kegiatan seperti perolehan penghargaan MURI sebagai sekolah yang memiliki jumlah lagu terbanyak tentang sekolahnya. Lagu-lagu ini diciptakan tidak hanya oleh pihak sekolah namun melibatkan orang tua siswa dan masyarakat yang peduli terhadap sekolah. “.... lagu-lagu tersebut digubah oleh Ketua Komite Sekolah dan anggota pengurus Komite Sekolah lainnya. Bahkan terbuka untuk sumbangan dari orangtua siswa dan siswa sendiri. Semua lagu tersebut menggambarkan gejolak atau suasana hati serta keinginan warga sekolah untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, Komite sekolah menjadi penggagas dan juga mengelola kegiatan ini, sampai akhirnya sekolah memperoleh penghargaan dari MURI, dengan Rekor MURI sebagai sekolah yang mempunyai lagu terbanyak tentang sekolahnya (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010). Salah satunya adalah lagu Hymne SDN Cibeusi. Lirik lagu Hymne SDN Cibeusi tersebut diciptakan oleh Dadang Adnan Dahlan, ketua Komite Sekolah SDN Cibeusi, sementara lagu dan aransemennya diciptakan oleh Budi Yanto, yaitu seorang karyawan swasta, warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, bukan orangtua/wali peserta didik (Bulletin SD Negeri Cibeusi PANUTAN, 26 Februari 2008, halaman 29).

Berdasarkan kategori kedua (top-down) dan ketiga, Partisipasi SD Cibeusi untuk kriteria menurut sekolah telah mencapai pada empowerment, dimana pihak

sekolah tidak hanya melegitimasi secara formal keterlibatan masyarakat, namun mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam mengelola, membuat keputusan, dan mengimplementasikan program. Partisipasi ini merupakan tingkat tertinggi.

- **SDN Jatinangor**

Partisipasi masyarakat kepada SDN Jatinangor untuk kriteria menurut sekolah berada pada *level legitimation*. Pada level ini sekolah menganggap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program cukup pada legitimasi, yaitu hanya terbatas pada pajangan, tanpa harapan adanya masukan konstruktif dari masyarakat, karena masyarakat belum mampu mengekspresikan keinginan dalam bentuk masukan atau usul untuk perbaikan sekolah. Partisipasi ini merupakan tingkat terendah. Dalam hal ini, Kepala Sekolah SDN Jatinangor merasakan kesulitan untuk dapat melibatkan masyarakat. Katanya, “ untuk melibatkan masyarakat kan saya pusing, masyarakat itu tidak sama, ada masyarakat yang mampu dan ada pula yang tidak mampu. “Ya, kalau masyarakatnya punya, kalau masyarakatnya tidak punya, maka akhirnya kembali kepada saya, dan saya lagi” (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Jatinangor, 24 Juni 2010). Lebih dari itu, Kepala Sekolah menyatakan sebagai berikut: “.... selama saya di sini, saya belum mampu melibatkan masyarakat untuk dapat memberikan sumbangan. Di depan sekolah sudah dipampang poster ‘sekolah gratis’, dalam arti masyarakat berpendapat bahwa masyarakat tidak perlu membayar, apa saja yang diperlukan oleh sekolah itu tidak perlu membayar, tidak ada pungutan, tidak ada biaya-biaya untuk kegiatan sekolah”.

Dengan kata lain, sekolah tidak mengharapkan masukan dari masyarakat karena orang tua siswa berasal dari ekonomi rendah. Selain itu terbentur dengan adanya sekolah gratis, sehingga masyarakat memandang bahwa biaya sekolah adalah tanggung jawab pemerintah, antara lain melalui pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun demikian, untuk memenuhi ketentuan pemerintah dalam administrasi pencairan BOS, Komite Sekolah SDN Jatinangor diikutsertakan dalam proses pencairan dana BOS. Dengan kata lain, pengambilan dana BOS memerlukan persetujuan semua pihak, terutama dari para guru dan

Universitas Indonesia

komite sekolah. Untuk apa penggunaan dana BOS itu? Komite sekolah juga diberitahukan tentang penggunaannya. Pertama untuk biaya pegawai, kedua untuk belanja barang, ketiga perawatan, keempat lain-lain. Dalam hal ini, penggunaan dana Rp4 juta, bendahara sekolah dan komite sekolah telah berunding, dan setelah ada persetujuan komite sekolah, akhirnya dana BOS dapat dicairkan, dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kesepakatan antara sekolah dan komite sekolah. Setelah ada kesepakatan antara sekolah dan komite sekolah, maka akhirnya komite sekolah memberikan tanda tangan persetujuan. Sesuai dengan proses persetujuan penggunaan dana BOS tersebut, maka sekolah sebenarnya hanya melegitimasi secara formal keterlibatan masyarakat. Hal ini merupakan partisipasi masyarakat pada level legitimasi.

5.2.3 Partisipasi Masyarakat Menurut Masyarakat

Kriteria partisipasi masyarakat menurut masyarakat (*bottom-up*) yang merupakan kriteria yang ke tiga menurut Sarah White, yang menjelaskan bagaimana masyarakat memandang partisipasi dengan empat karakteristik dengan level partisipasi inklusi (*inclusion*), biaya (*cost*), pengaruh (*leverage*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

- **SDN Cibeusi**

Keterlibatan Komite Sekolah dalam pengawasan pelayanan melakukan fungsinya dengan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Salah satunya dengan melakukan kunjungan ke sekolah atau dewan guru. Kegiatan ini sering dilakukan oleh Komite Sekolah selain pertemuan rutin. Komite Sekolah tidak hanya hadir dalam pertemuan namun juga ikut terlibat dalam penyusunan program, seperti yang dilakukan oleh Komite Sekolah yang ikut memverifikasi RAPBS sebelum disahkan dan ikut menandatangani RAPBS dalam dokumen pengesahan RAPBS. Dengan demikian, keterlibatan Komite Sekolah tersebut telah sampai pada level partisipasi tertinggi, karena Komite Sekolah telah dapat memberdayakan masyarakat dalam membantu sekolah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan

wawancara dengan ketua Komite Sekolah sebagai berikut: “.... keterlibatan Komite Sekolah dalam penyusunan RAPBS,ya tentu harus sharing ya, pertama itu kan yang lebih banyak tahu tentang kondisi kelas ya sekolah, kita sifatnya memberikan masukan-masukan, kalau perlu apa namanya, revisi jarang ya, lebih banyak masukan kira-kira mana yang harus dilaksanakan, di prioritaskan, mana yang tidak. Misalnya tahun ini prioritas karena siswa bertambah banyak kita perlu bangku perlu meja, itu melibatkan komite sekolah (wawancara dengan Komite Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010)

Berkenaan dengan keterlibatan Komite Sekolah, ketua Komite Sekolah telah memberikan penjelasan sebagai berikut: “.... peraturan sekolah, karena rata-rata sudah baku ya, jadi hampir jarang sih. Paling tidak begini saya yang sifatnya kepada internal, misalnya bikin spanduk-spanduk kecil gitu, jangan makan sambil berdiri, bersihkanlah WC, jadi tidak terlalu sifatnya menyuruh, mensupport saja. Karena kalau peraturan sudah baku ya dari DIKNAS, segala sesuatunya” (wawancara dengan ketua Komite Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010).

Selain terlibat dalam penyusunan program komite sekolah juga memberikan dukungan dana, dengan melakukan kerjasama dengan dunia usaha seperti PT PLN Jawa Barat- Banten untuk menyediakan sarana prasana sekolah berupa pembangunan gedung sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah menjelaskan bahwa: “.... ruang kelas bawah adalah merupakan kerjasama antara komite sekolah dengan sekolah juga dengan PT PLN Jabar-Banten, kita dapat bantuan Rp75 juta yang kelas bawah itu, sumbangan dari PT PLN waktu itu, dari PT PLN menyumbang Rp75 juta dan dibuatkan bangunan baru untuk putra putri kita. (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010).

Kualitas guru merupakan komponen yang penting dalam pelayanan pendidikan. Untuk mendukung peningkatan kualitas guru, Komite Sekolah memberi dukungan dengan mengirimkan para guru untuk ikut seminar dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Berkenaan dengan ini, ketua Komite Sekolah telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Pertama mensupport guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar gitu ya. Komite Sekolah beberapa kali mengirim guru untuk mengikuti

seminar bahkan ada yang dibiayai langsung oleh DSCS, kemudian juga mendatangkan kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten, contoh misalnya kalau bidang lingkungan hidup dengan “bunga hade”, bidang-bidang olahraga dengan ‘paja’, dengan tokoh-tokoh masyarakat dari bidang-bidang kesenian. Jadi kita di sini melibatkan seluruh apa namanya potensi yang dekat dengan seseorang contohnya ada hubungan baik untuk turut menyampaikan materinya disekolah. Kalau ibu perhatikan lagu PLN disitu ada kalimat apa namanya ada energy goes to school kami mendapatkannya, artinya PLN memberikan pelatihan bagaimana anak mengetahui listrik dan kondisi, mengapa harus dihemat. Memang tidak semua elemen dilibatkan tetapi beberapa kita pernah menghubungi. (wawancara dengan Komite Sekolah SDN Cibeusi, 24 Juni 2010).

Ada beberapa kegiatan yang merupakan ide dan gagasan dari Komite Sekolah seperti penganugerahan MURI sebagai sekolah yang memiliki lagu sekolah terbanyak, Pesta Saman sebagai ajang silaturahmi antar warga sekolah dan masyarakat serta hiburan bagi siswa-siswa yang selesai ujian sekolah. Demikian juga dengan “de MIPA” merupakan kerja sama dengan UPI.

Kegiatan yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut hasil dari diskusi antara Komite Sekolah dengan sekolah serta masyarakat yang diimplemtasikan dalam aksi, sehingga masyarakat ikut mendukung kegiatan yang direncanakan karena merasa memiliki kegiatan tersebut.

- **SDN Jatinangor**

Partisipasi masyarakat di SDN Jatinangor pada criteria partisipasi menurut masyarakat sebagai berikut. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap semua kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan. Salah satu kegiatannya adalah melakukan kunjungan ke sekolah atau dewan guru. Kegiatan ini dilakukan oleh Komite Sekolah dalam pertemuan insidental dan ketika terjadi permasalahan di sekolah. Rapat yang dilakukan tidak secara formal karena dianggap tidak efektif seperti yang diungkapkan oleh Kepala sekolah sebagai berikut:

“Jadi, kalau rapat secara khusus, khusus rapat tidak, cuma kalau anggota komite sekolah datang, mana si anu, kumpul, kumpul, secara kekeluargaan. Kalau secara kekeluargaan itu beda dengan rapat. Secara kekeluargaan semuanya berkumpul, untuk menyampaikan apa yang mengganjal di dalam hati, terasa enak begitu, tapi kalau rapat-rapat dinas, kan rapat-rapat dinas itu, tetapi kalau penyampaian secara kekeluargaan rasanya enak, walaupun tidak tegas, tetapi saya bisa merasakan dan saya tidak ditegur tapi saya dihimbau begitu, tentang bagaimana kinerja saya, dan kemudian bagaimana saya harus bersikap, tidak di forum rapat, tetapi secara bersama-sama saja begini, secara kekeluargaan, jadi yang ditonjolkan sifat kekeluargaannya”

Salah satu masukan yang diberikan oleh komite sekolah untuk meningkatkan prestasi siswa di sekolah dengan memberikan pelajaran tambahan berupa les dan beberapa target yang harus dicapai oleh siswa seperti bisa baca tulis bagi siswa kelas 1. Selain itu perhatian terhadap pelayanan kepada siswa. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah sebagai berikut:

“Kalau itu biasanya komite sekolah mempunyai perhatian terhadap hasil belajar siswa, contohnya begini, coba kelas 6 itu jangan lepas dari les, les, dan les gitu, kalau ada waktu saya siap untuk les matematika gitu, kelas 1 usahakan harus bisa baca tulis, bagaimana caranya, memberikan PR tiap hari, tidak mengapa, karena untuk peningkatan mutu, terus bagaimana sikap atau kinerja kita supaya anak itu betah di sekolah atau senang di sekolah gitu, jadi kalau perhatian masalah itu banyak, masalah bantuan-bantuan selama saya belum satu tahun, barangkali saja tahun depan mungkin gitu, tahun-tahun kebelakang tidak tahu, itu saja” (wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Jatinangor, 24 Juni 2010)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tampak bahwa pihak sekolah menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan komite sekolah dilaksanakan secara kekeluargaan. Hal demikian sudah barang tentu memiliki kelebihan dan sekaligus kelemahan yang terpenting adalah adanya kesepakatan program dan kegiatan setelah adanya pengawasan tersebut. Program dan kegiatan tersebut menjadi satu kebijakan yang diambil secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan program dan kegiatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan di satuan

pendidikan sekolah. Berkenaan dengan berapa kali dalam setahun komite sekolah dapat melakukan pengawasan kepada sekolah, Komite Sekolah SDN Jatinangor memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Setahun dua kali mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah dan para guru di sekolah. Kadang kala bertepatan dengan kegiatan sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah perlu memberikan jadwal kepada komite sekolah, kapan dapat melakukan kunjungan ke sekolah, apa tujuan pada komite sekolah melakukan kunjungan, dan sebagainya. Biasanya, kunjungan itu dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada tengah tahun dan ketika mau menghadapi UAN. Kira-kira dua bulan sebelum UAN orang tua murid kelas 6 dipanggil untuk memberitahukan bahwa anaknya mau menghadapi UAN. Selain itu, pertemuan kepala sekolah dengan komite sekolah dilakukan pada saat sekolah akan melaksanakan penerimaan siswa baru. Dalam pertemuan tersebut, juga dijelaskan tentang berapa besar biaya yang diperlukan, termasuk tentang biaya sekolah gratis” (wawancara dengan Komite Sekolah SDN Jatinangor, 22 Juli 2010).

Komite Sekolah juga ikut memverifikasi RAPBS sebelum disahkan dan ikut menandatangani RAPBS dalam dokumen pengesahan RAPBS. Ketua Komite Sekolah mengatakan: “ ... iya. kan sebelumnya dipelajari terlebih dahulu. Soalnya masing-masing guru mempunyai program tersendiri..” (wawancara dengan Komite Sekolah, 22 Juli 2010). Hal ini merupakan keterlibatan komite sekolah dalam memberikan dukungan pelayanan pendidikan di sekolah dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan demikian, keterlibatan Komite Sekolah tersebut berada pada level partisipasi biaya (*cost*), namun masih sebatas pada tenaga dan waktu yaitu pada masukan, pertimbangan, penyusunan RAPBS dan pencairan dana BOS. Kontribusi komite sekolah berupa dana dan material tidak ada.

5.2.4 Fungsi Partisipasi Masyarakat

Dari hasil analisis dengan tiga kriteria partisipasi, maka partisipasi SDN Cibeusi menunjukkan fungsi partisipasi pada tingkat ke empat yaitu *means/end*. Partisipasi tidak hanya sebatas pajangan (*display*) yaitu hanya hadir dalam pertemuan tanpa ada input dari masyarakat. Sekolah mendorong partisipasi

masyarakat dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk memperoleh masukan dan ide atau gagasan dari masyarakat untuk peningkatan pelayanan masyarakat serta masyarakat telah lebih aktif berpartisipasi, dan masyarakat berperan sebagai pengelola program dan kegiatan yang telah direncanakan secara demokratis bersama orangtua siswa dan warga masyarakat. Oleh karena itu level partisipasi di SDN Cibeusi berdasarkan kriteria ini merupakan partisipasi yang tertinggi, yakni partisipasi *mains/tend*.

Partisipasi menurut fungsi (*function*) SDN Jatinangor. Partisipasi orang tua hanya sebatas pajangan (*display*) yaitu hanya hadir dalam pertemuan tanpa ada input dari masyarakat. Seperti yang diungkap ketua komite sekolah “mengundang orang tua murid, karena disini masyarakat yang pendidikan rendah jadi kalo diajak rapat cuma bisa bengong, ya terpaksa kita yang harus punya inisiatif”

Komite Sekolah sebagai mitra sekolah berusaha memberikan masukan-masukan berupa saran dan pertimbangan kepada sekolah, sedangkan untuk mengharapkan partisipasi berupa material dan dana tidak terjadi. Sekolahpun tidak terlalu mengharapkan hal tersebut karena melihat kondisi lingkungan masyarakat yang tidak mendukung partisipasi dalam bentuk material dan dana. Oleh karena itu level partisipasi di SDN Jatinangor berdasarkan kriteria ini berada pada level peralihan antara display dan cost. Partisipasi tidak hanya pajangan tapi juga ada bentuk partisipasi berupa tenaga dengan memberikan berbagai masukan kepada sekolah. Namun bentuk partisipasi berupa dana dan material boleh dikatakan tidak ada.

Komite Sekolah yang melaksanakan perannya dengan baik, maka partisipasi masyarakat akan menjadi tinggi. Komite Sekolah yang dapat menjalankan perannya dapat membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah. Kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah (kepala sekolah dan guru) dan masyarakat adalah suatu kondisi yang ideal. Ide yang sinergetik ini akan mendorong sekolah dan masyarakat membuat perubahan. Disebut ide yang sinergetik karena kerjasama sekolah (kepala sekolah dan guru), orang tua dan masyarakat akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari pada mereka bekerja secara sendiri-sendiri.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan menyimpulkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Selain itu akan dikemukakan beberapa saran yang dipandang relevan dengan peningkatan partisipasi masyarakat.

6.1 Kesimpulan

Partisipasi masyarakat di SDN Cibeusi sudah bagus. Komite sekolah dan orang tua mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Hal ini terindikasi dengan adanya keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan perencanaan dan keputusan kebijakan, adanya keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan dan adanya keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan. Partisipasi di SDN Jatinangor sudah ada walau hanya sekedar memenuhi persyaratan harus adanya pengesahan komite sekolah untuk pencairan dana BOS. Ada keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan perencanaan dan keputusan kebijakan berupa pengesahan RAPBS. Keterlibatan komite sekolah dan orang tua dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah belum ada. Ada keterlibatan komite sekolah dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan berupa masukan dan kritikan. Partisipasi masyarakat berupa tenaga.

Usaha sekolah untuk memberdayakan masyarakat di SD Cibeusi adalah meminta masukan, kritikan dari orang tua siswa dan masyarakat sekitar, bersama komite sekolah menyusun dan mengesahkan RAPBS, menjalin komunikasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa mengenai program sedkolah dan kemajuan siswa, dan menjalin kerjasama dengan orang tua untuk membantu anak dalam kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah menyadari pentingnya partisipasi masyarakat untuk kemajuan pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi. Usaha yang dilakukan oleh SDN Jatinangor tidak sebagus SDN Cibeusi. Kepala sekolah merasa tidak berdaya dalam melibatkan masyarakat karena adanya program BOS dengan slogan sekolah gratis dan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa lemah.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor berada pada level yang berbeda. SDN Cibeusi berada pada level yang tinggi sedangkan SDN Jatinangor berada pada level yang lebih rendah. Bentuk partisipasi SDN Cibeusi berada pada transformative partisipation, partisipasi masyarakat menurut sekolah pada level empowerment, partisipasi masyarakat menurut sekolah pada level empowered dengan fungsi partisipasi pada tingkat ke empat yaitu mean/end, karena masyarakat telah lebih aktif berpartisipasi, dan masyarakat berperan sebagai pengelola program dan kegiatan yang telah direncanakan secara demokratis bersama orangtua siswa dan warga masyarakat. Bentuk partisipasi masyarakat di SDN Jatinangor berada pada tingkat ke dua, yaitu partisipasi instrumental, partisipasi masyarakat menurut sekolah berada pada level legitimasi, dan partisipasi menurut masyarakat pada level peralihan antara inklusi dan cost karena belum ada kontribusi berupa material. Berdasarkan fungsi berada pada level peralihan antara display dan cost. Partisipasi tidak hanya pajangan tapi juga ada bentuk partisipasi berupa tenaga dengan memberikan berbagai masukan kepada sekolah. Namun bentuk partisipasi berupa dana dan material boleh dikatakan tidak ada.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat disampaikan beberapa rekomendasi hasil penelitian. Adapun saran-saran ini dapat dilakukan oleh sekolah dan pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Pertama, membentuk forum komunikasi antar komite sekolah. Forum ini sebagai alat komunikasi bagi komite sekolah dengan komite sekolah yang lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah.

Kedua, mendorong dan menciptakan kondisi agar komite sekolah dipimpin oleh figure yang tepat dengan memiliki kapasitas sebagai pemimpin dan intelektual yang memadai serta paham tentang pendidikan dan persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Ketiga, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan orang tua siswa atau warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Penyadaran dan desiminasi kepada seluruh stakeholder pendidikan mengenai perubahan paradigma pendidikan dari sentralisasi menjadi pendidikan yang berbasis pada partisipasi masyarakat serta manajemen berbasis sekolah. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan dan workshop dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan tokoh masyarakat setempat.

Keempat, membudayakan komunikasi antara sekolah dengan seluruh komponen sosial di dalam masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, terus menerus dan terlembaga akan dapat menjadi media untuk berinteraksi untuk saling mendengar dan memahami aspirasi serta kepentingan masyarakat dan sekolah. Komunikasi dapat dilakukan dengan dialog antara sekolah dengan semua komponen social setiap saat dan dapat pula selalu berdialog secara rutin dengan pejabat pemerintah serta tokoh masyarakat.

Kelima, Pemerintah daerah kabupaten/kota, bahwa pembinaan komite sekolah selain dilakukan pembinaan oleh Pemeintah Pusat melalui Kemdiknas, alangkah baiknya apabila dibina juga oleh Pemerintah kabupaten/kota.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Anonim. *Pendidikan Dasar. Seri Kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1993.
- Anne Wescott Dodd dan Jean L. Konzal. *How Communities Build Stronger Schools*, New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Aoer, Cyprianus. *Masa Depan Pendidikan Nasional*, Jakarta, Center for Poverty Studies, 2005
- Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya*, PT. Bumi Aksara, 2003.
- Box, Richard C., *Citizen Governace: Leading American Communities into the 21st Century*, Sage Publication, Thousand Oaks CA., 1998.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Budimansyah Dasim. *Peranan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dalam Era Otonomi Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006.
- Buddy Ibrahim. *TQM: Panduan untuk Menghadapi Persaingan Globalisasi* (Jakarta: Djambatan, 2000.
- Boediono. *Pelaksanaan Wajib Belajar Sebagai Proses Pembangunan Masyarakat Ekonomi*. Depok: Pusat Penelitian Sains dan Teknologi, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 1996.
- Cohen, John and Uphoff, Norman T. *Rural Development Participation: Concept and Measures for Project Design-Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University Press, 1977.
- Conyer, Diana. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991.
- Danim, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *DPKS Wadah Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007.

- _____. *Pengkajian Efektifitas BOS Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2008.
- _____. Modul Pelatihan Praktik yang Baik Buku 1: *Manajemen Manajemen Berbasis Sekolah, Peran Serta Masyarakat, Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan*, Jakarta: Depdiknas, 2008.
- _____. *Optimalisasi Peran LPMP dan P3G dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Balitbang-Depdiknas, 2007.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Englewood Cliffs, 1994.
- Dye, T.R., *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs Prentice Hall, New Jersey, 2000.
- Dwiyanto, Agus. *Menwujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Faisal, Sanapiah. *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah*. Malang : UM Press, 2007.
- Fulan, Michael. *The Moral Imperative of School Leadership*, California: Corwin Press, Inc., 2003.
- Grant, Carl A. *Community Participation in Education*. Bostyon: Allyn and Bacon, 1979.
- Harris Alma, Day Christopher, Hopkins david, Hadfield Mark, Hargreaves Andy dan Chapman Christopher, *Effective Leadership for School Improvement*, London, RoutledgeFalmer, 2003.
- Irawan, Prasetyo. *Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: DIA FISIP UI, 2007
- Jalal, Fasli, and Bachruddin Mustafa., ed. *Education Reform in the Context of Regional Reform autonomy: The Case of Indonesia*, Jakarta (Indonesia), 2001.
- John Wagner dan John R. Hollenback. *Management of Organization Behavior* , New Jersey: Prentice Hall Inc, 1995.
- Kerlinger, F.N. *Asas-asas Peneliotian Perilaku, Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- King, Cheryl Simrel, dan Camilla Stivers. *Government is Us: Public Administration in an Anti-Government Era*, CA: Sage Publication, Thousand Oaks, 1998.

- Konisky, David M., dan Thomas C. Reierle. *Innovations in Public Participation and Environmental Decision Making: Examples from the Great Lakes Region, Society and Natural Resources*, 2001.
- Kuntjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1977.
- Midgley, James. *Community Participation: History, Concepts, and Controversies in James Midgley et.al. Community Participation, Social Development and the State*, London: Methuen, 1986.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2000.
- Mikkelson, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan-Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A Michael. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Nasution, S., *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : PT Bina Aksara, 1987.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Ouchi, William G., *Making Schools Work*. New York: Simon & Schuster Rockefeller Center, 2003.
- Roger Kaufman, Jerry Herman dan Kathi Watters, *Education Planning Strategic Tactical Operational*, Lancaster, USA: Technomic Publishing Company, 1996.
- Reid J. Norman. *Community Participation, How People Power brings Sustainable benefits to Communities*, USDA Rural Deelopment Office of Cmmunity Development, 2000
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat (Strategi Memenangkan Persaingan Mutu)*. Jakarta: PT Nimas Multima, 2006.

- Sallis Edward. *Total Quality Management in Education*, Alih Bahasa Riyadi Ahmad Ali dan Fahrurrosi, Yogyakarta, IRCisoD, 2006
- Sanders, Mavis G. *Building School-Community Partnership: Colaboration for Student Success*, California: Corwin Press, 2006.
- Scheerens, Jaap. *Menjadikan sekolah efektif*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Sergiovanni, Thomas J., *The Principalship, A Reflective Practice Perspective*, Boston: Allyn and Bacon, 1995.
- Sihombing, Umberto. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Jakarta, CV. Rineka Cipta, 2002
- Slamet, Margono. *Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*, Makalah Seminar Pemberdayaan SDM menuju Terwujudnya Masyarakat Madani, Bogor 25-26 September 2000.
- Soetopo. *Pelayanan Prima*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1999.
- Soetrisno, Loekman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Stoner, James A.F. dan Wankel Charles. *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta, Rineka Cipta 2003.
- Supriono dan Achmad Sapari. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya : SIC, 2001.
- Suryadi Ace, dan Dasim Budimansyah. *Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru*. Bandung: Genesindo, 2004.
- Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- The World Bank, *The Effectiveness of World Bank Support for Community-Based an-Driven Development*, Washington, D.C, 2005.
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- United Nations. *Development Administration: Current Approaches and Trends in Public Administration for national Development*. New York: UN, 1975.
- Worthen Blaine R. dan Sanders James R., *Educational Evaluation*, New York: Longman, 1987.
- White, Sarah., & Pettit, J. *Participatory Approaches and The Measurement of Well Being. Human Well-Being : Concept and Measurement*. London: Palgrave Macmillan, 2007.

World Bank. *Priorities and Strategies for Education: A World Bank Review*. Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 1995.

Yoyon Suyono, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Sekolah*, Yogyakarta: UNY, 2006

SERIAL

Agung, Iskandar, Sekolah sebagai organisasi pembelajaran (learning Organization): Startegi Peningkatan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 15 No.2 Maret, Jakarta 2009.

Buchy, Marlene, dan Digby Race, The Twists and Turns of Community Participation in Natural Resource Management in Australia: What is Missing, *Journal of Planning Literature*, Australia, 2004.

Bundu, Patta, Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan Dasar dan Menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol.15, No. 3. Jakarta: Balitbang Depdiknas, 2009.

Epstein, Joyce L. 1994. Parents' Reactions to Teacher Practices of Parent Involvement. *Elementary School Journal*, 86, 277-294.

Irvin, R.A. dan John Stansbury, Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort?, *Public Administration Review*, January/February 2004. Vol. 64. No. 1.

Murni, Sylviana., Pengaruh Karakteristik Sekolah, Partisipasi Masyarakat, Iklim Sekolah, dan Kemampuan Manajemen terhadap Keefektifan Sekolah pada SMP Negeri di DKI Jakarta (2005). *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Tahun 2006 Tahun ke-12, No.059, Jakarta

Siskandar, Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No.073, Tahun ke-14, Juli 2008.

Suryadi, Ace, Otonomi Sekolah, dewan pendidikan, dan Komite Sekolah, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 15 No.2 Maret, Jakarta 2009.

Wagh, William L., Jr., Valuing Public Participation in Policy Making, *Public Administration Review*, May/June 2002. Vol. 62, No. 3.

TESIS/DESERTASI

- Hapsari, Maulani Mega, *School Based Management in Lower Secondary Education: A Case Study of Four School in Yogyakarta Province*, Tesis, Nagoya University, 2006.
- Idris, Ecep. *Kontribusi Kinerja Komite Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah. (Studi Deskriptif Pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sumedang)*, Tesis, Bandung: UPI, 2009.
- Khairul Muluk, M.R, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah Dengan Pendekatan Berpikir Sistem (studi Administrasi Publik di Kota Malang)*, Desertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Moh Nurdin. *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 236 Kotamadya Jakarta Timur*, Tesis, Jakarta: UNJ, 2006.
- Sahidu, Arifudin. *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok NTB*, Bogor: Disertasi Program Pascasarjana IPB, 1998
- Weda, Sukardi. *Tesis: Efektifitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan Dasar 9 tahun, Studi Evaluasi Program BOS Pada SDN 07 dan SDN 09 Di Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen Kotamadya Jakarta Pusat. Program Pasca Sarjana Sosiologi. Program Studi Manajemen Pembangunan Sosial. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2006.*

PUBLIKASI ELEKTRONIK

- Herien Puspitawati et.al. *Executive Summary: Survey Kepuasan Orangtua Terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Disediakan Oleh System Desentralisasi Sekolah*, Institut Pertanian Bogor & PRMAP-ADBBAPPENAS, 2009
- ICW, *Hasil Survey Citizen's Report Card Anggaran dan Mutu Pelayanan Sekolah*, Jakarta, 2005.
- Litbang Kota Bandung, PT. Mitra Kawasa Konsulindo. *Kajian Keberadaan Dewan Sekolah di Kota Bandung*, Bandung, 2005.
- Ternieden, Marie DeLucia. (2009). *Disertation: A Case Study of Community Participation in Primary Education in Three Rural Village Schools in Ethiopia*. The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University. <http://www.proquest.umi.com/pqdweb>

Wilcox, David. (1994). *Community Participation and Empowerment: Putting Theory Into Practice*. RRA Notes, Issue 21, pp. 78-82. IIED London.

http://www.planotes.org/documents/plan_02112.PDF

<http://jatinangor-bersinar.com/>

<http://www.suparlan.com;>

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Departemen Pendidikan Nasional, *Panduan Umum Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah*, Jakarta, Direktorat Jenderal manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2005.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002, tentang *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2002.

Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992, tentang partisipasi *Masyarakat dalam Pendidikan Nasional*, Jakarta. 1992.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000, tentang *Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004*, Jakarta, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di sekolah

Responden : Komite sekolah

Partisipasi komite sekolah dalam pelayanan pendidikan di sekolah

- a. Komite sekolah terlibat dalam penyusunan perencanaan dan pembuatan keputusan
 - Hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan sekolah
 - Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS
 - Komite sekolah ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah
 - Memberikan usulan kegiatan kepada sekolah
- b. Komite sekolah mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah
 - Memberikan masukan dalam proses pembelajaran kepada guru
 - Komite sekolah mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah
 - Memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah
 - Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah
- c. Komite sekolah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah
 - Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana sekolah
 - Memantau pelaksanaan program sekolah
 - Memantau hasil pendidikan (UN, angka partisipasi sekolah, angka mengulang sekolah)

Responden : Orang Tua Siswa

Partisipasi orang tua siswa dalam pelayanan pendidikan di sekolah

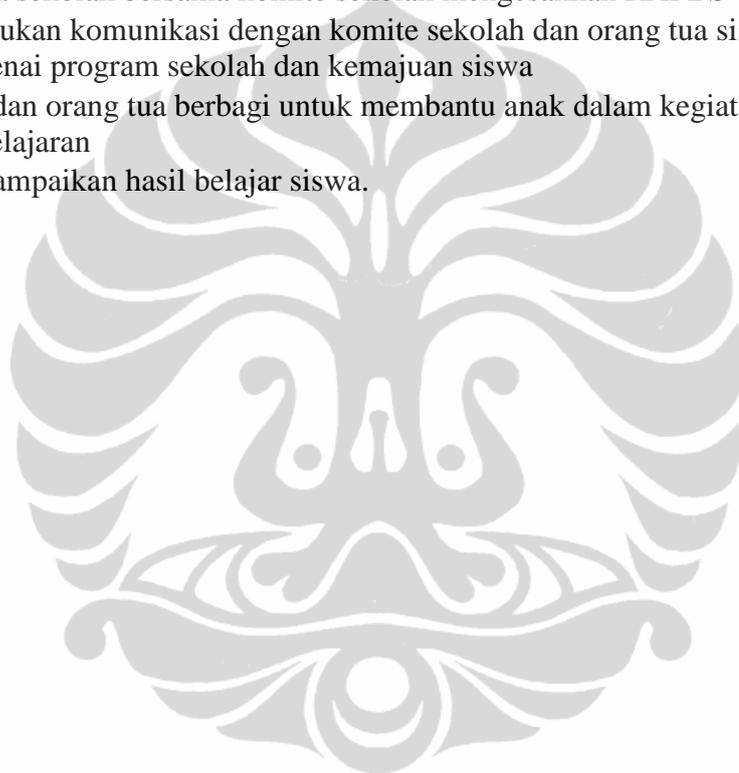
- a. Orang tua siswa terlibat dalam penyusunan perencanaan
 - Hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan sekolah
 - Hadir dalam pertemuan penyusunan RAPBS
 - Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah secara langsung atau melalui komite sekolah.
- b. Orang tua siswa mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah
 - Memberikan masukan dalam proses pembelajaran kepada guru
 - Memberikan sumbangan dana untuk sarana prasarana, dan kegiatan sekolah.
 - Memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan belajar mengajar
 - Menyiapkan anak untuk sekolah

- c. Orang tua siswa terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah
- Memberikan masukan, dan kritikan tentang pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah

Responden : Kepala Sekolah dan Guru

Partisipasi masyarakat menurut sekolah

- Merespon masukan, pertimbangan dan keluhan dari komite sekolah dan orang tua siswa
- Kepala sekolah bersama komite sekolah mengesahkan RAPBS
- Melakukan komunikasi dengan komite sekolah dan orang tua siswa mengenai program sekolah dan kemajuan siswa
- Guru dan orang tua berbagi untuk membantu anak dalam kegiatan pembelajaran
- Menyampaikan hasil belajar siswa.



TRANSKIP WAWANCARA

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi

Informan 1: Ketua Komite Sekolah SDN Cibeusi

No	Pertanyaan	Jawaban
A	Komite sekolah terlibat dalam penyusunan perencanaan dan pembuatan keputusan	
1	Bagaimana sekolah melibatkan komite sekolah dalam pembuatan keputusan	Program-program internal biasanya sudah biasa porsi ada di sekolah bu diana hanya beberapa bagian saja yang kita ikut memutuskan terutama yang kaitannya dengan KTSP tapi kalau program biasanya mengacu pada program yang berlandaskan oleh depdiknas baik tingkat profensi, kabupaten, maupun tingkat kecamatan
2	Apakah komite sekolah memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS?	keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan RAPBSya tentu harus sharing ya, pertama itu kan yang lebih banyak tahu tentang kondisi kelas ya sekolah, kita sifatnya memberikan masukan-masukan, kalau perlu apa namanya, revisi jarang ya, lebih banyak masukan kira-kira mana yang harus dilaksanakan, di prioritaskan, mana yang tidak. Misalnya tahun ini prioritas karena siswa bertambah banyak kita perlu bangku perlu meja, itu melibatkan komite sekolah
3	Apakah komite sekolah ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah?	Ya itu ikut, kebetulan suatu persyaratan dari boleh pencairan,
4	Apakah komite sekolah pernah memberikan usulan kegiatan kepada sekolah?	Ya, seperti Rekor MURI tahun 2008, the mipa DSCS, itu yang pertama, kita focus ke MIPA
5	Apakah sekolah, komite sekolah dan orang tua pernah mengadakan pertemuan? Apakah yang di bahas?	Pernah.
B	Komite sekolah mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	
1	masukan apa saja yang diberikan komite sekolah kepada sekolah dalam pembelajaran	Banyak dalam proses belajar mengajar kan kita mengusulkan apa namanya card siswa itu kemudian dalam pembiayaan biasanya kalau melibatkan

No	Pertanyaan	Jawaban
		orang tua siswa ya kita di ajak musyawarah bersama dan yang kedepannya bukan sekolah tapi komite sekolah kemudian juga karena DSCS berkiprah dengan dunia usaha bagi hasil pajak profit maupun non profit manfaatnya langsung dirasakan sekolah contohnya ada ruangan, ada sambungan telepon, ada apalagi pokoknya yang sifatnya secara komputer
2	Bagaimana keterlibatan komite sekolah dalam penyediaan sarana dan prasana sekolah?	Beberapa dana dari komite. Beberapa Dari dana dana yang bisa dimanfaatkan dari dana bos pak ya tapi sebagian, sebagian dari orang tua juga ada jadi kumpul-kumpul saja gitu tapi kalau semacam bangunan ini ada yang dilibatkan tapi satu persatu sih ini sifatnya insidental.
		kemudian juga karena DSCS berkiprah dengan dunia usaha bagi hasil pajak profit maupun non profit manfaatnya langsung dirasakan sekolah contohnya ada ruangan, ada sambungan telepon, ada apalagi pokoknya yang sifatnya secara komputer
		gak akan cukup tapi paling tidak bisa berbuat sesuatulah untuk sekolah seperti kemaren kita adakan ini ya ada olimpiade kita kemaren dapat dana dari jakarta ya 20 sementara yang kita peke di sini 40 jt bahkan bisa nyumbang pada sekolah dari hasil kegiatan ini bisa nyumbang sekolah 10 jutaan gitu jadi sedapat mungkin keberadaan DSCS itu membantu sekolah bukan menjadi beban, biasanya kalau kita ada pemungutan dari orang tua siswa dalam bentuk sumbangan sukarela umumnya untuk sekolah kita hanya sebagai kepanjangan tangannya untuk penyambung lidah antara sekolah dengan masyarakat, contoh misalnya gini besok kita ada ini pesta saman. Jadi dari orang tua itu total kembali ke sekolah untuk operasionalnya dari

No	Pertanyaan	Jawaban
		sumber-sumber lainnya termasuk dari iklan buletin kayak gitu, pokoknya kan saya gak bisa nyumbang ke sekolah karena kita punya ada sponsor itu ya, beberapa yang nyumbang juga ada, jadi DSCS selama ini hampir tidak pernah memanfaatkan dana dari orang tua siswa kecuali hanya menyambung lidah antara sekolah dengan masyarakat
3	Apakah Komite sekolah memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah	Ya. SD SN sejak tahun 2008, agustus 2008 kalau gak salah, banyak ini pengaruh jadi SDSN fasilitas programnya perpustakaan, kemudian kelengkapan perpustakaan buku-buku
4	Apa saja yang dilakukan oleh komite sekolah dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh sekolah	gak akan cukup tapi paling tidak bisa berbuat sesuatuloh untuk sekolah seperti kemaren kita adakan ini ya ada olimpiade kita kemaren dapat dana dari jakarta ya 20 sementara yang kita peke di sini 40 jt bahkan bisa nyumbang pada sekolah dari hasil kegiatan ini bisa nyumbang sekolah 10 jutaan gitu jadi sedapat mungkin keberadaan DSCS itu membantu sekolah bukan menjadi beban, biasanya kalau kita ada pemungutan dari orang tua siswa dalam bentuk sumbangan sukarela umumnya untuk sekolah kita hanya sebagai kepanjangan tangannya untuk menyambung lidah antara sekolah dengan masyarakat, contoh misalnya gini besok kita ada ini pesta saman. Jadi dari orang tua itu total kembali ke sekolah untuk operasionalnya dari sumber-sumber lainnya termasuk dari iklan buletin kayak gitu, pokoknya kan saya gak bisa nyumbang ke sekolah karena kita punya ada sponsor itu ya, beberapa yang nyumbang juga ada, jadi DSCS selama ini hampir tidak pernah memanfaatkan dana dari orang tua siswa kecuali hanya menyambung lidah antara sekolah dengan masyarakat
		mendukung biasanya kalau ada program selasa kemaren kita juara

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>umum ini apa namanya pak tim satuan khususnya hasnya SD ci beusi ini sebagian banyak semua orang tua ikut serta jadi anak-anak di dukung sampai jadi juara umum sampai mengalahkan anak-anak SMA gitu pokoknya terlihat sekalilah kalau ada acara itu pasti disebutkan komite sekolahnya gitu misalnya kita berikan semacam ininya bu atribut-atributnya kita sediakan dari komite sekolah anak-anaknya siswa sendiri atribut-atribut untuk kegiatan itu disediakan oleh komite sekolah semacam spanduk, umbul-umbul segala macam kayak gitu.</p>
5	Apakah komite sekolah pernah melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah untk memenuhi kebutuhan sekolah	<p>Pernah, dengan PLN, ada telkom juga terus ada apa namanya indofood, FIF, astra kita mulai. Pokoknya bentuknya kita tidak semata-mata minta sumbangan tapi dalam bentuk lain iklan gitu misalnya dilaksanakan.</p>
C	Komite sekolah terlibat dalam pendidikan di sekolah	<p>pengawasan pelaksanaan pelayanan</p>
1	Bagaimana komite sekolah mengevaluasi pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	<p>Antara lain melalui angket ya angket jejak pendapat itu berapa kali kita adakan angket jejak pendapat dan sekarang sudah melembaga di sini contoh misalnya dari seragam, seragam juga harus diangket ke orang tua misalnya seragam muslim pake warna apa gitu apa ya eh warna apa gak tapi setuju presi C untuk berpakaian muslim pada hari jumat sekarang tambah hari kamis pak ya kemudian tentang pengadaan pelajaran bahasa inggris, itu atas usul orang tua siswa, pelajaran komputer atas usul orang tua siswa nah kita atas angket itu jadikanlah apa namanya dilembagakan terus termasuk juga tabsa pak ya tabungan siswa jadi di sini itu tabungan siswa itu tidak dikembalikan kecuali kalau siswa sudah lama kelas 6 atau misalnya keluar dari sekolah nah sampai sekarang sudah di atas 100 jt pak ya pemutarannya, kurang lebih</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>160 jt tu itu dikoperasikan jadi ada uang pokoknya kembali ke siswa itu tidak dipotong keuntungannya untuk kesejahteraan guru menambah sarana sekolah untuk operasional DSCS biasanya kalau untuk DSCS dikembalikan lagi pada sekolah jadi koperasi kita besar jadinya intinya, bisa meminjamkan uang 20 jt, 20 jt bisa ya jadi perlu uang 20 jt bisa aman aman.. kalau ada keperluan ama bank.. bisa bisa kalau ke bank kan ke bank jabar biasanya prosedurnya panjang kalau kita mah masalah setuju semua dan DPDnya kembali semua ke guru akhir tahun ada yang menerima satu juta lebih dua juta ya DPDnya jadi keuntungan bagi siswa punya uang sebagai persiapan belajar sekolah bagi guru kalau besar di ci beusi bisa biaya lewat cepat atau mendesak jadi keuntungannya balik lagi ke ya..</p>
2	Apakah komite sekolah memantau program sekolah	<p>Ya ada, itu setelah ada evalutif itu respon masyarakat itu memang betul-betul gratis padahal itu semua kalau kita ada semacam urunan dari masyarakat itu kembali ke anak sebetulnya contoh waktu kita rekor muri DSCS menghabiskan biaya sekitar 70 jt sekianlah itu dari orang tua siswa itu partisipasinya sekitar 5 koma sekianlah itu kembali kedalam bentuk pakaian anak konsumsi gitu latihan nah untuk kegiatan lain-lainnya operasionalnya dari sponsor itu.</p>
3	Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya BOS?	<p>Nah itu yang perlu perjuangan lebih keras karena mungkin karakter masyarakat di sini cenderung untuk langsung berpartisipasi sangat berat pak ya terutama menyangkut masalah keuangan karena apalagi setelah adanya sekolah gratis itu tantangan luar biasaitu artinya walaupun misalnya kita ada semacam keinginan atau sumber pendapatan dari orang tua siswa itu harus musyawarah dulu gak bisa kita langsung... yang sifatnya</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		sukarela gak bisa dipatok harus sekian apalagi kita butuh sekian misalnya, meski kitapun berusaha dari sumber kesempurnaan gitu ya khususnya dari orang tua siswa kita sangat kaku dalam hal ini, ya kakulah dalam arti kita mesti musyawarah dulu kemudian musyawarah sifatnya tidak dipaksakan suka-suka rela.

Informan 1 : Orang tua siswa SDN Cibeusi (A)

Informan 2 : Orang tua siswa SDN Cibeusi (B)

No	Pertanyaan	Jawaban
A	Orang tua siswa terlibat dalam penyusunan perencanaan	
1	Apakah orang tua dilibatkan dalam penyusunan RAPBS	Tidak, hanya komite sekolah saja (A)
		Tidak, tapi RAPBS selalu di tampilkan di buletin (B)
2	Apakah orang tua memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS	Tidak, karena tidak dilibatkkan dalam penyusunan RAPBS (A)
		Tidak (B)
B	Orang tua siswa mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	
1	Apakah orang tua pernah memberikan masukan dalam proses pembelajaran kepada guru? Seperti apa	Pernah, lewat komite sekolah melalui angket yang diberikan oleh komite sekolah, seperti pemakaian seragam sekolah (A)
		pernah, mengusulkan untuk diadakan les bahasa Inggris. (A)
2	Apakah orang tua memberikan sumbangan dana untuk sarana prasarana, dan kegiatan sekolah?	Ya. Seperti acara pesta saman memberikan sumbangan untuk acara ini. (A)
		Ya. pas kenaikan kelas untuk saman, ya kalau ada, kalau ngga ya ga pa pa, ada kalkulasinya misalnya untuk saman ini kalau dibagi rata untuk tiap siswa kurang lebih 29 ribu sekian, tapi itupun untuk yang mau, misalnya ngga ya ga pa pa, kalau misalnya kita mampunya 10 ribu ya ga pa pa (B)
3	Bagaimana orang tua memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan belajar	Ya. bapak kepala ahli seni juga, seneng seni juga, nyambung sama Aples, ya udah digabung aja dan

Universitas Indonesia

	mengajar?	kemarin juga waktu rekor muri Aples juga terlibat, pesta saman Aples juga ikut gabung melatih anak-anak. (A)
		Tidak,
4	Apakah orang tua menyiapkan anak untuk sekolah?	Ya, pas anak Aples sekolah, Aples suka nganterin. Kalau belajarnya sama ibunya anak-anak. (A)
		Ya, dirumah, kalau ngga ada ujian, bukan ujian tengah semester, ujian akhir semester, paling malem ada PR ngga? Ada PR kerjain kalau ngga ya udah siapin buku, tapi kalau udah mendekati ujian seminggu sebelumnya ya anak udah mulai dibatasi mainnya, dikasih soal, ada whiteboard dirumah, kasih soal bagi 2 ini kelas 1 ini kelas 3, yang saya iniin Matematika terutama perkalian, karena perkalian agak susah kan terus dia males ngapalannya kan perkalian, terus saya diprotes oleh anak saya, mama ko perkalian terus aduh matematika terus, yang lain dong, bahasa Indonesia kek, PPKN kek, ah udahlah bahasa Indonesia mah gampang (B)
C	Orang tua siswa terlibat dalam pendidikan di sekolah	pengawasan pelaksanaan pelayanan
1	Bagaimana orang tua mengetahui perkembangan siswa	Biasanya Aples langsung tanya ama guru menanyakan gimana anak saya, kan ada raport juga (A)
		secara personal ya, saya nya datang ke sini, saya Tanya gurunya, guru kelas 1 guru kelas 3nya, gimana anak saya, jadi kita yang nanya gitu (B)
2	Apakah pernah memberikan masukan tentang pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	Tidak (A)
		Pernah, tentang wajib itu pramuka hari jumat ya, ini juga susah yang pramuka, anak kecapean udah ikut ekstrakurikuler yang lain.
D	Faktor yang melandasi timbulnya partisipasi masyarakat	
1	Faktor apa yang melandasi orang tua ikut berpartisipasi	tapi motivasi Aples disini yang pertama itu menitipkan anak Aples yang sekolah disini, yang mungkin minimal ya kalau orangtuanya nya ikut

		gimana gitu ya... (A)
		yang kedua sudah kewajiban, Aples tinggal di Cibesi ya mungkin meminta bantuan kenapa ngga. (A)
		mungkin Aples ingin punya banyak amal lah yang dipunyai Aples, yang orang lain percaya sama Aples, apa susah nya gitu ya, Cuma sekedar melatih. (A)
		ngobrol-ngobrol sama kepala sekolah, dan nyambung, nyambung nya bapak kepala ahli seni juga, seneng seni juga, nyambung sama Aples, (A)
		bagus ya Cuma tidak se bagus sekarang namanya, wanginya, setelah bapak Yana yang pegang disini. Gitu. Mungkin dulu juga bagus tapi tidak se bagus yang sekarang. (A)

Informan : Kepala Sekolah SDN Cibesi

No	Pertanyaan	Jawaban
	Partisipasi masyarakat menurut sekolah	
1	Bagaimana sekolah melakukan pendekatan dengan masyarakat?	pertama saya silaturahmi ke tokoh masyarakat di sini kira-kiranya siapa tokoh masyarakat yang bisa memajukan ci beusi saya tulis dulu daftar nama kepala desa saya datangin pak siapa yang ditokohkan di sini langkah awal saya kumpulkan itu, kumpulkan tokoh mengumpulkan langkah selanjutnya memanggil orang tua semua dengan komite dan para komite waktu itu di klaim dewan sekolah yang pertama BP3 kemudian ada dewan sekolah sehingga kita dewan sekolah itu DSS gitukan dewan sekolah si beusi sumedang dulunya dewan sekolah ci beusi sadangsari
		langkah awalnya saya membentuk dulu komite jadi kerjasama dengan komite, waktu saya menerima surat tugas

Universitas Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban
		kesini sebagai kepala sekolah karena terus terang saja saya dari guru awam jadi kepala sekolah bagaimana saya.
2	Apakah orang tua siswa, komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS?	Kalau orang tua secara keseluruhan tidak hanya kita yang membuat RAPBS bersama-sama guru bersama-sama komite cukup mewakili orangtua dan masalah RAPBS ini rencana anggaran pendapatan sekolah ini kita ajak musyawarah juga, hasil rapat kita muat dalam buletin orang tua tau semua karena ada buletin gitukan ini hasil RAPBS kita gitu meskipun tidak dirapatkan buat RAPBS dari pengurus komite gitukan
3	Apakah sekolah mengundang orang tua dan komite sekolah untuk membahas berbagai permasalahan.	kalau mengundang orang tua setiap tahun berkumpul bahkan tidak setahun sekali setahun dua kali lah ini dalam acara pemberian raport, kemudian acara kenaikan kelas itu kenaikan kelas itu semuanya diundang juga RAPBS ini mereka tahu gitukan. Baru saja rapat dengan guru kelas enam, sebelum UAS BN kita sama komite mengumpulkan guru kelas enam semua guru pengurus komite semua orang tua kelas enam memberikan pengarahan bagaimana pendidikan dirumah gitukan, pendidikan dirumah tidak hanya pendidikan disekolah sajakan untuk keberhasilan ini justru ada kerjasama dengan orang tua, kita bermusyawarah disana bagaimana untuk mendisiplinkan siswa bagaimana belajarnya dirumah orang tua ikut membimbing orang tua ikut menasehati gitukan itu seperti itu kita lakukan.
4	Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan tersebut?	yang dibicarakan rapat itu tentunya masalah banyak sekali tergantunglah masalahnya kalau kita masalah program sekolah misalkan, masalah peningkatan mutu, pernah juga kita menggemboskan ke masyarakat merapatkan dengan masyarakat bahwa ada waktu yang anak tidak boleh

No	Pertanyaan	Jawaban
		nonton TV di antara maghrib sampai isya' kita rapatkan dengan orang tua, orang tua 99% setuju bahwa jam maghrib sampai isya' satu jam saja gak nonton TV kita musyawarahkan bersama mereka setuju entah sekarang masih dilaksanakan apa tidak gak itukan pernah itu
5	Bagaimana sekolah melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pelayanan pendidikan disekolah?	Komite sekolah ini termasuk dari utama dalam pertama dalam problem gitu kita suka mengundang dia bagaimana membuat ospek ya mengetahui gitukan program-program sekolah kita buat program sekolah kita kemudian dibahas bersama-sama di sini kalau ada program sekolah suka dirapatkan dulu apakah komite mengikuti apa tidak, apakah baik atau kurang baik menurut penilaian komite kita bermusyawarah termasuk terutama dalam sarana prasarana yang membutuhkan bantuan orang tua dan dunia usaha lain, dulukan belum di paping-papingi belum buat taman gitukan kita musyawarahkan dengan komite kemudian untuk membeli alat-alat komputer komite yang berperan, untuk membeli alat-alat kesesenian komite berperan.
6	Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya program BOS	Dengan adanya bos itu di sini hampir semuanya gratis kecuali yang memang sifatnya agak besar terus yang di luar bos semacam besok untuk pesta samen, pesta samen kita sampaikan kepada orang tua bahwa biaya samen itu tahunan ya sejak tahun 2003 itu selalu ada samen membutuhkan biaya sekian dan tidak dipatok harus bayar berapa silahkan aja serelanya berapa memberi jadi sejauh ini kita tidak pernah mematok berapa harus dibayar orang tua.
7	Bagaimana sekolah merespon kritik dan keluhan dari masyarakat	Banyak saran yang diberikan dan kita tak pernah menolak kalau sarannya bagus saran itu kita olah gitu misalnya saran ini baik kita diskusikan bersama

No	Pertanyaan	Jawaban
		gitukan.
		Melalui tulisan seperti kuotanya yang waktu itu ada juga ada sifatnya dari orang tua siswa yang datang kalau ada keluhan disampaikan keluhannya seperti apa nanti dievaluasi oleh kepala sekolah disampaikan kepada guru-guru yang bersangkutan kalau menyangkut guru yang jelas kalau ada masukan-masukan kita sediakan kotak saran, kotak saran baik untuk kepala sekolah, untuk guru maupun untuk komite sekolah jadi hasilnya kalau ada masukan-masukan itu kita tidak langsung diekspos disampaikan dulu dari hati kehati kepada kepala sekolah, kepada guru gitu, sehingga hal-hal yang dianggap oleh orang tua siswa kurang berkenan bisa segera di atasi

Informan : Guru SDN Cibeusi

No	Pertanyaan	Jawaban	Kode
	Partisipasi masyarakat menurut sekolah		
	Bagaimana proses belajar mengajar di kelas	Di sini mulai tahun sekarang ada kelas keunggulan sama kelas regular sekelas yakini pintar dari rengking satu sampai berapa gitu, jadi kalau kelas satu agak dibedakan itunya sesuai dengan kemampuan anak tapi programnya sama cara penyampaian gitu sama aja ya dikelas A yang unggulan ada fasilitas lebih tapi kelas satu khususnya sama dengan kelas yang lain tadi. Proses KBM diawali dengan membuat tanda rencana pembelajaran dulu sebelum belajar itu biasanya disatu bukukan tiap hari, metode pembelajaran dengan metode ceramah ini dimanistrasi, metode ampilliputa ada, metode	

		itu barasiat ya pembenaran ya dicampur-campur Cuma kan kalau kelas satu itu harinya tematik	
	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam pembelajaran siswa?	jika ada anak bermasalah guru akan melakukan pertama saya kalau anak susah diperbaiki dikelas pertama saya panggil orang tuanya minta bantuan minta bersama-sama karena kan misalkan satu kali diperingati dua kali tiga kali gak bisa saya panggil orang tuanya gimana nih anaknya alhamdulillah sejauh ini dapat di atasi	

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan di SDN Jatinangor

Informan: Komite Sekolah SDN Jatinangor

No	Pertanyaan	Jawaban
A	Komite sekolah terlibat dalam penyusunan perencanaan dan pembuatan keputusan	
1	Bagaimana sekolah melibatkan komite sekolah dalam pembuatan keputusan	
2	Apakah komite sekolah memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS?	Biasa ada saran dari tokoh masyarakat, kalau dari komite memberikan respon pada yang namanya BOS itu adalah begini, itu kan untuk keadilan, seperti kuli cangkul punya mobil punya Perusahaan Kan bebas, karena ini yang kecil nanti menuntut keadilan, tidak adil nanti kalo saya disangka dengan putra haji anom, disini bingung bagi komite, sedangkan bos itu untuk semua, terpaksa diklasifikasi, nah ini liat kan ada dari pos-pos propinsi, ini sepatutnya hanya itu. apalagi terhadap anak yatim pakaian dan buku diberi selama satu tahun, dan disekolah ada data-data anak yatim. komite sekolah juga mempunyai data anak miskin dan yatim disekolah. Data-data ini di pakai untuk pertimbangan keadilan. Untuk pertimbangan sarana saya terpaksa

		kompromi dg guru karena bos muridnya sedikit saya membuat proposal, untuk membuat sarana olah raga dll,terkadang dapat terkadang tidak.
3	Apakah komite sekolah ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah?	Iya, sebelumnya dipelajari terlebih dahulu. Soalnya masing-masing guru mempunyai program tersendiri.
4	Apakah sekolah, komite sekolah dan orang tua pernah mengadakan pertemuan? Apakah yang di bahas?	Sering, dalam satu minggu 1-2 kali.atau ketika ada masalah dan mau menghadapi UAN saya siapkan, memanggil kelas 6 dan membentuk taman belajar (les), dan biaya operasionalnya diambil dari dana bos. Setahun dua kali mengadakan pertemuan dengan kepek dan guru sekolah. terkadang ada kegiatan sekolah, cara mengatur jadwal kelas itu komite masuk disana, apa tujuan pada komite terhadap penderitaan. Biasanya diadakan setahun dua kali, tengah tahun dan ketika maumenghadapi UAN. Kira-kira dua bulan sebelum UAN orang tua murid kelas 6 dipanggil untuk memperingati bahwa anaknya mau menghadapi UAN ini rapat kepek dengan dewan sekolah. kalo setelah penerimaan siswa mengadakan pertemuan, soalnya banyak yang bertanya berapa biayanya, disitu dijelaskan bahwa biaya sekolah gratis.
B	Komite sekolah mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	
1	masukan apa saja yang diberikan komite sekolah kepada sekolah dalam pembelajaran	Komite sekolah kan mitra kerja bukan bantuan untuk kepala sekolah. jadi klo ada masalah dirumuskan bersama dengan kepala sekolah. Hasilnya demi langkah kedepan,seperti siswa sini lulus 80% coba pikirkan bagaimana agar bisa lulus 100% apa kelemahaanya, dengan cara mengundang orang tua murid, karena disini masyarakat yang pendidikan rendah jadi klo diajak rapat Cuma bisa bengong,ya terpaksa kita yng harus punya inisiatif
2	Apa saja yang dilakukan oleh	Memberikan masukan, ikut hadir dalam

	komite sekolah dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh sekolah	kegiatan.
3	Apakah komite sekolah pernah melakukan kerjasama dengan pihak luar sekolah untk memenuhi kebutuhan sekolah	Belom, sedang dipelajari dulu apa sumbernya soalnya tidak ada perusahaan, klo ada perusahaan seperti SD cikerus 1&2, SD ciawi disana kan ada jatos atau stunami bisa dibina oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
C	Komite sekolah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	
1	Bagaimana komite sekolah mengevaluasi pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	Laporan dari wali kelas dilanjutkan ke kepala sekolah nanti dari kepek diteruskan ke komite sekolah, mengenai belajar siswa, kalo ada siswa yang kurang bagus, saya mengadakan pendekatan dengan cara mendatangi rumah siswa tersebut, apakah anak tersebut terlalu diperketat dirumah soalnya kalo anak dikampung sini terkadang disuruh ngarit (mencari rumput) sama orang tuanya soalnya disini kebanyakan orang tua murid adalah petani. Kalo memang seperti itu saya memberikan arahan kepada orang tua murid untuk tidak memperketat anak tersebut soalnya mau menghadapi UAN, klo seperti ini antara komite sekolah dan orang tua murid saling mmbutuhkan, komite membutuhkan agar anak didik tidak sampai ketinggalan dan orang tua murid memberikan uluran untuk belajar
2	Apakah komite sekolah memantau program sekolah	Komite sekolah terlibat dalam pengawasan, memberi dukungan, terkadang bisa juga diatur oleh aturan MPS 44 2002 bahwa komite berhak menegur, karena misi komite mutu penelitian yang berkualitas, kedua mensukseskan pendidikan 9 tahun, kalo ada guru leha-leha (sehari masuk, dua hari bolos) pasti saya tegur, kerna misi komite mutu penelitian yang berkualitas, sedangkan pencetak hal tersebut adalah guru bukan kepala sekolah, itu sudah diatur dalam MPS 44 2002

Informan 1 : Orang tua siswa SDN Jatinangor (A)

Informan 2 : Orang tua siswa SDN Jatinangor (B)

No	Pertanyaan	Jawaban
A	Orang tua siswa terlibat dalam penyusunan perencanaan	
1	Apakah orang tua dilibatkan dalam penyusunan RAPBS	ngga tahu, ngga pernah nanya itu neng, ngga nanya-nanyain. Disini juga suka nganterin anak udah diam, diam aja neng ngga pernah nanyain, jadi ngga tahu kalau ada yang nanya, siapa, ngga tahu
2	Apakah orang tua hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh sekolah	Ya, (A)
		Ya (B)
3	Apakah orang tua memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan RAPBS	Nggak, ikut bapak kepala saja (A)
		Ngga (B)
B	Orang tua siswa mendukung pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	
1	Apakah orang tua pernah memberikan masukan dalam proses pembelajaran kepada guru? Seperti apa	Ngga, saya mah percaya ama ibu guru (A)
2	Apakah orang tua memberikan sumbangan dana untuk sarana prasarana, dan kegiatan sekolah?	Kalo untuk acara akhir tahun biasanya sudah ada tabungan, hanya nambah sedikit saja. (A)
3	Apakah orang tua menyiapkan anak untuk sekolah?	Iya, seperti ngantar sekolah gitu (A)
		Ya, nemani anak belajar di rumah, mengingatkan anak kalo ada PR (B)
C	Orang tua siswa terlibat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan di sekolah	
1	Bagaimana orang tua mengetahui perkembangan siswa	Dari rapor (A)
		Iya dari rapor (B)

Informan : Kepala Sekolah SDN Jatinangor

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana sekolah melakukan pendekatan dengan masyarakat?	<p>menjalin hubungan dengan masyarakat ya umpamanya saya sering berkunjung karena dilingkungan ini banyak yang saya kenal, ke rumahnya dan tidak langsung terhadap anak tetapi secara kekeluargaan , umpamanya terus terang saja saya perlu ubi, disana banyak ubi saya datang, beli ubi 2 kilo 3 kilo, tapi maksudnya bukan untuk membeli ubi, atau yang lagi panen, udah ditumbuk parenya, suka dijual , suka, saya beli 4 kilo apa 5 kilo, ngobrol, sambil ada kebutuhan yang kiranya dia bisa mengerti , dan bisa dia pahami , bagaimana anak bapak, bagaimana keadaan disekolah saya disana, jadi ngga langsung turun beri arahan, ngga, tapi saya suka begitu, umpamanya main disana itu ada burung, tapi tahu anaknya itu kelas 3, burungnya bagus, darimana, ngobrol-ngobrol, nanti sebaiknya masalah anak didik harus saling membantu antara sekolah dengan dirumah, sekolah ini hanya terbatas dari waktu jam sekian sampai jam sekian, dirumah dari jam sekian sampai jam sekian, nah dengan cara-cara itulah saya berkunjung yang terutama perhatian-perhatian apa yang kira-kira dia senangi, pekerjaan dia apa, dia tukang layangan, ngobrol, berapa harga layangan, bagaimana itu, tidak langsung pada focus permasalahan, tapi sambil itu tujuannya itu. Tapi Alhamdulillah tidak ada rasa keluhan apa-apa, setahu saya disini, selama saya satu tahun</p>
2	Apakah orang tua siswa, komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan RAPBS?	<p>Sebagai penagawasan seperti ini sebenarnya bukan rencana tpi anggaran, klo dulu zaman sumbangan ortu murid itu rencana yang sebenarnya anggaran belanja sekolah karena sudah tersirat dalam bos, pengeluarannya otentik sudah ada pas 30 ribu itu aja yang dibuat program, kalo ada sisa berarti belum selesai dan kalo ada lebih berarti ada</p>

Universitas Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>yang ada yang salah, jadi harus pas. jadi pembuatan RAPBS berdasarkan hasil keputusan musyawarah bersama baik komite, kepek dan guru, jadi guru tidak akan cemburu sosial.</p> <p>Untuk RAPBS disusun secara berbarengan dengan komite sekolah dengan guru disesuaikan dengan pemberian uang yang ada dari pemerintah untuk tidak mau kadang-kadang saya pun dengan ibu bapak guru berraput perat patah gitu mengapa kita tidak gitu ya punya anak 125 dapat uang Bos sekian kebutuhan-kebutuhan jadi ibu bapak guru disini saling memaklumi saling mengerti dengan keadaan sekolah jadi RAPBS dibuat komite sekolah beserta guru-guru kadang-kadang kalau masyarakat waktu tahun ajaran atau akhir ajaran diberitahukan bahwa sekolah setelah gratis walaupun kami mendapatkan dana segitu jadi kemampuan kami dan mohon maaf jangan melihat melihat sekolah-sekolah yang bagus-bagus mengapa kalau sekolah kami misalkan keadaan begini terus keadaan kelas pun atau apa tu pelaburan setahun sekalipun atau enam sekalipun tidak bukan tidak mau kami melaksanakan itu kami pun menginginkan sekolah yang bagus tapi kemampuan kami</p>
3	Apakah sekolah mengundang orang tua dan komite sekolah untuk membahas berbagai permasalahan.	<p>kalau itu sering rapat bersama-sama dengan komite sekolah, rapat ngumpul, ngumpul bareng-bareng ada masukan-masukan dari beliau.</p> <p>jadi kalau rapat secara khusus, khusus rapat tidak, Cuma kalau dia datang, mana si anu, kumpul, kumpul, secara kekeluargaan. Kalau secara kekeluargaan itu beda dengan rapat. Secara kekeluargaan ngumpul, penyampaian apa yang ada di dalam hatinya rasa enak gitu, tapi kalau rapat-rapat dinas kan, kan rapat-rapat itu dinas tapi kalau penyampaian secara kekeluargaan rasanya enak walaupun tidak tegas tapi</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		saya bisa merasakan dan saya tidak ditegur tapi saya dihimbau gitu bagaimana kinerja saya, bagaimana harus sikap saya itu tidak di forum rapat tapi secara bersama-sama saja begini, secara keluarga jadi yang ditonjolkan sifat kekeluargaannya
4	Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan tersebut?	kalau itu biasanya perhatian gitu, contohnya begini coba kelas 6 itu jangan lepas dari les, les, dan les gitu, kalau ada waktu saya siap untuk les matematika gitu, kelas 1 usahakan harus bisa baca tulis, bagaimana caranya, memberikan PR tiap hari tidak jadi apa untuk peningkatan mutu, terus bagaimana sikap atau kinerja kita supaya anak itu betah disekolah atau senang disekolah gitu, jadi kalau perhatian masalah itu banyak, masalah bantuan-bantuan selama saya satu tahun belum, barangkali saja tahun depan mungkin gitu, tahun-tahun kebelakang tidak tahu, itu saja
5	Bagaimana sekolah melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pelayanan pendidikan disekolah?	Sebagai pengawasan seperti ini sebenarnya bukan rencana tpi anggaran, klo dulu zaman sumbangan ortu murid itu rencana yang sebenarnya anggaran belanja sekolah karena sudah tersirat dalam bos, pengeluarannya otentik sudah ada pas 30 ribu itu aja yang dibuat program, kalo ada sisa berarti belum selesai dan kalo ada lebih berarti ada yang ada yang salah, jadi harus pas.jadi pembuatan RAPBS berdasarkan hasil keputusan musyawarah bersama baik komite, kepek dan guru, jadi guru tidak akan cemburu sosial. Selain itu BOS karena untuk mempertanggungjawabkan keuangan BOS itu diikutsertakan komite sekolah, terus untuk pengambilan dana BOS itu atas persetujuan semua pihak, terutama dari guru-guru atau komite sekolah mengetahui, nah kegunaannya itu untuk apa? Untuk penggunaan BOS itu, komite itu diberitakan pada masalah itu,

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>bahwa ini satu untuk biaya gaji pegawai, kedua belanja barang, ketiga perawatan, keempat lain-lain. Yang 4 juta itu saya dengan bendahara berunding, diajukan ke komite sekolah, ada persetujuan komite sekolah, ya bisa dicairkan, dicairkan. Terus realisasi, pelaksanaan dengan komite, pak ini keadaannya begini, ya saya juga tahu, saya juga sebelum memberikan tanda tangan mengkaji dulu.</p> <p>tapi untuk melibatkan masyarakat kan saya pusing, masyarakat itu tidak sama, kalau masyarakatnya punya, kalau masyarakatnya tidak punya, benturannya terhadap saya saya juga</p>
		<p>pembuatan RAPBS itu kalau tidak sepengetahuan komite dan untuk pengambilan uang pun mungkin setiap bulan sepengetahuan komite seijin komite RAPBS rencana belanja sekolah itu dibuat bersama-sama para komite dan yang ada direng-reng sekolah ini dibuat bersama-sama membuat RAPBS terus ditindak lanjut komite itu lebih hal tentang dari pada ibu bapak guru umpamanya komitekan lebih tau gitu</p>
6	Adakah sumbangan dari komite sekolah maupun orang tua berupa material.	<p>nah secara sakral saja, saya satu tahun disini belum, terus terang saja belum, kalau pemberian langsung dari komite sekolah berupa materi tersebut, ini ada ini dari komite, saya selama satu tahun belum. Apalagi orang tua siswa, selama saya disini belum, dan untuk melibatkan masyarakat mengenai pendanaan-pendanaan disana didepan sudah dipampang 'sekolah gratis' dalam arti kata masyarakat sekolah gratis itu tidak bayar, apa saja yang diperlukan oleh sekolah itu tidak bayar, tidak ada pungutan, tidak ada biaya-biaya untuk sekolah</p>
		<p>saya mengusulkan bagaimana bapak ketua komite kalau sekolah yang lain dipagar ini begini nah itu saya putus saya</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		bagaimana susahnya itu susah untuk mencari dana dari mana mengumpulkan orang tua keadaan orang tuanya kan begini tau sendiri gitu. Jadi ada sebuah kepasrahan gitu hee
7	Apa saja masukan dari komite sekolah	kalau itu biasanya perhatian gitu, contohnya begini coba kelas 6 itu jangan lepas dari les, les, dan les gitu, kalau ada waktu saya siap untuk les matematika gitu, kelas 1 usahakan harus bisa baca tulis, bagaimana caranya, memberikan PR tiap hari tidak jadi apa untuk peningkatan mutu, terus bagaimana sikap atau kinerja kita supaya anak itu betah disekolah atau senang disekolah gitu, jadi kalau perhatian masalah itu banyak, masalah bantuan-bantuan selama saya satu tahun belum , barangkali saja tahun depan mungkin gitu, tahun-tahun kebelakang tidak tahu, itu saja
		Kalo kegiatan penggalangan dana yang di lakukan komite sekolah selama saya disini belum , dan untuk melibatkan masyarakat mengenai pendanaan-pendanaan disana didepan sudah dipampang 'sekolah gratis' dalam arti kata masyarakat sekolah gratis itu tidak bayar, apa saja yang diperlukan oleh sekolah itu tidak bayar, tidak ada pungutan, tidak ada biaya-biaya untuk sekolah
8	Bagaimana partisipasi masyarakat dengan adanya program BOS	untuk melibatkan masyarakat mengenai pendanaan-pendanaan disana didepan sudah dipampang 'sekolah gratis' dalam arti kata masyarakat sekolah gratis itu tidak bayar, apa saja yang diperlukan oleh sekolah itu tidak bayar, tidak ada pungutan, tidak ada biaya-biaya untuk sekolah. tapi untuk melibatkan masyarakat kan saya pusing, masyarakat itu tidak sama, kalau masyarakatnya punya, kalau masyarakatnya tidak punya, benturannya terhadap saya saya juga. Sekolah gratis-sekolah gratis mana bisa mengharapkan dari masyarakat, masyarakat pada waktu sekarang ini

No	Pertanyaan	Jawaban
		<p>kurang bukan kurang lagi hampir yang menjadi donatur-donatur itu bantuan-bantuan gak ada yaaa. Coba tolong-tolong saya juga membutuhkan ini. Kalau dulu donatur ada sebelum BOS sebelum digembuskan sekolah gratis. Waktu saya jadi guru sebelum di sini ada.</p>
9	<p>Bagaimana sekolah merespon kritik dan keluhan dari masyarakat</p>	<p>kami menerima dan berusaha menindaklanjuti. Biasanya di bicarakan dengan komite sekolah.</p>
10	<p>Apakah sekolah pernah menjalin kerjasama dengan pihak dunia usaha atau lembaga</p>	<p>selama saya di sini terus ngobrol dengan ibu kepala sekolah yang dulu sini terus dengan bapak komite bagai mana saya sudah melangkah ke sana kemari tapi hasilnya begini-begini juga.</p> <p>Kalau dari komite sekolah ee ini melakukan kerja sama dengan dunia usaha untuk sekolah? Saya masih belum sejauh itu Cuma kata ibu kepala sekolah yang dulu pernah melangkah tapi hasilnya kurang mengapa demikian tapi mohon maaf hampir semua kegiatan yang ada dilingkungan maupun dari dunia pendidikan dimana-mana kalau ada kegiatan-kegiatan yang dipake sandaran mengharapkan bantuan dari orang lain, contoh misalnya kegiatan 17 agustus contoh kecil yang ada dilingkungan ada kom 1, komisi satu setiap Rw mengharapkan bantuan dari kom itu misalkan coba dirikan proposal setiap Rw satu desa berapa itu umpamanya dari dari desa terdekat dari desa ini, desa itu jadi para perusahaan itu banyak orang-orang yang mengharapkan-mengharapkan gak bantu jadi kemungkinan saja dari perusahaan pun banyak mengadakan bantuan-bantuan kesana kesini hanya kebetulan saja SD jati nangor gak kebagian gitu alasannya perkiraan saya begitu yaitu contoh ada kom satu dilingkungan desa hampir setiap Rw datang ke kom itu untuk meminta bantuan untuk rame-rame untuk kegiatan itu kegiatan ini setiap ada</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		kegiatan pasti diminta bantuannya gitu ya disinipun saya disini mungkin saja keperluan kepara donatur banyak yang meminta-meminta hanya secara kebetulan saja SD jati nangor belum kebagian gitu

Informan : Guru SDN Jatinangor

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana proses belajar mengajar di kelas	cara belajar... menyampaikan materi gitu, ya macam-macam gimana kebutuhan aja materi apa yang dikasi ke anak gitu, ya mungkin ceramah, tanya jawab ya campur aja. (A)
		<p>bahan materinya udah dipersiapkan sebelumnya.</p> <p>Ya mungkin pendekatan aja dulu gitu ya ke anak kan ngasih pelajaran itu harus dekat dulu dengan anak tidak harus keras selalu keras ke anak gitu walaupun kita kan tujuannya kan mau anak bisa gitu beruntung tu anak dikerasin bisa gitu neng apalagi anak-anak SD.</p> <p>Untuk memotivasi belajar anak ada cara-cara tertentu, motivasi dirumah atau disekolah, disekolah dan mungkin juga motivasi di rumah, dirumah umpamanya kasi PR biar dia mau belajar, dikasi apa ya masukan-masukan aja ke anak mereka pasti mau gitu apalagi kan kelas 6, kelas 6 itu anaknya kan udah pada gede nah ngertilah gitu (B)</p>
2	Bagaimana keterlibatan orang tua dalam pembelajaran siswa?	Untuk perkembangan anak diberitahukan ke orang tua, kemampuan belajar ya harus itu dek.. kadangkala itu bagaimana perkembangan anaknya kalau yang bagus kan kadang orang tua itu ada yang acuh tak acuh gitu ya tapi yang sebetulnya yang harus dikasi orang tua

Universitas Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban
		bukan hal yang ya bagaimanapun harus kasi keorang tua ya terutama yang kurang supaya orang tuanya dipanggil gimana gitu ya supaya mengasi motivasi juga keanaknya dirumah mohon bantuan untuk dirumah belajar gitu (A)
		menvisit gitu ya sekali-kali kami suka menvisit kerumahnya ada apaan bagaimana gitu ya, melihat perkembangan anak gitu. (B)
3	Bagaimana hubungan antara komite sekolah dengan guru-guru.	Hubungan baik, kami sering berhubungan sering. Membahas perkembangan sekolah juga, tentang mungkin keuangan juga kan itu selalu harus di ikutkan dengan komite segala sesuatu harus di ACC dulukan dengan komite (A)